

**PERANAN PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT
NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ISLAM DI LAMPUNG**

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

**WIWIN WINDAYANTI
NPM: 1670031008**



**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kaum perempuan dan menempatkannya pada tempat yang terhormat. Perempuan merupakan sosok yang menjadi tauladan bagi sebuah generasi sehingga perlu dipersiapkan secara matang untuk menuju sebuah perubahan. Tanpa pengetahuan intelektual dan etika yang memadai, perempuan tidak akan bisa mengurus rumah tangga atau masyarakat. Oleh karena itu, perempuan wajib belajar atau mempelajari apa yang dipelajari kaum laki-laki mulai dari hal yang sangat dasar sampai ia paham dasar-dasar pengetahuan yang memungkinkannya dapat memilih sesuai minat dan pengembangannya kapan saja.¹

Menurut Imam Khomeini², perempuan adalah eksistensi yang dapat menghantarkan pribadi-pribadi yang unggul kepada masyarakat, sehingga menjadi sebuah masyarakat yang kokoh dan masyarakat yang menunjang norma-norma agama. Sebuah aksioma menyatakan bahwa eksistensi perempuan merupakan bagian yang urgen dari sebuah masyarakat. Lebih lanjut Imam Khomeini mengatakan, bukan zamannya lagi perempuan hanya dianggap sebagai reproduksi

¹Qasim Amin, *Takrir Al-Mar'ah*, (Mesir: *Al-Hay'ah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab*, 1993) Cet I, h. 42.

²Bernama lengkap Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini, lahir pada 20 Jumadil Akhir 1320 (24 September 1902) dan bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Fatimah Al-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, di kota Khomein yang dulu disebut propinsi Kamareh, sekitar 300 km dari Teheran. Imam Khomeini juga adalah salah seorang tokoh revolusi Iran dan merupakan pemimpin Agung Iran pertama yang telah memberikan pengaruh besar terhadap peradaban Islam khususnya di Negara Iran. Lihat Syaiful Amron, *Nilai-nilai Sufistik dalam Kepemimpinan (Studi tentang Pemikiran Imam Khomeini)* Jurnal, UIN Walisongo, 2014, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>. (diakses 25 Juni 2019).

untuk keberlangsungan komunitas manusia, karena kita tidak dapat menutup mata dari peran penting yang dimainkan oleh perempuan sehingga hal ini pun harus dibuktikan sendiri oleh perempuan dengan menunjukkan kredibilitasnya dalam berbagai ranah seperti ranah sosial, ekonomi, politik, agama, sains, dan sebagainya.³

Perempuan memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan dengan mudah begitu saja. Banyak peranan perempuan baik di dalam kehidupan keluarga, ekonomi, sosial kebudayaan, politik, hingga dalam agama dan pendidikan. Di tingkat keluarga, sebagai seorang anak, perempuan berperan sebagai pemelihara tradisi, norma, dan nilai-nilai luhur sehingga tuntutan bahwa di masyarakat ia harus menunjukkan ciri feminisme dan kepatuhan sebagai bentuk sifat perhatian dan kelembutan yang ia miliki.⁴ Sebagai seorang isteri, perempuan harus dapat menjadi abdi setia yang siap melayani sepenuhnya hak-hak dan keinginan suami. Sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, perempuan juga harus menjadi orang yang paling peduli yaitu sebagai orang pertama di lingkungan anak dan mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak, mendidiknya dan menjadikannya shaleh atau shalehah, berbakti dan berkepribadian baik. Senada dengan hal tersebut, menurut Engineer Asghar Ali, perempuan juga harus mampu memegang dan mempertahankan citra eksklusifnya di kalangan masyarakat.⁵ Citra perempuan yang ideal yaitu sebagai sosok yang bergerak sesuai kodratnya yang

³Imam Khomeini, *Manifestasi Tuhan dalam Wanita (Terjemahan)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

⁴http://novrianti,07_alumni.,ip.ac.ad. tgl 13 januari 2016, *Peranan Perempuan dalam Berbagai Sndi Kehidupan*, (diakses 14 Nopember 2017).

⁵Engineer Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha A., (Yogyakarta: Bentang, 1994), h. 121.

masih tetap bergema dan semarak hingga saat ini dan hal tersebut menjadi tuntutan umum yang dirasakan oleh perempuan dunia terutama di Indonesia.

Perkembangan peran dan posisi kaum perempuan dari masa lampau hingga saat ini idealnya harus menempatkan perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan memiliki kesempatan dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi majunya sebuah pembangunan.⁶

Sejalan dengan pendapat di atas, *Musdah Mulia* menyatakan bahwa:

Tidak adanya larangan dalam ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan rujukan atau dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan. Adanya perubahan dalam jiwa-jiwa perempuan untuk tidak mengikuti budaya yang bias gender yang sejatinya perempuan selalu dianggap kelas nomor dua bahkan tidak bisa diingkari perempuan menjadi korban kekerasan dengan mengatas namakan agama.⁷

Al-Qur'an juga telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan, sehingga Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan baik antarbangsa, suku dan keturunan.⁸ Adapun hal yang membedakan mereka terutama tingkat ketakwaannya.

⁶Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 30.

⁷Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 313.

⁸Nasaruddin Umar, "Perspektif Gender dalam Islam dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina", dalam <http://media.isnet.org/ Islam/Paramadina/Jurnal/ Jender3.html> (diakses 15 Desember 2017).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum banyaknya perempuan secara penuh berperan dalam pemberdayaan masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan masih dianggapnya perempuan belum sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki, kedudukan perempuan pun masih dianggap sebagai kelas nomor dua jika dibandingkan laki-laki, dan perempuan dianggap belum cukup mandiri dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah wadah atau organisasi kegiatan sosial keagamaan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan perempuan tersebut sehingga dapat ikut berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat Islam.

Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri bagi perempuan. Di dalam organisasi keagamaan ini, para Muslimat memiliki kesempatan belajar banyak hal seperti cara berorganisasi, tampil di depan publik, administrasi, perkembangan ekonomi melalui koperasi, dan pengetahuan agama melalui bidang dakwah.

Muslimat NU sebenarnya, tidak lepas dari semangat warga NU yang pada masa itu berjuang melawan penjajah. Meskipun ketika itu organisasi Muslimat NU belum dibentuk secara resmi, namun semangat juang kaum perempuan telah menunjukkan partisipasinya dalam melawan penjajah. Terbukti seorang ibu bernama *Chasanah* pernah menghadiri Kongres NU meskipun pada waktu itu Muslimat belum menjadi bagian dari NU. Namun, setelah adanya kongres tersebut dibentuklah organisasi Muslimat NU secara resmi.

Berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar Muslimat NU, Muslimat NU memiliki tujuan; 1) Terwujudnya wanita yang sadar beragama, berbangsa dan bernegara; 2) Terwujudnya wanita Indonesia yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah SWT; dan 3) Terwujudnya wanita Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya menurut ajaran agama Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.⁹

Sesuai dengan tujuan didirikannya Muslimat Nahdlatu Ulama (NU), saat ini kegiatan-kegiatannya mengarah kepada program pemberdayaan perempuan, yaitu sebuah usaha yang terencana dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam kualitas maupun kuantitas tidak di bawah laki-laki, namun sering kita jumpai bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki.

Selain itu, Muslimat NU terus berusaha merealisasikan tujuannya untuk memberdayakan perempuan, akan tetapi organisasi besar perempuan ini belum mampu memberdayakan masyarakat karena kegiatannya masih banyak terfokus kepada ritual keagamaan dan kegiatan sosial sehingga belum mampu memberdayakan masyarakat terutama dalam mengembangkan potensi atau skill yang dimiliki masyarakat untuk menjadikannya berdaya.

Begitupun halnya dengan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung berdasarkan pra survey di lapangan melalui metode wawancara yang ditujukan

⁹PP. Muslimat NU, *AD/ART Muslimat NU Lampung*, 2016-2020.

kepada Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muslimat NU mengatakan bahwa organisasi ini terus bergerak melakukan perubahan, tetapi belum mampu memberdayakan masyarakat Islam secara maksimal dikarenakan terdapat sebagian program kerja Pimpinan Wilayah Muslimat NU yang tidak berjalan dengan baik dan kegiatannya belum mampu menyentuh masyarakat secara langsung dan luas.¹⁰

Sejalan dengan pernyataan di atas, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung yaitu Catur Asmawati juga memberikan informasi bahwa sebagian program yang dicanangkan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tidak terealisasi dengan baik dikarenakan kurang aktifnya para pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung dalam kegiatan Muslimat NU serta belum berperannya secara penuh Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung dalam pemberdayaan masyarakat Islam, yang dalam hal ini pemberdayaan komunitas Muslimat.¹¹

Berdasarkan pra survey di lapangan tersebut, maka peneliti berasumsi bahwa Muslimat NU merupakan organisasi besar perempuan yang mempunyai *jama'ah* dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, di dalam organisasi besar perempuan ini masih banyak Muslimat NU yang hanya terikat oleh organisasi ini yaitu hanya mengakui Muslimat NU, ikut-ikutan saja bahkan hanya meramaikan saja, sehingga banyak yang tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan Muslimat NU. Begitupun dengan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung belum mampu

¹⁰Sri Dwi Ningsih, Ketua Umum PW Muslimat NU Propinsi Lampung, *Wawancara*, 5 April 2018.

¹¹Catur Asmawati, Sekretaris Umum PW Muslimat NU Propinsi Lampung, *Wawancara*, 20 Mei 2018.

memberdayakan masyarakat Islam yang dalam hal ini komunitas Muslimat NU Lampung karena hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator Pimpinan Cabang yang ada dibawahnya. Jadi, belum menyentuh langsung masyarakat atau komunitas Muslimat NU tersebut. Di samping itu, peneliti berasumsi bahwa program-program Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung kurang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat terutama dalam meningkatkan potensi atau skill yang dimiliki masyarakat untuk berdaya.

Catur Asmawati menambahkan walaupun sebagian program yang dicanangkan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung tidak terealisasi dengan baik, akan tetapi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung sudah banyak bekerjasama dengan Yayasan Muslimat NU dan sudah memberikan kewenangan kepada masing-masing kordinator bidang untuk melaksanakan program yang telah dibuat.¹²

Dalam bidang pendidikan dan kaderisasi, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung sudah bekerja sama dengan bidang Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) untuk membimbing di tingkat PAUD dan RA. Begitu juga dalam bidang budaya dan lingkungan hidup, Pimpinan Wilayah Muslimat NU bekerja sama dengan kegiatan dakwah seperti peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) yang tidak hanya diisi oleh pengajian saja, tetapi berbagai seni membaca Al-Qur'an dan hadrah¹³ di masing-masing cabang wilayah.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³Salah satu bentuk kesenian musik Islam yang ditampilkan dengan iringan-iringan rebana (alat perkusi) sambil melantunkan syair-syair serta pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat Bagus Nirwanto, *Musik Hadrah Nurul Ikhwan di Kabupaten Pematang: Kajian Aransemen dan Analisis Musik* , Jurnal, UNNES Semarang, 2015, dalam <http://lib.unnes.ac.id>. (diakses 25 Juni 2019).

Dalam bidang kesehatan dan kependudukan, Pimpinan Wilayah Muslimat NU bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Muslimat (YKM) yaitu ditandai dengan sudah berdirinya beberapa balai pengobatan. Adapun balai pengobatan yang sudah berkembang pesat terdapat di Lampung Tengah yang sudah berbadan hukum langsung dari pusat untuk kegiatan-kegiatan di wilayah.

Dalam bidang Ekonomi, Pimpinan Wilayah Muslimat NU sudah mendirikan koperasi AN-NISA. Begitupun halnya dalam bidang tenaga kerja, Pimpinan Wilayah Muslimat NU bekerja sama dengan BKK dan BLK untuk bagian pengembangan masyarakat. Di samping itu, Pimpinan Wilayah Muslimat NU juga bekerja sama dengan DEKRANAS untuk mengambil program pemerintah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Muslimat dan melaksanakan seminar-seminar yang menunjang kegiatan tersebut.

Dalam bidang hukum dan advokasi, Pimpinan Wilayah Muslimat NU sering melakukan pendampingan sebagai penasihat hukum. Adapun dalam bidang dakwah dan pengembangan masyarakat bekerjasama dengan bidang sosial seperti santunan yatim piatu ke panti-panti asuhan, kunjungan pembinaan ke Lapas wanita setiap dua minggu sekali, dan kegiatan bersama dengan lintas agama yang dilakukan satu bulan sekali.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan Pimpinan Wilayah Muslimat NU diharapkan mampu memberikan pengaruh positif khususnya bagi kaum perempuan, karena pada dasarnya setiap perempuan harus diberdayakan dan diberikan pendidikan untuk menggali potensi

¹⁴*Ibid.*

yang dimilikinya. Jika seorang perempuan telah berdaya, cerdas, berilmu, aktif, kreatif dan inovatif maka ia akan menjadi seorang ibu yang inspiratif dan baik bagi anak-anaknya, istri yang shalehah bagi suaminya serta dapat berperan dalam masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Peranan Muslimat dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum dianggap sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki.
- b. Masih banyak Muslimat NU yang belum berpartisipasi dalam kegiatan organisasi Muslimat NU.
- c. Banyak Pimpinan Wilayah Muslimat NU yang belum berperan dalam pemberdayaan masyarakat Islam khususnya pemberdayaan perempuan.
- d. Program-program Pimpinan Wilayah Muslimat NU kurang mengarah kepada pengembangan masyarakat.
- e. Muslimat NU belum mampu memberdayakan masyarakat dikarenakan kegiatannya masih banyak terfokus kepada ritual agama dan kegiatan sosial sehingga belum mampu memberdayakan masyarakat yaitu pengembangan potensi atau skill yang dimiliki masyarakat untuk menjadikannya berdaya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini, dengan fokus penelitian yaitu: Peranan Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung.

Adapun yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini yaitu empat program kerja unggulan Muslimat NU Lampung yang meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi;
- b. Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung?
2. Pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam memberdayakan masyarakat Islam di Lampung?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung.

- b. Untuk mengetahui pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam memberdayakan masyarakat Islam di Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah atau masukan bagi ilmu pengetahuan dalam mengkaji sebuah peranan yang dilakukan oleh sebuah organisasi perempuan dalam memberdayakan masyarakat Islam dan menambah literatur bahan kajian penelitian dalam menganalisis peranan Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi-organisasi perempuan terutama bagi Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam memberdayakan masyarakat Islam di Lampung agar dapat berdaya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan Peranan Pimpinan Wilayah Muslimat NU dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Lampung, menurut pendapat peneliti sampai sejauh ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Muslimat NU. Untuk memperoleh gambaran tentang posisi masalah yang diteliti dengan masalah yang telah diteliti sebelumnya, maka dilakukan analisis terhadap hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Roviana, dalam jurnal *Pendidikan Islam Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436*, yang berjudul “Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik”. Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan politisi dan penggerak NU memiliki keterbatasan peran dikarenakan sebagian Kiai masih cenderung menggunakan pola pikir sempit dan bersikap *patriarkhi* dimana kepemimpinan perempuan hanya dapat diterima sebagai wacana saja, namun sulit diterima dalam politik riil.¹⁵ Hal tersebut dapat dilihat dari pemikiran Khofifah Indar Parawansa, Nursyahbani Katjasungkana, Ermalena, Masruchah, dan Musdah Mulia dapat diterima dikalangan aktivis berlatar belakang NU dan diluar NU, namun justru dikalangan *mainstream* NU sendiri, khususnya Kiai dan Nyai tradisional belum sepenuhnya menerima.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Nur Agustin, dalam jurnal *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 03, Nomor 04, Tahun 2016, 1073-1088* yang berjudul “Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan”. Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo berpartisipasi dalam pendidikan politik yang dilakukan secara struktural dan kultural.¹⁶ Secara struktural dilakukan secara formal oleh para kader Fatayat NU yang berada dilingkup Pimpinan Cabang (PC). Sedangkan

¹⁵Sri Roviana, *Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436.

¹⁶Maya Nur Agustin, *Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik bagi Perempuan*, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 03, Nomor 04, Tahun 2016.

secara kultural, partisipasi yang dilakukan Fatayat NU dengan memberikan pengetahuan politik kepada perempuan selain anggota Fatayat NU melalui tim turun ke bawah (*Turba*).

3. Buku Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekontruksi Metodologis: Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002*; Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa wacana tentang Islam dan gender yang masih timpang, dimana perempuan sebagai penduduk mayoritas penganut Islam di Indonesia masih berada dalam kultur politik dan pemahaman keislaman yang kurang berimbang. Terdapat beberapa kajian tentang kedudukan Islam yang moderat tetapi jumlahnya sangat sedikit bahkan cenderung tidak dihitung sebagai kajian yang mencukupi tentang posisi dalam Islam di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kajian tentang kesetaraan gender dalam Islam tidak mendapatkan tempat yang layak sebagai sebuah kajian akademik di Indonesia seperti kajian tentang posisi perempuan yaitu Fatayat dan Muslimat, Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah kurang mendapatkan porsi yang berimbang dengan pembahasan kaum laki-laki. Hal ini terjadi sejak dari pemahaman Fiqih ulama salaf sampai dengan ulama kontemporer seperti banyak penafsir Islam di Timur Tengah bahkan di Indonesia.¹⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Nur Hidayah, dalam jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah, Volume 5, No. 3, Oktober 2017 yang berjudul "*Perkembangan Muslimat NU Cabang Lamongan*

¹⁷Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis : Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002), Cet. Ke-1, h. 35.

Bidang Ekonomi dan Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 1994-2015". Penelitian ini berkesimpulan bahwa perkembangan Muslimat NU Cabang Lamongan selalu mengalami peningkatan dari tahun 1994-2015 dalam berbagai bidang yang dilaksanakan terutama dalam bidang Ekonomi dan Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) karena bidang ini dapat mencakup dan menyebar ke wilayah Anak Cabang dan Ranting hampir di seluruh Kabupaten Lamongan.¹⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Munawir Haris, dalam jurnal yang berjudul "*Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah*". Dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa kontribusi politik NU dan Muslimat NU dalam lintas sejarah bangsa sangat signifikan.¹⁹ Hal tersebut dapat dilihat dari beragam data menunjukkan bahwa NU dan Muslimat NU berpartisipasi pasif dan aktif dalam politik Nasional. Pada masa kolonial, NU masuk dalam tipologi partisipan pasif, namun dalam masa berikutnya mengambil bentuk partisipan aktif yang non-konvensional. Partisipan aktif ini terlihat jelas ketika NU mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu, Muslimat menjadi partisipan aktif yang memperjuangkan kesetaraan gender pada tahun 1954. Lima tahun kemudian Muslimat menjadi *gladiator participant*, dan mulai menunjukkan peran gendernya secara simultan dengan mengangkat isu-isu strategis yang bertujuan untuk penguatan hak, sumber daya dan aspirasi

¹⁸Hikmah Nur Hidayah, *Perkembangan Muslimat NU Cabang Lamongan Bidang Ekonomi dan Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 1994-2015*, e-journal Pendidikan Sejarah, Volume 5, No. 3, Oktober 2017.

¹⁹Munawir Haris, *Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah*, Jurnal Pemikiran Islam, Tahun 2015.

bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik termasuk politik praktis.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Isnaeniyah, dalam jurnal *Agama dan Lintas Budaya 2* yang berjudul “*Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi “NU”*”. Dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa organisasi-organisasi perempuan Islam dalam program-programnya kurang mengarah kepada pengembangan masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, organisasi perempuan Islam khususnya Muslimat NU perlu melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan pengembangan masyarakatnya. Selanjutnya secara teologis perlu dilakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam terutama yang berkaitan erat dengan pembagian peran dan hubungan kerja antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti meyakini bahwa penelitian yang berjudul “Peranan Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Lampung”, merupakan penelitian yang pertama dan belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain serta berbeda. Penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitiannya yaitu difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat Islam yang tidak hanya terbatas melalui satu bidang saja seperti agama, sosial atau politik. Akan tetapi, difokuskan kepada empat bidang pemberdayaan masyarakat Islam yang merupakan bidang unggulan Muslimat NU Lampung seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah serta pengembangan masyarakat yang telah memberikan kontribusi besar

²⁰Erni Isnaeniyah, *Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU*, Jurnal *Agama dan Lintas Budaya 2*, 1 (Maret 2017): 154-168.

dalam memberdayakan masyarakat Islam di Lampung khususnya Muslimat NU di Lampung.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses dalam penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung dalam memberdayakan masyarakat Islam khususnya komunitas Muslimat NU dan untuk mengetahui pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Muslimat NU Lampung dalam memberdayakan masyarakat Islam di Lampung.

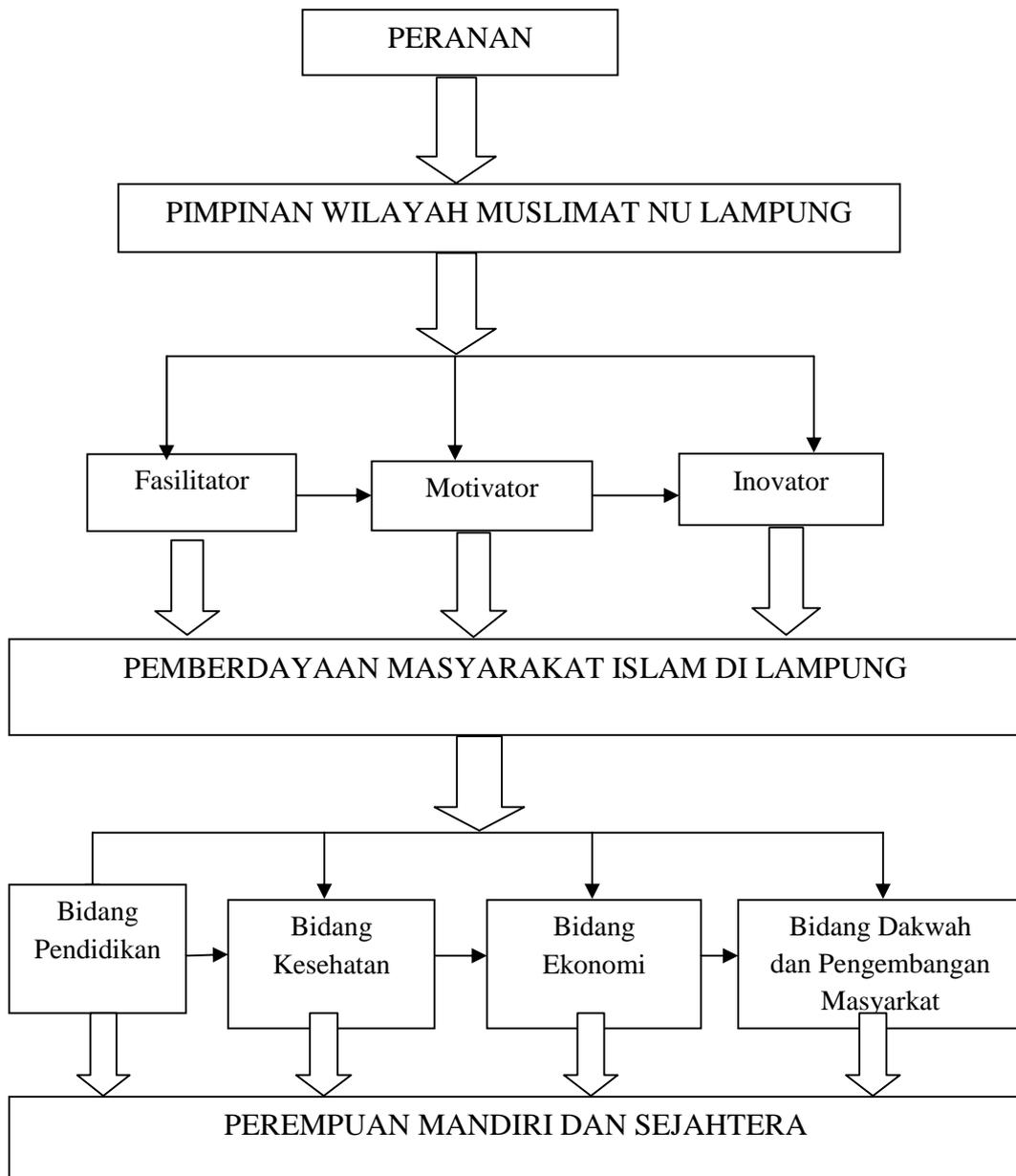
Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa belum banyaknya perempuan secara penuh berperan dalam pemberdayaan masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan masih dianggapnya perempuan belum sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki, kedudukan perempuan masih dianggap sebagai kelas nomor dua jika dibandingkan dengan laki-laki dan perempuan dianggap belum cukup mandiri dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah wadah atau organisasi sosial keagamaan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan perempuan tersebut agar ikut berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat Islam khususnya komunitas Muslimat NU.

Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung merupakan sebuah organisasi perempuan Islam yang terus bergerak dan berupaya untuk memberdayakan masyarakat khususnya komunitas Muslimat NU melalui berbagai bidang yang telah dicanangkan yaitu: bidang pendidikan dan kaderisasi, bidang kesehatan dan kependudukan, bidang ekonomi, koperasi, serta bidang dakwah dan

pengembangan masyarakat. Keempat bidang tersebut merupakan bidang unggulan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung yang telah memberdayakan masyarakat Islam khususnya komunitas Muslimat NU. Dengan berperannya Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung dalam memberdayakan masyarakat Islam khususnya komunitas Muslimat NU di Lampung, maka dapat membebaskan para perempuan Muslimat NU di Lampung dari kemiskinan dan kemarginalannya sehingga menjadi perempuan yang mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas, secara skematis dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:

Gambar1 Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas memberikan pemahaman bahwa peranan merupakan sebuah gerakan yang menuntut aktor yaitu Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung. Perannya sebagai fasilitator, motivator, dan inovator yang difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung melalui

berbagai bidang kehidupan sosial seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah serta pengembangan masyarakat.

Empat bidang garapan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung dalam upaya pemberdayaan masyarakat Islam khususnya bagi komunitas perempuan di Lampung dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1) pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai tolak ukur utama indeks pembangunan manusia (IPM), dan 2) bidang dakwah dan pengembangan masyarakat merupakan pemberdayaan khas Pimpinan Wilayah Muslimat NU sebagai sumber utama dalam memberdayakan indeks pembangunan manusia (IPM) sehingga perempuan menjadi mandiri dan sejahtera.

BAB II

PERAN PEREMPUAN DALAM INSTITUSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM

A. Peran Perempuan dalam Institusi Sosial

1. Institusi Sosial

Untuk menggambarkan tentang lembaga sosial, digunakan berbagai istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris “*social institution*”. Kuntjaraningrat menyebutnya dengan pranata sosial, yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada berbagai aktivitas untuk memenuhi berbagai kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.²¹ Selain pranata sosial, digunakan juga istilah bangunan sosial dan lembaga sosial. Bangunan sosial yang dalam bahasa Jerman dikenal dengan “*Die Soziale Gebilde*”, menunjuk pada bentuk dan susunannya, atau lebih menunjuk pada bentuk luarnya. Sedangkan lembaga sosial yaitu istilah yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemantri dalam Ary H. Gunawan merupakan semua norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat, seperti lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi dan sebagainya.²² Senada dengan hal tersebut, Mayor Polak menggunakan istilah institusi dan asosiasi. Institusi merupakan sistem peraturan, sedangkan asosiasi yaitu kelompok yang bertindak dan berstruktur menurut berbagai peraturan tersebut. Jadi, asosiasi adalah berbagai bentuk organisasi

²¹Kuntjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1964), h. 113.

²²Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 23.

sosial dengan berbagai tujuan yang spesifik.²³ Lembaga sosial merupakan organisasi norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting. Apabila kegiatan itu penting tentu dibakukan, dirutinkan dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. Peran yang melembaga adalah peran yang sudah dibakukan, disetujui, diharapkan dan dapat diwujudkan dengan cara yang sungguh-sungguh dapat diramalkan dan terlepas dari siapa yang mengisi peran tersebut.²⁴

Institusi atau lembaga sosial lahir dan terdapat dalam masyarakat tanpa mengenal tingkat kebudayaannya apakah taraf kebudayaan yang masih bersahaja atau kebudayaan modern. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat memiliki berbagai kebutuhan mendasar yang muncul dengan sendirinya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut maka lahirlah lembaga-lembaga. Misalnya lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga kemasyarakatan, dan sebagainya. Berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa institusi sosial merupakan sesuatu yang lahir disebabkan karena manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bisa seorang diri, melainkan membutuhkan kerjasama dengan orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial atau institusi sosial merupakan kumpulan norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka di dalam suatu masyarakat terdapat berbagai lembaga sosial, yang didasarkan pada jenis kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan

²³*Ibid.*

²⁴Apip Sohibul Faroji, Budaya dan Institusi Sosial, diakses dari internet <http://faroji83.wordpress.com/2008/06/10etnometodologi/>, (diakses 28 Oktober 2020).

masyarakat yang membutuhkan pemenuhan bersama, maka semakin banyak pula lembaga atau institusi sosial yang lahir dalam masyarakat.

Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dan dikacaukan pengertiannya, yaitu lembaga sosial, group sosial, dan organisasi sosial. Adapun perbedaan istilah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen yang diperhatikan	Lembaga Sosial	Group Sosial	Orgaisasi Sosial
Sifanya	Tidak resmi, tidak ada aturan tertulis, bersifat abstrak	Tidak resmi, tidak ada aturan tertulis, bersifat abstrak	Resmi/formal, ada aturan tertulis, dan bersifat konkret
Pola kelakuan	Bersifat mapan	Tidak mapan	Ada durasi tertentu
Tujuan	Pemenuhan kebutuhan bersama	Pemenuhan kebutuhan bersama	Ada tujuan yang jelas
Aturan	Ada sistem norma/kontrol sosial	Tidak ada kontrol sosial	Ada aturan tertulis dalam AD/ART
Hubungan sosial	Sangat kuat, langsung, dan bersifat pribadi	Sangat kuat, langsung dan bersifat pribadi	Bersifat impersonal
Jabatan/ pimpinan	Tidak ada struktur formal	Tidak ada struktur formal	Ada struktur formal, bersifat resmi, pola wewenang berbentuk piramida
Jumlah anggota	Tidak terbatas	Terbatas	Banyak
Syarat menjadi pemimpin	Biasanya didasarkan pada usia	Tidak ada aturan	Berdasarkan seleksi formal
Tempat tumbuhnya	Dalam masyarakat sederhana dan maju/modern	Dalam masyarakat sederhana dan maju/modern	Dalam masyarakat modern

Arah kegiatan	Tidak tertentu/terbatas pada bidang tertentu	Tidak tertentu/terbatas pada bidang tertentu	Mengarah pada produktifitas: - Menyelesaikan suatu pekerjaan; - Memecahkan masalah; - Mempertahankan /memperbesar output; - Memperbaiki cara kerja seefektif mungkin
---------------	--	--	--

Tabel 1: Perbedaan Lembaga Sosial, Group Sosial dan Organisasi Sosial²⁵

Lembaga sosial muncul dalam masyarakat karena adanya norma yang pada mulanya terbentuk secara tidak disengaja, lama kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya norma tentang pendidikan. Pada awalnya pendidikan bukan merupakan sesuatu yang menjadi ukuran status seseorang, lama kelamaan pendidikan tersebut disadari oleh anggota masyarakat, maka pendidikan itu menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pendidikan dirasakan sebagai suatu yang memberi status, maka pendidikan itu menjadi melembaga dalam masyarakat. Maka jadilah pendidikan sebagai salah satu institusi.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu norma dikatakan telah melembaga (*institutionalized*), apabila norma tersebut:

- a. Diketahui;
- b. Dimengerti atau dipahami;
- c. Ditaati;
- d. dan dihargai.²⁶

²⁵Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1993), h. 78.

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 224.

Di samping itu, lembaga sosial memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberi pedoman tingkah laku kepada para anggotanya;
- b. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan *sosial control* atau sistem pengendalian sosial yaitu sebuah sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku para anggotanya.²⁷

Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin dalam Ary Gunawan, bahwa lembaga sosial mempunyai enam ciri, sebagai berikut:

- a. Lembaga sosial merupakan himpunan berbagai pola pemikiran dan tingkah laku yang mencerminkan dalam kegiatan kemasyarakatan dan hasil-hasilnya;
- b. Lembaga sosial mempunyai satu atau lebih tujuan;
- c. Lembaga sosial mempunyai berbagai sarana untuk mencapai tujuan;
- d. Lembaga sosial mempunyai taraf kekekalan tertentu;
- e. Lembaga sosial mempunyai lambang atau simbol khas;
- f. Lembaga sosial mempunyai tradisi lisan maupun tertulis yang berisi rumusan tujuan, sikap, dan tindak-tanduk individu yang mengikuti lembaga tersebut.²⁸

Kalau dicermati pendapat John Lewis Gillin dan John philiph Gillin tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebuah lembaga sosial dapat dibedakan dari berbagai pola pemikiran dan tingkah laku dari pengikut suatu lembaga. Selain itu, setiap lembaga akan memiliki tingkat kekekalan dan taraf yang berbeda, tergantung pada anggapan orang-orang terhadap norma-norma yang ada, apakah wajar untuk dipelihara atau tidak. Suatu lembaga sosial mempunyai satu atau lebih tujuan yang boleh jadi berbeda dengan fungsi lembaga yang bersangkutan. Tujuan suatu lembaga adalah menjadi tujuan bagi golongan masyarakat tertentu yang perlu dipegang teguh, sedangkan fungsi lembaga yaitu peranan lembaga dalam sistem sosial yang mungkin tidak diketahui atau tidak disadari oleh

²⁷Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan,,*, h. 230.

²⁸*Ibid.*

golongan masyarakat tersebut. Setiap lembaga sosial mempunyai berbagai lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan, alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, serta masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Proses institusionalisasi (pelembagaan) dalam masyarakat terjadi apabila suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, sehingga diminta agar para anggota masyarakat tersebut mematuhi. Proses-proses di atas sepanjang mengenai soal-soal kebutuhan penting dan sepanjang melahirkan sistem yang universal dan stabil, dinamakan lembaga.²⁹ Berbagai norma dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat agar terlaksana sebagian yang mereka harapkan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masyarakat umumnya tidak berani melanggarnya.

Terdapat beberapa macam institusi sosial yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat,³⁰ sebagai berikut:

a. Institusi Pendidikan

Merupakan lembaga sosial yang memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui proses pendidikan dari tingkat dasar dengan

²⁹Joseph S. Roucek, *Sociology An Introduction*. Terjemahan Sahat Simamora dengan Judul “*Pengantar Sosiologi*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 34.

³⁰Duncan, Mitchel, *Sociologi, An Analysis of Social System*. Alih bahasa Sahat Simamora dengan judul “*Sociologi, Suatu Analisis Sistem Sosial*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 89.

satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan merubah perilaku individu kearah yang lebih baik. Terdapat berbagai fungsi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan yaitu sebagai pelestarian dan sarana pengembangan kebudayaan masyarakat, sebagai tempat memperpanjang masa, pengembangan bakat, dan sebagainya.

b. Institusi Ekonomi

Merupakan lembaga sosial yang mempunyai peran dalam berbagai kegiatan yang ada di bidang perekonomian. Fungsi utama dari lembaga ini adalah menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

c. Institusi Kebudayaan

Merupakan lembaga sosial yang berperan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan, seni, lingkungan dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan hasil cipta, karya, karsa masyarakat itu sendiri.

d. Institusi Keagamaan

Merupakan lembaga sosial yang mengantar kehidupan manusia dalam beragama, baik agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik dan sebagainya. Tujuan utama dari lembaga keagamaan ini adalah menjaga kerukunan antarumat beragama, sarana pembantu dalam pencarian identitas moral, kohesi sosial, keramahan dalam bergaul dan sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok.

e. Institusi Politik

Merupakan lembaga sosial yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses pembagian dan pembentukan kekuasaan dalam masyarakat sebagai proses pengambilan keputusan. Lembaga politik ini juga

memiliki beberapa fungsi lain seperti mengatur proses kegiatan politik, mewujudkan keterlibatan di dalam maupun di luar negeri, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara umum.

f. Institusi Keluarga

Merupakan lembaga sosial yang terkecil yang ada ditengah-tengah masyarakat. Lembaga ini terbentuk atas dasar adanya perkawinan dan hubungan darah. Terdapat berbagai macam fungsi yang ada di dalam lembaga keluarga seperti fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi produksi, fungsi pengawasan sosial, fungsi afersi dan fungsi pemberi status. Seluruh fungsi tersebut akan memandu keluarga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

2. Peran Perempuan

a. Pengertian Peran Perempuan

Menurut teori sosiologi Parson, peran didefinisikan sebagai berbagai harapan yang diorganisir berhubungan dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain.³¹ Senada dengan hal tersebut, menurut A. Fauzie Nurdin peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari status; dan status adalah kedudukan seseorang atau kelompok yang diakui dalam masyarakatnya. Peranan dan status merupakan dua konsep yang saling terkait dan dapat diibaratkan dua muka dari satu mata uang logam.³² Peranan dapat diartikan sebagai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

³¹John Scott, *Sosiologi: The Key Konsep*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 228.

³²A. Fauzie Nurdin, *Optimalisasi Kepemimpinan dan Penyuluhan Agama*, (Jogjakarta: Panta Rhei Books Offset, 2016), h. 70.

seseorang sebagai penggerak untuk mendorong kesadaran kelompok dalam mencapai tujuan.³³

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.³⁴ Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- 2) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat;
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas, Dougherty & Pritchard dalam Bauer,³⁵ menyatakan bahwa teori peran ini dapat memberi sebuah kerangka konseptual dalam studi perilaku disebuah organisasi. Menurut mereka suatu peran dapat “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.³⁶ Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard dalam Bauer menyatakan bahwa relevansi suatu peran akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan

³³*Ibid.*

³⁴Narwoko, Dwi J, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 137.

³⁵ Bauer, Jeffrey C. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati- Clermont, 2003, h. 54.

³⁶*Ibid.*, h. 143.

pengamat. Di dalam Desertasi ini yaitu Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung terhadap suatu *outcome* atau produk yang dihasilkan. Disamping itu juga, struktur dan strategi organisasi terbukti dapat mempengaruhi sebuah peran dan persepsi peran (*role perception*).

Selain norma dan budaya organisasi, peran merupakan salah satu komponen dari suatu sistem sosial organisasi, jika ditinjau dari perilaku organisasi. Secara umum peran diartikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Dalam suatu pekerjaan, terdapat dua jenis perilaku yang diharapkan. Pertama, *role perception* yaitu persepsi seseorang terhadap cara orang tersebut diharapkan berperilaku atau dengan arti lain berupa kesadaran atau pemahaman mengenai fungsi atau perilaku yang diharapkan dari orang tersebut. Kedua, *role expectation* yaitu cara orang lain dalam situasi tertentu dapat menerima perilaku seseorang. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting yaitu kemampuan orang untuk bekerja dan dalam hal identitas. Jadi, suatu organisasi harus dapat memastikan secara jelas bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan.

Seseorang dikatakan menjalankan suatu peran, apabila dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang merupakan bagian dari status yang disandangnya.³⁷ Berbagai peran yang berhubungan pada satu status ini dalam kerangka besar dinamakan sebagai perangkat peran (*role set*). Struktur sosial atau yang disebut organisasi masyarakat ditentukan oleh hakikat dalam berbagai peran,

³⁷Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 107.

hubungan antar berbagai peran tersebut serta distribusi sumberdaya yang jarang diantara orang yang memainkannya.³⁸

Menurut Scott al. yang dikutip oleh Kanfer³⁹, terdapat lima aspek yang penting dari suatu peran yaitu:

- 1) Suatu peran itu bersifat impersonal, yaitu posisi peran itu sendiri yang akan menentukan harapannya dan bukan individunya;
- 2) Suatu peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*), yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu;
- 3) Suatu peran itu sulit untuk dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*);
- 4) Suatu peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama;
- 5) Suatu peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama, karena seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Berdasarkan beberapa pengertian peran di atas, maka dalam hal ini peranan dikaitkan dengan peranan perempuan, dan perempuan di sini difokuskan kepada Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung. Jadi, peran perempuan yaitu suatu perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang disandang perempuan dan apa yang harus dilakukan perempuan dalam situasi tertentu agar memenuhi harapan dirinya maupun harapan orang lain.

b. Faktor-faktor yang Memotivasi Peran Perempuan

Menurut Stephen P. Robbins, faktor-faktor yang memotivasi peran perempuan dikaitkan dengan kebutuhan manusia yang dibagi kedalam tujuh tingkat kebutuhan⁴⁰ sebagai berikut:

³⁸*Ibid.*

³⁹Kanfer, R., *Task-Specific Motivation: An Integrative Approach To Issues Of Measurement, Mechanisms, Processes, And Determinants. Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237-264, 1987, h. 197.

⁴⁰Stephen, P. Robbins, *Prinsip-prinsip Organisasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2002), h. 21.

- 1) Kebutuhan dasar fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik, seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, oksigen, tidur, dan seks;
- 2) Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh kepastian, ketentraman, dan perlindungan dari bahaya, ancaman, pertentangan dan lingkungan hidup;
- 3) Kebutuhan akan kasih sayang, yaitu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kelompok masyarakat;
- 4) Kebutuhan akan penghargaan, yaitu penghargaan dari orang lain seperti prestasi, perhatian, pengakuan, kedudukan, penerimaan, nama baik serta penghargaan;
- 5) Kebutuhan ilmu pengetahuan yaitu adanya rasa ingin tahu karena merupakan salah satu ciri mental yang sehat;
- 6) Kebutuhan estetika, yaitu kebutuhan akan keindahan;
- 7) Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat, kualitas dan kapasitas diri.

c. Kategorisasi Peran Perempuan

1) Peran Perempuan sebagai Individu

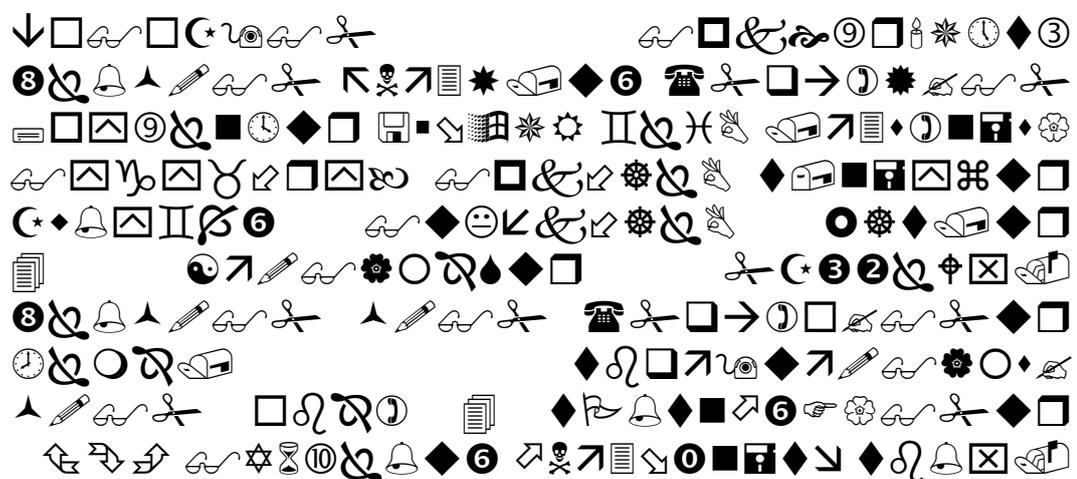
Perempuan, sebagaimana halnya laki-laki, diciptakan oleh Allah berasal dari saripati tanah dan selanjutnya melalui proses tertentu, yaitu dari *sperma* dan

ovum sampai berbentuk (QS. Al-Hajj [22] :5, dan QS. Al-Mukminun [23] :12-14). Sebagai makhluk Tuhan, ia berfungsi sebagai *khalifatullah* (QS. Al-Baqarah [2] :30) dan menjadi hamba Allah. Sebagai *khalifatullah* ia mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memakmurkan dunia. Sebagai hamba Allah, ia mempunyai kewajiban yang sama seperti laki-laki, beribadah kepada Allah (Q.S. Al-Mukminun [23]: 14; Al-Dhariyat [51] :56), beriman dan melakukan karya kemanusiaan (QS. Ali-Imran [3] :195; An-Nisa' [4] :124). Dia akan memperoleh ganjaran yang sama seperti kaum laki-laki jika melakukan kebajikan (QS. Al-Ahzab [33] :35), dan memperoleh siksa yang sama dengan laki-laki jika melakukan perbuatan buruk atau jika menjadi munafik dan kafir (QS. At-Taubah [9] :66).

Perempuan juga mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam melakukan dakwah dan ibadah *mahdhah* maupun *ghair mahdhah* (QS. At-Taubah [9] :71), di bidang hukum *jinayat* seperti dalam hukum *qisas* (QS. Al-Baqarah [2] :178), hukum pencurian (QS. Al-Maidah [5] :38-39), dan hukum perzinahan (QS. An-Nur [24] :2). Dengan demikian, Al-Qur'an secara umum sebenarnya telah menandakan tesis kesamaan harkat (*equality*) antara perempuan dan laki-laki. Di hadapan Allah satu-satunya yang membedakannya adalah terletak pada kualitas ketakwaannya (QS. Al-Hujurat [49] :13).

Berdasarkan landasan normatif Al-Qur'an tentang kesamaan perempuan dengan laki-laki bahwa watak kemanusiaan antara perempuan dengan laki-laki hampir dapat dikatakan sama. Allah memberi potensi dan kemampuan kepada kedua jenis kelamin ini untuk memikul tanggung jawab dan menjadikannya

mampu melaksanakan kegiatan yang bersifat umum dan khusus. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa hukum Islam meletakkan kedua jenis kelamin ini dalam satu kerangka yang sama, dan tidak dibedakan satu sama lain. Dalam kaitan ini, sumber perbedaan diantara umat Islam dalam memahami posisi dan laki-laki antara lain sering dikaitkan dengan asal kejadian perempuan yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa [4] : 1 berikut:



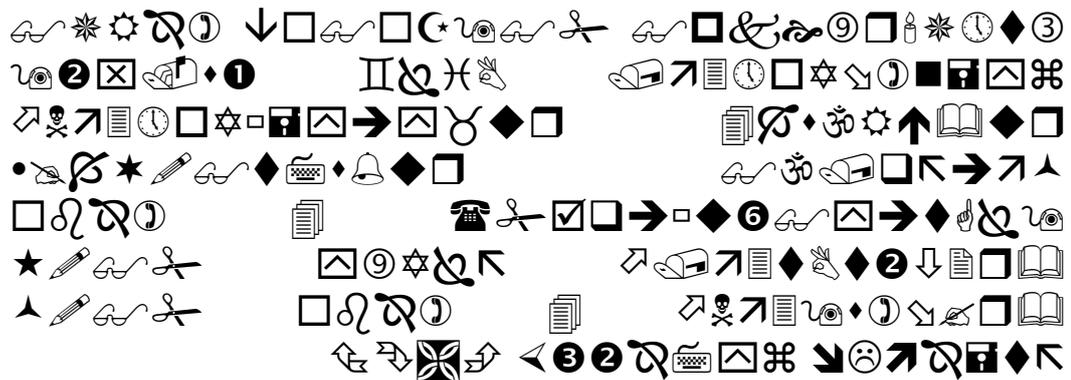
Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisa [4] : 1).

Ayat ini akan memberikan implikasi terhadap pandangan mengenai perempuan dalam relasinya dengan laki-laki. Di satu sisi menimbulkan persepsi subordinasi perempuan dari laki-laki, di sisi lain menimbulkan persepsi perempuan sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Di samping itu, dalam memahami ayat ini, ada dua pendapat yang bersumber dari perbedaan memahami

kata “*minha*”.⁴¹ Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa perempuan pendamping Adam diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam. Pendapat ini didasarkan pada penjelasan hadis *sahih* yang diriwayatkan Bukhari-Muslim:

“Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau kamu luruskan tulang yang bengkok itu, kamu akan mematahkannya, (namun) jika kamu biarkan dia akan tetap bengkok”.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa kata dalam ayat tersebut harus diartikan dengan unsur yang serupa atau sejenis, yaitu tanah, unsur yang darinya Adam diciptakan. Senada dengan pendapat di atas, menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Atik Wartini, bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan, persamaan antarbangsa, suku, dan keturunan adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam.⁴² Sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:



Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling taqwa di antara kamu.*”

⁴¹Q.S. An-Nisa [4]: 1.

⁴²Atik Wartini, *Tafsir Feminis M. Quraishy Shihab (Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah)*, PALASTREN: Jurnal Studi Gender, Vol. 6, No. 2, Desember 2013.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujarat [49]: 13).

Ayat di atas menegaskan bahwa tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, baik laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan substansial dalam beberapa hal utama seperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan serta perannya, tugas dan tanggung jawabnya.⁴³

Menurut Muhammad Rasyid Ridha⁴⁴ pemahaman tentang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk adam merupakan pemahaman yang keliru dan hal tersebut terpengaruh oleh kisah kejadian Adam-Hawa dalam kitab perjanjian lama (Kejadian II: 21).⁴⁵ Oleh karena itu, kalimat perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu menurut Quraish Shihab, harus ditafsirkan secara simbolis

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Dalam pemikirannya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah *Al-Urwah Al-Wutsqa*. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari Al-Syaikh Hussain Al-Jisr dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh sangat mempengaruhi jiwanya. Beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, *Al-Manar*. Tujuan *Al-Manar* sama dengan tujuan *Al-Urwah Al-Wutsqa*, antara lain, mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu pendidikan serta membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat. Rasyid Ridha melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Qur'an, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya, Muhammad Abduh, supaya menulis tafsir modern. Karena selalu didesak, Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir Al-Qur'an di Al-Azhar. Kuliah-kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang diberikan gurunya oleh Rasyid Ridha dicatat untuk selanjutnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis ia serahkan selanjutnya kepada gurunya untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan lalu disiarkan dalam *Al-Manar*. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan *Tafsir Al-Manar*. Lihat <https://www.harjasaputra.com/riset/biografi-dan-ide-ide-pembaharuan-rasyid-ridha.html>

⁴⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV (Kairo: *Dar al-Manar*, 1367 H), IV-3.

(*majazi*). Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami sebagai peringatan bagi laki-laki agar memperlakukan perempuan dengan bijaksana.⁴⁶ Sebab pada perempuan itu ada kecenderungan dan watak dasar yang tidak sama dengan laki-laki. Jika hal ini tidak disadari akan menyebabkan laki-laki bersikap tidak wajar. Laki-laki tidak akan mampu mengubah watak dasar perempuan itu dan bahkan jika mereka berusaha mengubahnya akibatnya akan fatal, sama seperti fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁴⁷ Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi⁴⁸ terjemahan kata yang artinya “dari yang sejenis dengannya”, pemaknaan ini senada dengan pemaknaan kalimat dalam Q.S. At-Taubah [9]: 128, dan kalimat dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21⁴⁹

Penafsiran kata pada ayat dan hadits tersebut memberikan implikasi terhadap konstruksi mengenai kedudukan perempuan di tengah-tengah kehidupan laki-laki, suatu implikasi perempuan dalam gender. Bagi pihak yang menganut prinsip kesamaan absolut berpendapat bahwa kesatuan penciptaan ‘*nafs*’ (*living entity*) mengakibatkan jenis yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap jenis yang lain. Hal ini barangkali dapat diwakili oleh pendapat Mansour Fakih yang dikutip oleh Masturin, menegaskan bahwa atas dasar itu prinsip Al-Qur’an

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 271.

⁴⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*,, h.331.

⁴⁸Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Al-Maraghi dilahirkan di daerah yang bernama Al-Maragho pada tahun 1298 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi. Sebagai seorang Ulama, Al-Maraghi mempunyai kelebihan bukan hanya dalam bidang bahasa Arab saja, tetapi juga dalam bidang ilmu tafsir, bahkan sampai kepada ilmu fiqih. Selain itu, pandangannya terhadap Islam terkenal sangat tajam menyangkut penafsiran Al-Qur’an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan Al-Qur’an. Dalam bidang ilmu tafsir, Beliau mempunyai karya yang sampai saat ini menjadi literatur wajib di berbagai Perguruan Tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu tafsir Al-Maraghi yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir ini terdiri dari 30 juz dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Lihat <http://repository.uin-suska.ac.id/6273/3/BAB%20%28II%29.pdf>.

⁴⁹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 4, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 19-20.

terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak isteri diakui *equal* dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum perempuan dan sebaliknya.⁵⁰

2) Peran Perempuan dalam Keluarga

Sebuah keluarga disebut sebagai institusi terkecil dalam masyarakat. Dalam keluarga juga terdapat berbagai pranata yang terdapat dalam masyarakat. Sebagai sebuah institusi, keluarga pasti memiliki pemimpin dan anggota. Sebagaimana Al-Qur'an secara tegas mengatakan bahwa laki-laki atau suami adalah pemimpin, dan hal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa [4]: 34. Di samping itu, Hamka,⁵¹ mengatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga merupakan kenyataan yang bersifat "universal", yaitu yang tidak hanya berlaku kepada manusia saja, tetapi pada binatang juga. Selain itu, bersifat instingtif yang bisa muncul dimanapun termasuk pada suku primitif.⁵²

Menurut Yuhana Ilyas mengutip pendapat Zamakhsyari, bahwa kalimat "*Ar-rizal qawwamunan'ala an-nisa*", mempunyai arti laki-laki atau suami mempunyai fungsi sebagai pihak yang memerintah dan melarang perempuan atau

⁵⁰Masturin, *Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam*, h. 356.

⁵¹Hamka, singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia dilahirkan pada 16 Februari 1908 (1327 H) di Maninjau, Sumatra Barat. Ayahnya Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, terkenal dengan sebutan Haji Rasul, adalah seorang ulama yang cukup terkemuka dan pembaharu di Minang Kabau. Keahliannya dalam bidang keislaman diakui dunia Internasional. Karenanya pada tahun 1955, ia memperoleh gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar. Sebelas tahun kemudian, tahun 1976, gelar yang sama diperolehnya dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Ketokohan yang semakin mengakar inilah, khususnya dalam bidang keulamaan, dan pengaruh Hamka dalam kalangan masyarakat sempat menimbulkan kekhawatiran dikalangan politik Orde Lama. Atas dasar ini, Hamka sempat meringkuk dalam penjara selama beberapa tahun. Namun demikian, ternyata penjara bagi Hamka memberi hikmah yang tidak ternilai. Ternyata, selama di penjara ia berhasil menyelesaikan karya monumentalnya, *Tafsir Al-Azhar*.

⁵²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 45-47.

isteri sebagaimana peran pemimpin Negara terhadap rakyatnya.⁵³ Zamakhsyari juga menyatakan terdapat dua alasan pokok yang menyebabkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga. Pertama, karena laki-laki membayar mahar dan menafkahi keluarganya. Kedua, karena kelebihanannya dibandingkan perempuan sebagaimana ditunjukkan oleh kata ganti “*hum*”, pada kalimat “*ba’dhuhum*”.⁵⁴

Seorang feminisme Muslim seperti yang diwakili oleh Asghar Ali Engineer yang dikutip oleh Yunahar Ilyas, telah menentang penafsiran tradisional tersebut, dan menurutnya:

Kalimat “*rijal qawwamuna*” bukan pernyataan normatif, namun pernyataan kontekstual. Dengan demikian kalimat tersebut tidak dapat diartikan laki-laki harus menjadi “pemimpin (normatif), Al-Qur’an hanya menyatakan laki-laki adalah pemimpin” (kontekstual). Oleh karena itu menurutnya, keunggulan laki-laki dari perempuan bukan keunggulan jenis kelamin, tetapi lebih pada keunggulan fungsi-fungsi sosial ketika itu yang dipikul oleh kedua jenis kelamin. Laki-laki mencari nafkah, perempuan melakukan pekerjaan (bukan sebagai kewajiban tetapi lebih sebagai pembagian tugas) domestik dan keduanya saling melengkapi.⁵⁵

Perempuan sebagai isteri mempunyai posisi penting, yaitu ia bersama suami menciptakan hubungan rasa kasih sayang (QS. Ar-Rum [30] :21) untuk mencapai keluarga sakinah. Keluarga yang mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga, sehingga berkembang rasa aman, tentram dan damai serta sejahtera dunia akhirat.

Sebagai seorang isteri dan anggota keluarga, perempuan mempunyai kewajiban terhadap suami dan sebaliknya ia mempunyai hak-hak dari suaminya. Kewajiban isteri terhadap suami antara lain ia harus patuh dan hormat terhadap

⁵³Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 75-76.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

suami, baik di hadapannya maupun di belakangnya (QS. Al-Nisa [4] :34). Sedangkan hak yang diperoleh isteri dari suami antara lain dapat perlindungan dan pimpinan dari suami (QS. An-Nisa [4] :34), memperoleh sandang, pangan dan papan yang layak (QS. Al-Baqarah [2] :233; At-Thalaq [65] :6-7), ia juga berhak dipergauli dengan baik (QS. An-Nis [4] :19). Sebagai ibu dari anak-anaknya, perempuan tidak dapat melepaskan diri dari kodratnya yaitu hamil dan melahirkan (QS. Az-Zumar [39] :233; Luqman [31] :14).

Sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan pemikir kontemporer menyangkut perlunya mendudukan perempuan dalam kedudukan sebenarnya serta memberi mereka peranan, bukan saja dalam kedudukan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kini semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan kekuatan bagi perempuan, mereka perselisihkan adalah batas-batas dari hal-hal yang sangat sempit dan longgar.

3) Peran Perempuan dalam Masyarakat

Posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah sangat jelas yaitu sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga Negara yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Menurut Musdah Mulia, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perintah Allah untuk berbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik ranah domestik maupun publik sangat tegas dan tandas dan keadilan harus ditegakkan. Keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang harus ditegakkan dalam menata kehidupan manusia, dan

prinsip tersebut harus ada dalam tata nilai setiap norma dan perilaku umat manusia dimanapun dan kapanpun.⁵⁶

d. Pembidangan Peran Perempuan

1) Bidang Pendidikan

Menurut Zuhairini, pendidikan merupakan usaha atau semua perbuatan untuk melimpahkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda sebagai upaya untuk menyiapkan dalam memenuhi fungsi hidupnya secara jasmani dan rohani.⁵⁷ Selanjutnya Abuddin Nata memaknai pendidikan dalam arti yang lebih luas, yaitu pendidikan Islam merupakan usaha mengarahkan, membimbing dan membina peserta didik secara terencana agar terbina suatu kepribadian utama yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁵⁸

Menurut ajaran di dalam Al-Qur'an dan hadits, sebuah implementasi pendidikan Islam diyakini mengandung kebenaran mutlak, universal dan abadi (*eternal*), bersifat transedental, dan selalu sesuai dengan fitrah manusia yaitu memenuhi kebutuhan manusia dimana dan kapan saja.⁵⁹ Di samping itu, pendidikan Islam tertinggi bertujuan untuk pembentukan manusia paripurna atau *insan kamil*. Tujuan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yaitu beribadah kepada-Nya. Jadi, pendidikan Islam diharapkan dapat mengantarkan peserta didik menjadi *khalifah fil ardhi* yang dapat melestarikan dan memakmurkan bumi, dan lebih jauh lagi mewujudkan

⁵⁶Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 23.

⁵⁷Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 95.

⁵⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 333.

⁵⁹*Ibid*, h. 60.

rahmat bagi alam semesta.⁶⁰ Hal ini merupakan akhir dari proses pendidikan atau dianggap sebagai tujuan akhirnya.⁶¹

Selain itu, sebuah arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik merupakan tujuan umum pendidikan Islam. Pendidikan merupakan usaha pengembangan potensi sumber daya manusia artinya sudah dapat merealisasikan *self realisation*, dan menampilkan diri sebagai pribadi seorang Muslim yang utuh. Tujuan umum pendidikan Islam yaitu pencapaian *self realisation* yang utuh dan proses pencapaiannya melalui berbagai lembaga pendidikan atau lingkungan baik pendidikan keluarga, masyarakat atau sekolah, secara formal, nonformal maupun informal.

Pendidikan baik pada tataran formal maupun nonformal secara konseptual adalah instrumen sosial yang memungkinkan kemanusiaan manusia dimanusiakan. Artinya manusia membutuhkan pendidikan sebagai sarana untuk memperdayakan potensi sumber yang ada dalam dirinya untuk berkembang secara dinamis menuju suatu format kepribadian yang cerdas, unggul, kreatif, terampil, dan bertanggungjawab berakhlak mulia. Nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan antara perempuan dan laki-laki hendaknya harus seimbang, perempuan sebagaimana laki-laki harus mempunyai kesempatan yang sama untuk sekolah lebih tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 48 UU dikatakan bahwa perempuan berhak untuk

⁶⁰Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 31.

⁶¹*Ibid.*

memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat (10) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat masih dibawah kekuasaan laki-laki. Hal ini disebabkan karena peranan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan perempuan dibawah kekuasaannya. Melihat kedudukan dan peranan strategis dari seorang ibu dalam proses pendidikan, sudah sewajarnya apabila peranan perempuan dalam proses pendidikan dalam hidup bermasyarakat mendapatkan tempat yang sewajarnya. Dimana kesetaraan gender merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Di samping itu, perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendidikan, bahkan pendidikan pertama yang diberikan kepada anak ialah dari seorang ibu. Ibu memiliki andil yang besar dalam melakukan pengembangan potensi anak. Bukan berarti tugas mendidik hanya diberikan kepada ibu semata, ayah juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak, namun tidak seotentik seorang ibu. Oleh karena itu, ibu memiliki keterikatan batin yang kuat dengan anak. Ada sebuah pepatah yang mengatakan jika perempuan cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan akan berpengaruh dalam pola pikir berkeluarga, cara mendidik anak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan di keluarga.

Adapun tujuan dari pendidikan berperspektif gender diantaranya adalah:

- a) Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, misalnya anak laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama untuk dapat mengikuti

pendidikan sampai kejenjang pendidikan formal tertentu, tentu tidaklah adil, jika dalam era global sekarang ini memomorduakan pendidikan bagi perempuan apalagi kalau anak perempuan yang mempunyai kemampuan. Pemikiran yang memandang bahwa perempuan merupakan tenaga kerja di sektor domestik (pekerjaan urusan rumah tangga) sehingga tidak perlu diberikan pendidikan formal yang lebih tinggi merupakan pemikiran yang keliru.

- b) Kewajiban yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Sejalan dengan hadist nabi *“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan”*.
- c) Persamaan kedudukan dan peranan yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Mereka mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Akhirnya berkaitan dengan persamaan kesempatan.⁶²

Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mencapai pembangunan kesetaraan dan kedamaian. Pendidikan tidak diskriminatif dapat bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki terutama untuk menyetarakan hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi agen perubahan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan dalam hal ini

⁶²*Modul Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Sektor Pendidikan*. Direktorat Kependudukan dan Pemerdayaan Bappenas Bekerja Sama dengan CIDA, h. 33.

dapat memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat dan meningkatkan status perempuan.

Beralihnya kedudukan seseorang baik laki-laki maupun perempuan ke arah pencapaian yang lebih tinggi dan salah satunya disebabkan oleh pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan berpengaruh positif terhadap kedudukan sehingga seseorang dapat lebih mudah memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih besar. Selain itu juga dapat memperoleh kedudukan tertentu pada strata sosial yang lebih tinggi lengkap dengan fasilitasnya. Kedudukan yang meningkat itu memberi peluang bagi mereka untuk dapat bergaul dengan elite politik, ekonomi, maupun pemerintahan. Dengan kata lain faktor pendidikan bagi perempuan dapat meningkatkan status sosialnya.⁶³

Sejalan dengan hal tersebut, menurut para teoretisi fungsionalis pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan modal individu secara individual, yaitu kecakapan dan keahlian yang diperoleh.⁶⁴ Begitupun para ekonomi menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan sama besarnya dengan investasi dalam barang-barang modal. Para teoretisi ini juga memfokuskan pada tingkat keuntungan uang atau waktu yang diinvestasikan guna mendapatkan berbagai keahlian yang sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan dianggap seakan membawa keuntungan besar bagi individu untuk meningkatkan penghasilan.

⁶³A. Fauzie Nurdin, *Islam dan Perubahan Sosial*, (Semarang: Reality Press, 2005), h. 92-93.

⁶⁴Jane C. Ollenburger, Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 40.

2) Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan perempuan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini di dalam masyarakat masih beredar pandangan tentang tanggungjawab pemeliharaan kesehatan keluarga ada pada pundak perempuan ditinjau dari fungsi mereka sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan, kehamilan, kelahiran, masa menyusui, dan pemeliharaan anak sampai anak mandiri.⁶⁵ Pada tahun 1999, dalam Konferensi Perempuan Sedunia ditegaskan bahwa hak-hak asasi perempuan yaitu mencakup hak perempuan untuk memiliki kontrol dan keputusan secara bebas serta bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan seksualitas, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, kekerasan, dan diskriminasi.⁶⁶ Relasi yang sama antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan hubungan seksual dan reproduksi, penghargaan dan persetujuan yang sama, dan saling bertanggungjawab terhadap perilaku seksual serta konsekuensi-konsekuensinya.

Hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi telah menjadi isu yang sangat penting untuk disikapi, karena selain menyangkut masalah hak asasi perempuan juga disebabkan:

- a) Hak dan kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya;

⁶⁵Sri Endah Nurhidayati, "Profil Kedudukan dan Peranan Wanita di Bidang Ekonomi, Kesehatan dan KB di Kabupaten Gresik," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 3, Juli 1999, h. 31-42.

⁶⁶Deklarasi Beijing, *Platform For Action*, 1999.

- b) Hak dan kesehatan reproduksi memiliki peranan strategis dalam usaha pemberdayaan perempuan, dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi yang akan datang.⁶⁷

Konferensi kependudukan sedunia di Kairo 1994 memuat pengertian hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi dalam arti luas karena dengan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi yang meliputi antara lain:

- a) Keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh;
- b) Kehidupan seks yang memuaskan dan aman;
- c) Hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, dan terjangkau;
- d) Memberikan kesempatan untuk memiliki bayi yang sehat;
- e) Metode, teknik, dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi;
- f) Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.⁶⁸

Hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi dinyatakan sebagai kebutuhan yang mengalami perubahan sepanjang siklus hidup, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara yang peka terhadap keanekaragaman keadaan masyarakat setempat. Adapun program aksi yang dicanangkan adalah:

⁶⁷Komariah Emong Sapardjaja, Guru Besar Hukum Pidana UNPAD, dan Pengamat Hak Asasi Perempuan.

⁶⁸Hasil Konferensi Kependudukan Sedunia di Kairo 1994.

- a) Semua Negara harus berusaha untuk menyediakan melalui sistem pemeliharaan kesehatan primer, kesehatan reproduksi untuk semua pribadi pada usia yang tepat secepat mungkin;
- b) Program-program pemeliharaan kesehatan reproduksi hendaknya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan wanita, termasuk remaja, dan harus melibatkan wanita dalam kepemimpinan, perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, pelaksanaan, organisasi, dan penilaian pelayanan. Pemerintah dan organisasi lain harus mengambil langkah yang positif untuk melibatkan para wanita pada semua tingkat sistem pemeliharaan kesehatan;
- c) Menemukan program-program inovatif yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi, konsultasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi untuk para remaja dan pria dewasa;
- d) Mempromosikan partisipasi masyarakat, dan kerjasama dengan organisasi-organisasi non pemerintah;
- e) Kerjasama internasional untuk pelatihan tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi;
- f) Perhatian khusus terhadap buruh migran dan mereka yang menjadi korban kekerasan seksual yang tidak mempunyai kekuatan dan akses terhadap keadilan.⁶⁹

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka perempuan

⁶⁹ *Ibid.*

sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Pelayanan kesehatan reproduksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan dan laki-laki berhubungan dengan masalah seksualitas dan penjarangan kehamilan. Tujuan dari program-program yang terkait serta konfigurasi dari pelayanan tersebut harus menyeluruh, dan mengacu kepada program Keluarga Berencana (KB) yang konvensional serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Komponen yang termasuk di dalam kesehatan reproduksi adalah:

- a) Konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit;
- b) Pendidikan seksualitas dan gender;
- c) Pencegahan, skrining dan pengobatan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS dan masalah kebidanan lainnya;
- d) Pemberian informasi yang benar untuk memilih alat kontrasepsi;
- e) Pencegahan dan pengobatan infertilitas;
- f) Pelayanan aborsi yang aman;
- g) Pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan pasca kelahiran; dan
- h) Pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak-anak.

3) Bidang Ekonomi

Al-Qur'an memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4] :32. Dalam kata ini, Hamka⁷⁰ memberi catatan bahwa perempuan dan laki-laki diperintah untuk berusaha atau bekerja dan mereka akan memperoleh bagian sesuai usahanya, namun beliau mengingatkan bahwa perempuan harus memilih lapangan pekerjaan yang harus dilakukannya.

Menurut Kabeer yang dikutip oleh Mayoux, terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang ekonomi⁷¹ diantaranya:

a) *Welfare* (kesejahteraan)

Aspek ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dalam akses terhadap kesejahteraan, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan.

Menurut Claros, terdapat tiga unsur utama dalam kesejahteraan diantaranya:

- (1) Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi Negara secara keseluruhan. Jadi, tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan.

⁷⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,, h. 35-39.

⁷¹Mayoux, Linda, *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*. Aga Khan Foundation, (2001), Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>. (diakses 23 Juni 2018).

- (2) Pencapaian pendidikan merupakan hal yang paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, karena perempuan tidak dapat mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik tanpa memperoleh pendidikan yang memadai.
- (3) Kesehatan dan kesejahteraan merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, fasilitas reproduksi, kesehatan, dan untuk mengemukakan integritas serta keselamatan fundamental seseorang.⁷²

Menurut Amartya Sen yang dikutip oleh Claros menyatakan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai lingkungan mereka dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya berhenti pada meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah.

b) *Access* (Akses)

Akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk memperoleh hak atau akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan

⁷²Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi, *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap*, *World Economic Forum*, 2005, Diakses dari situs : www.weforum.org. (diakses 29 Agustus 2019).

produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.

c) *Consientisation* (Konsientisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran gender dan peran jenis kelamin.

d) *Participation* (partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, keputusan, perencanaan dan administrasi. Partisipasi ini merujuk kepada keterwakilan perempuan yang setara dalam memformulasikan kebijakan dan dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal.⁷³ Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usahanya, misalnya dalam hal *home industri/industri rumah tangga*. Menurut Sulistiyani, ada lima langkah penting dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan yaitu :

- (1) Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan;
- (2) Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk;

⁷³*Ibid.*

- (3) Memberikan pemahaman kepada regulasi terkait legalitas dunia usaha;
- (4) Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal;
- (5) Membuat usaha mikro atau jaringan usaha mikro perempuan dan forum pelatihan usaha.⁷⁴

4) Bidang Dakwah

Dalam Al-Qur'an, banyak disebutkan tentang Perempuan. Peranan perempuan dalam masyarakat dan agama sangat besar sehingga ada kalangan *sahabiah* yang menjadi guru kepada para *tabi'in*. Bermula dengan Institusi keluarga, sehingga kepada masyarakat, perempuan telah menunjukkan bahwa kehadiran mereka sangat diperlukan dan peranan mereka tidak dapat dinafikan lagi untuk kebaikan umat Islam seluruhnya.⁷⁵

Berikut merupakan peran perempuan dalam dakwah Islam:

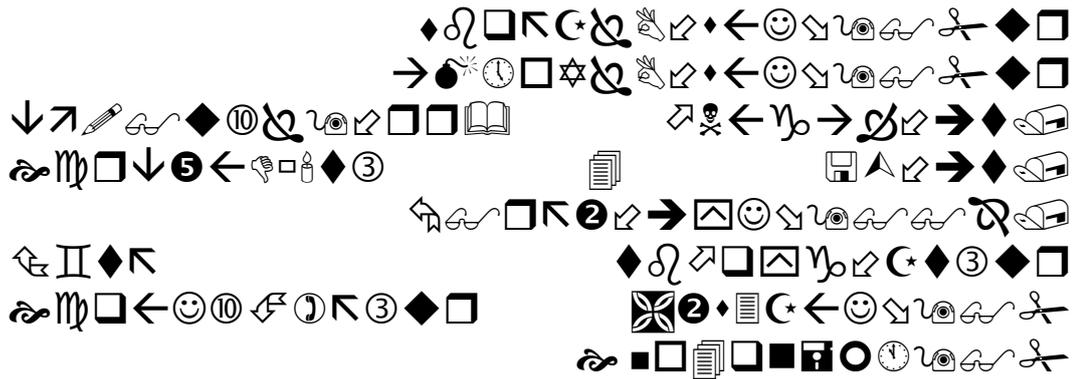
a) Sebagai Penolong Kaum Laki-laki

Tugas dan peranan perempuan dalam dakwah Islam menjadi penolong kaum laki-laki dalam semua aspek. Peranan perempuan sangat penting karena mereka adalah sebagian dari umat dan suara mereka diperlukan dalam memastikan misi dakwah tercapai. Seorang perempuan memiliki tugas yang sama

⁷⁴Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), h. 19.

⁷⁵Abu Muhammad Rasyid Ridha, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, (Solo : Pustaka Al-Alaq, 1995), h. 25.

pentingnya dengan laki-laki, diibaratkan seperti satu unsur yang penting dalam satu jamaah atau gerakan. Setiap apa yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan mempunyai tempat dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Ini jelas sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) perbuatan baik, mencegah dari yang mungkar dan mendirikan shalat”. (QS. At-Taubah [9] :71).

Muhammad ‘Izzah Darwazah juga berpendapat bahwa para Mukmin baik

laki-laki atau perempuan yang benar-benar ikhlas adalah menjadi penjamin yang saling menolong dalam setiap kebaikan dan kebenaran serta menyuruh kepada perkara *makruf* dan mencegah perkara-perkara mungkar. Kaum perempuan Mukmin diletakkan pada kedudukan ini adalah sebagai penguat dan bukti tentang sumbangan para perempuan Mukmin di zaman Nabi SAW dan keterlibatan mereka dalam berbagai situasi dalam bidang dakwah.⁷⁶

b) Sebagai Pentadbir Rumah Tangga Suaminya



⁷⁶ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadith Tartib Al-Suwar Hasbu Al-Nuzul*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1961), h. 495.

Artinya: “Dan ingatlah (serta amalkanlah) apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah (Al-Qur’an) dan hikmah pengetahuan (hadits-hadits Rasulullah)”. (Q.S. Al- Ahzab [33]: 34).

Tugas berdakwah yang meliputi semua aspek tidak hanya terhadap perkataan baik berupa nasihat, akan tetapi merangkum semua aspek dalam kehidupan seorang insan. Dalam ayat di atas, menekankan pentingnya perempuan menjalankan tugas utamanya di dalam rumahtangga. Dalam konteks ini, seorang perempuan hendaklah menjalankan peranannya dengan menyeru ke arah kebaikan yang berupa semua perkara yang membawa kebaikan dan manfaat kepada ahli rumahnya dalam perkara agama dan keduniaan. Perempuan juga harus memainkan peranannya yang aktif di rumah karena perempuanlah yang harus mengatur urusan rumahtangga dan menjaga apa pun yang ada di dalamnya.

c) Sebagai Seorang Isteri

Sebagai seorang isteri, peranan perempuan di samping suami tidak dapat disangkal lagi. Mereka hendaklah mengambil pendekatan dakwah dalam setiap tindak tanduk, perkataan dan sikap mereka. Tanggungjawab seorang isteri terhadap suami adalah merupakan hak suami kepada mereka.

(1) Memberi pertolongan keperluan zahir

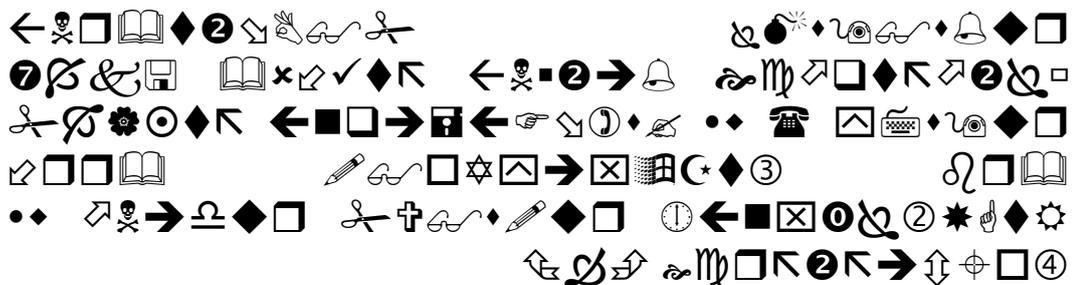


Artinya: “Dan hendaklah kamu tolong-menolong untuk kebajikan dan taqwa.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

Ayat di atas menggambarkan bahwa tugas utama isteri adalah menolong suaminya dalam perkara kebaikan dan takwa kepada Allah SWT. Antara peranan penting membawa kebaikan kepada suaminya ialah dengan memberi bantuan

kepadanya, baik dari segi zahir mahupun batin. Dari segi zahir ialah dengan mengurus segala keperluan suami untuk memudahkannya bergelanggang di tengah masyarakat seperti mengurus makan minumannya supaya kesehatannya terjaga, mengurus pakaian supaya sentiasa bersih dan mudah bergerak dan keperluan-keperluannya yang lain. Di samping itu, isteri juga harus berperan dalam mengurus soal-soal pribadi suami dan mengingatkannya kepada program-program yang penting.

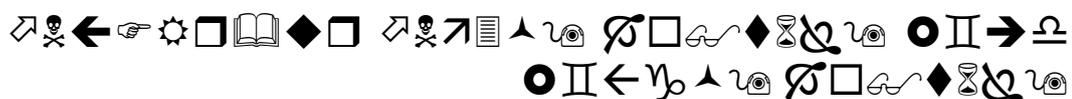
(2) Memberi pertolongan keperluan batin, dari segi pikiran dan rohani



Artinya: “Dan (ketika melihat anak-anak itu) berkatalah isteri Firaun: "(Semoga ia menjadi) cahaya mata bagiku dan bagimu; janganlah kamu membunuhnya; Mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak”. (Q.S. Al-Qasas [28]: 9).

Sumbangan yang tidak kurang pentingnya ialah dari segi rohani. Kekuatan kerohanian seorang perempuan akan banyak mempengaruhi suaminya. Perempuan yang senantiasa mengerjakan amal kebajikan dan lidahnya senantiasa basah dengan wirid akan dapat membantu kejayaan suaminya. Ini adalah karena untuk berjuang memerlukan kedua kekuatan yaitu kekuatan zahir dan kekuatan kerohanian.

(3) Pemberi semangat dan dorongan



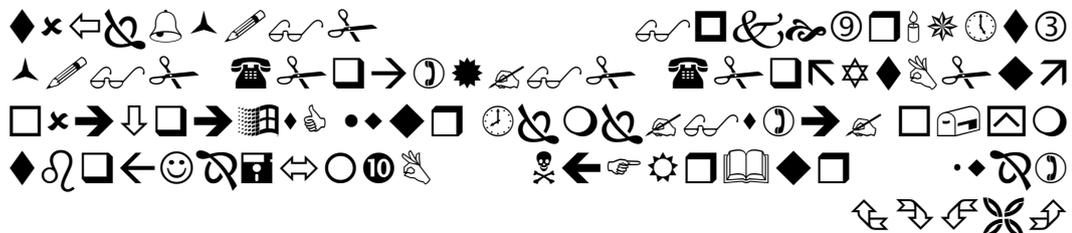
Artinya: “Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187).

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa antara suami isteri, mereka adalah pakaian kepada yang lain. Sifat pakaian ialah menutup dan melindungi, memberi kelegaan dan ketenangan serta penghalang dari segala bahaya. Dengan demikian, sifat seorang isteri yang sangat penting ialah memberi dorongan atau semangat bagi suaminya.

d) Sebagai Seorang Ibu

Seorang ibu memikul tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya yang merupakan amanah Allah kepada pasangan suami isteri. Para ibu memainkan peranan yang signifikan dalam membesarkan anak-anaknya.

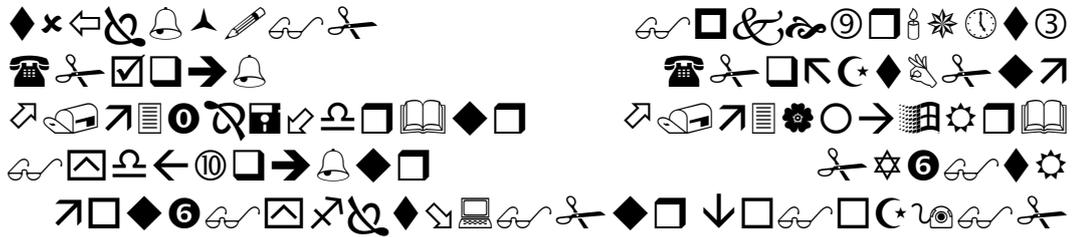
(1) Mengajar tauhid dan takwa



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa , Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam”. (QS. Ali-Imran [3]: 102).

Tugas memastikan Islam dan takwa kepada Allah SWT sebagai satu cara hidup adalah tugas setiap Muslim. Seorang ibu secara khususnya memikul tanggungjawab ini dan cukup jelas dari pada ayat di atas, tugas utama seorang ibu ialah mengajarkan anak-anaknya mengenal Allah sebenar-benarnya. Dalam diri anak-anak hendaklah juga ditanamkan sifat ketakwaan.

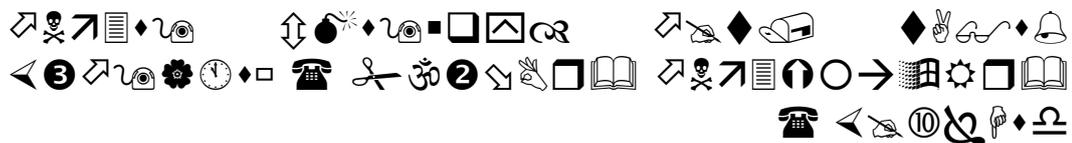
(2) Membimbing dan mengarahkan anak ke arah kebaikan.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (berhala). (QS. At-Tahrim [66] : 6).

Berdasarkan ayat di atas, maka jelaslah bahwa tanggungjawab seorang ibu yang sangat berat yaitu menjaga ahli keluarganya agar tidak terjerumus dalam api neraka. Selain itu, peranan ibu yang seterusnya ialah mendidik anak-anaknya agar kehidupan mereka dipimpin ke jalan yang benar. Adapun cara dalam mendidik anak ialah memelihara diri dan keluarga dari api neraka dengan cara memberi pelajaran dan pendidikan yang baik terhadap anak, membiasakan mereka berkelakuan dan berakhlak baik serta menunjukkan mereka jalan yang memberi manfaat.

(3) Mendidik mental dan emosi



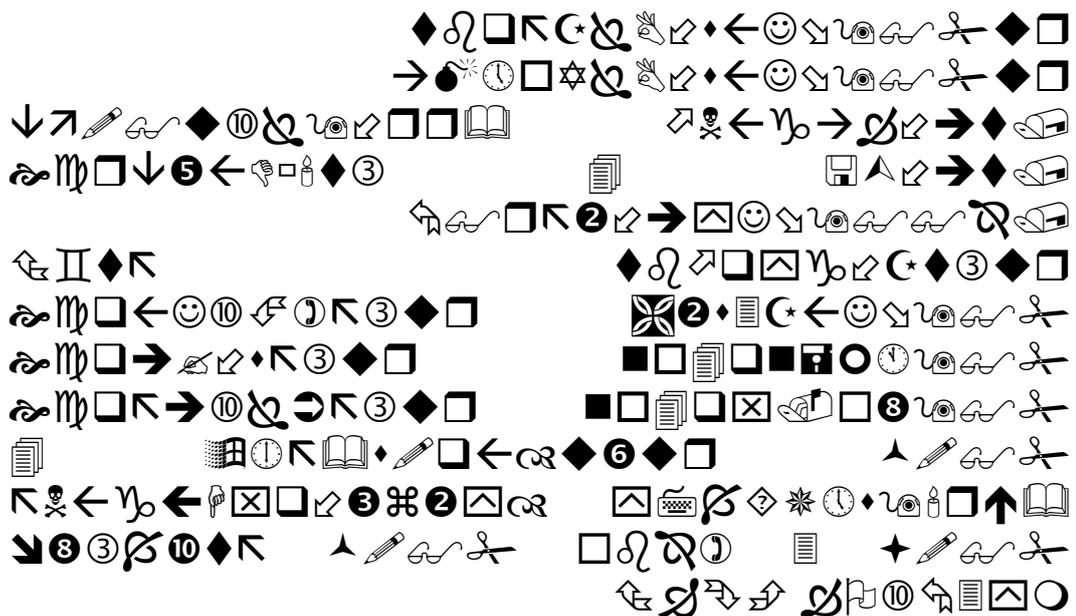
Artinya: “Bapak mereka berkata: "Tidak! Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya”. (Q.S. Yusuf [12]: 18).

Ayat di atas menjelaskan bagaimana pentingnya mendidik emosi yang wajar bagi orang tua untuk kebaikan seorang anak. Seorang ibu juga bertanggungjawab dalam menumbuhkan kembangkan emosi dan mental anak-

anaknyanya. Seharusnya seorang ibu yang baik menanamkan sifat-sifat *mahmudah* dan emosi yang baik dalam diri anak-anaknyanya di samping ilmu yang bermanfaat.

5) Bidang Politik

Perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan sosial-politik. Hal ini dapat disarikan dari QS. At-Taubah [9]:71:



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah [9]: 71).

Secara umum ayat tersebut dipahami sebagai adanya kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan untuk *beramar ma'ruf nahi munkar*, tentunya termasuk di bidang politik. Menurut Al-Khulli⁷⁷, kata *awliya'* dalam ayat tersebut mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan makna *ya'muruna bil ma'ruf* meliputi segala kebaikan atau perbaikan

⁷⁷Amin Al-Khuli, “Al-Mar’at bayna al-Bayt wa Muiatama” dalam *Al-Mar’at Al-Muslimah fi al-‘Ashr al-Mu’ashir* (Baghdad: t.p., t.t), h. 13.

kehidupan, termasuk memberi nasihat dan kritik kepada penguasa. Oleh karena itu, setiap perempuan dan laki-laki dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu memberi kritik dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang politik.

Tidak ditemukan dalam bidang politik, satu ketentuan agama apapun yang melarang keikutsertaan perempuan atau yang membatasi masalah politik hanyalah untuk kaum laki-laki saja, akan tetapi perempuan pun mempunyai hak yang sama yaitu hak memiliki ilmu dan keikutsertaan dalam bidang politik serta Islam menjamin pentingnya peranan perempuan di tengah masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan merupakan sarana yang penting dalam memantik sebuah kemajuan peradaban.⁷⁸ Disamping itu, seorang perempuan khususnya Muslim harus memposisikan politik dalam koridornya yang boleh dijalankan dalam Islam yaitu peranan politik langsung maupun tidak langsung. Peran politik langsung yaitu sebagai anggota Majelis Ummat yang mengoreksi dan menasihati penguasa. Sedangkan peran politik tidak langsung dapat dilakukan dengan menjadi isteri, dan anak yang memberi koreksi atau nasihat pada suami atau ayah. Hal yang perlu diperhatikan jika melakukan peranan politik langsung maupun tidak langsung, jangan sampai melupakan fitrah sebagai isteri yang baik bagi suaminya dan ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Di sisi lain, Al-Qur'an memerintahkan umatnya, perempuan dan laki-laki, untuk bermusyawarah (QS. As-Shura [26] :38) dalam pengelolaan kehidupan

⁷⁸Aprijon Efendi, *Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muwazah, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.

bersama. Pada masa Rasulullah ada perempuan yang melakukan *bai'at* kepada beliau (QS. Al-Mumtahanah [60] :12) untuk menunjukkan bahwa perempuan mempunyai pilihan yang bebas dan dalam menentukan hak-haknya di bidang politik.

Diantara penulis Islam dan ulama terjadi perbedaan pendapat ketika dihadapkan pada masalah kepemimpinan perempuan di bidang politik. Misalnya Al-Siba'i di satu sisi menyatakan bahwa di bidang politik, Islam memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki, namun di sisi lain menolak secara tegas keterlibatan perempuan di bidang politik dengan alasan historis dan kemudharatan.⁷⁹

Al-Siba'i, secara historis membantah beberapa peristiwa yang dianggap sebagai dasar adanya keterlibatan perempuan di bidang politik misalnya peristiwa *bay'at al-nisa* yang terdapat dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]:12, keterlibatan perempuan dalam peperangan di zaman Rasulullah. Begitu juga peristiwa keterlibatan Aisyah dalam memimpin Perang Jamal melawan Ali dianggap bukan sebagai fakta keterlibatan perempuan di bidang politik. Sebab menurutnya, Aisyah belakangan menyesali perbuatannya tersebut.⁸⁰

Sedangkan alasan kemudharatan berkaitan dengan tugas mulia lain yang menunggu perempuan, yaitu kesejahteraan rumah tangga, kemungkinan terjadinya pergaulan bebas jika perempuan terlibat di bidang politik, terlantarnya anak-anak, termasuk juga karena perempuan dianggap terlalu emosional, keibuan dan

⁷⁹Masturin, *Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam*,, h. 358.

⁸⁰*Ibid.*

kendala-kendala biologis (haid, hamil). Semuanya itu menunjukkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.⁸¹

Muhammad Al-Ghazali lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan ini, dan secara umum, beliau setuju keterlibatan perempuan di bidang politik karena Islam memberikan haknya kepada mereka, meskipun secara pribadi beliau tidak setuju perempuan terjun di bidang politik.⁸²

Pendapat Muhammad Al-Ghazali didasarkan pada keumuman Q.S. Ali Imran [3] :195 dan An-Nahl [16] :97. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Ibn Hazm, termasuk juga dalam menyanggah pendapat dari kalangan umat Islam (beliau tidak menyebut nama) yang menyatakan perempuan tidak boleh memimpin laki-laki di bidang apapun (politik) karena berdasarkan pada (QS. Al-Nisa [4] :34). Menurut Al-Ghazali, QS. An-Nisa [4] :34 tersebut bersifat khusus yaitu kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan tidak berlaku di bidang politik dan sektor publik lainnya. Bagi Al-Ghazali yang paling penting adalah kemampuan seseorang di kalangan umat untuk menjadi pemimpin di bidang publik atau politik, bukan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin.

Persoalan lanjutan yang muncul kemudian adalah apakah perempuan itu berhak untuk menduduki jabatan tertinggi negara (kepala negara). Ibn Hazm yang dikutip oleh Al-Ghazali menyatakan bahwa perempuan boleh menduduki jabatan politik apa saja, kecuali sebagai kepala negara. Pendapatnya ini didasarkan atas hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Bakrah, yang artinya: “Barang siapa

⁸¹*Ibid.*

⁸²Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadits Nabi*, Terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1991), h. 64.

menyerahkan kekuasaan (*mulk*) kepada seorang perempuan, mereka tidak akan pernah sejahtera”. Sedangkan Al-Ghazali sendiri lebih bersikap kritis terhadap hadits tersebut. Di antaranya, ia mengisyaratkan bahwa hadits tersebut sebenarnya ucapan Nabi yang bersifat khusus ditujukan kepada Ratu Persia yang ketika itu menghadapi kehancuran akibat kebobrokan sistem monarkhi dan totaliter sebelumnya. Hadits tersebut olehnya dianggap tidak sesuai dengan fakta historis, karena banyak juga negara yang dipimpin perempuan justru sangat maju.⁸³

Hadits tersebut juga disikapi secara kritis oleh Fatima Mernissi dan menganggapnya sebagai hadits misogini.⁸⁴ Setelah melakukan evaluasi kritis dari konteks historis dan metodologis (terutama kritik sanad/perawi Abu Bakrah) akhirnya ia sependapat dengan At-Tabari, yaitu menentang pemakaian hadits tersebut dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan dalam pucuk pimpinan Negara. Oleh karena itu menurutnya, perempuan berhak atas jabatan politik tersebut sejauh kualitasnya memungkinkan.

e. Peran Perempuan dalam Perspektif Kesetaraan Gender

1) Pengertian Gender

Gender dalam kamus bahasa Inggris berarti “jenis kelamin atau seks”.⁸⁵ Gender dalam ejaan bahasa Indonesia adalah jender. Sedangkan istilah gender menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* diartikan sebagai

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radiawati (Bandung: Pustaka, 1986), h. 62-78.

⁸⁵John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet XII, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265.

“penggolongan menurut jenis kelamin”.⁸⁶ Adapun dalam *Webster College Dictionary*, gender: “ *One of the categories in such a set, as masculine, feminine, neuter, or common*”.⁸⁷

Menurut *Ensiklopedia Feminisme* dijelaskan bahwa gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan.⁸⁸ Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁸⁹

Senada dengan hal tersebut, menurut Hilary M. Lips dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu *sex & Gender: An Introduction* yang dikutip oleh Nasaruddin Umar, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁹⁰ Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis yaitu Linda L. Lindsey yang dikutip oleh Nasaruddin Umar, yaitu menganggap semua ketepatan masyarakat tentang penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender.⁹¹

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan

⁸⁶Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1996), h. 771.

⁸⁷Random House, *Webster College Dictionary*, (New York Toronto London Sydney Auckland, 2001), h. 511.

⁸⁸Hellen Tierney (ed), *Women’s Studies Encyclopedia*, (New York: Green Word Press), h. 153.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur’an (Seri Disertasi)*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 34.

⁹¹*Ibid.*

laki-laki dengan perempuan ditinjau dari segi sosial-budaya. Jadi, gender di sini dipandang sebagai laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.

Sebelum memahami tentang teori kesetaraan gender, Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa seks dengan gender itu berbeda. Seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender lebih berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Gender ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender menjelaskan semua atribut, peran dan kegiatan yang terkait dengan “menjadi laki-laki” atau “menjadi perempuan”.⁹² Jadi gender dan seks atau jenis kelamin sangat berbeda sekali, karena seks atau jenis kelamin bersifat alamiah, sedangkan gender peran dan fungsinya dibentuk oleh keadaan masyarakat, sosial dan budaya.

Munculnya peran laki-laki dan perempuan dapat saling berganti. Dalam arti, perempuan tidak hanya berperan dalam ruang domestik, melainkan juga berperan dalam ruang publik. Begitupun sebaliknya laki-laki bukan hanya berperan dalam ruang publik, tetapi juga berperan dalam ruang domestik. Jadi, keduanya sama-sama memiliki peran domestik maupun peran publik.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata yang sepadan dengan istilah gender, akan tetapi kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayat-ayat

⁹²Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 62.

gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan seperti kata *Al-rijal* () dan *An-nisa'* (), *Alzakar* () dan *Al-untsa* (). Dalam mengungkapkan masalah tertentu, Al-Qur'an konsisten memakai istilah-istilah khusus. Seperti aspek biologis Al-Qur'an sering menggunakan istilah *al-dzakar/male* untuk laki-laki dan *al-untsa/female* untuk perempuan. Sementara dalam aspek gender, Al-Qur'an sering menggunakan istilah *Al-rojul/ Al-rijal* untuk menyebut jenis kelamin laki-laki dan *Al-mar'ah/An-nisa* untuk menyebut jenis kelamin perempuan.

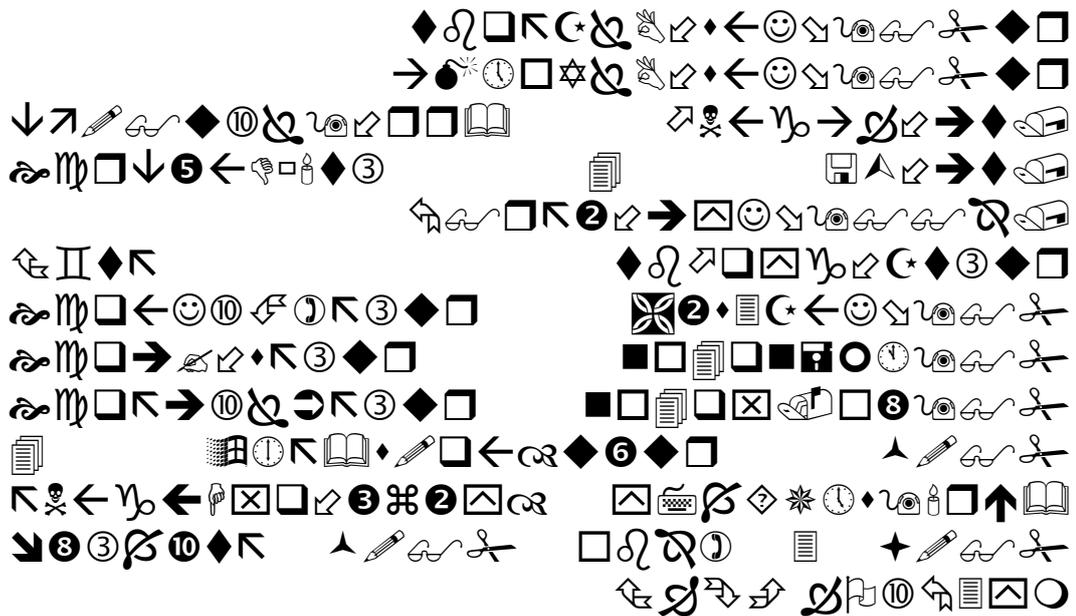
Berikut merupakan perbedaan antara seks dengan gender:

No	Karakteristik	Seks	Gender
1.	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2.	Visi, misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3.	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4.	Sifat	Kodrat, tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak.	Terciptanya norma-norma/ketentuan tentang "pantas" atau tidak pantas" laki-laki pantas menjadi pemimpin, perempuan pantas dipimpin dan lain-lain, yang sering merugikan salah satu kebetulan adalah perempuan.
6.	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas.	Dapat berubah, musiman dan berbeda antarkelas

Tabel 2: Perbedaan Seks dan Gender⁹³

⁹³Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: Umm Press. 2006), h. 6.

Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan, misalnya dalam aspek biologis, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an berikut:



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah [9]:71).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya melakukan kerja sama dalam *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Maka sesuai dengan ayat itu, Islam tidak memisahkan antara kerja di dalam ranah publik dan ranah domestik.⁹⁴ Al-Qur'an sebagai dasar utama dalam agama Islam, dipakai dasar rujukan seluruh kaum Muslim dalam memperoleh petunjuk bimbingan, dan

⁹⁴Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender*,, h. 3.

berkewajiban untuk mengamalkannya. Namun Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan ilmu-ilmu bantu di dalam memahaminya. Di antara ilmu bantu tersebut adalah tafsir.

Di samping itu, Kitab Al-Qur'an sering kali menggunakan bahasa simbolik (*majazi*) yang memungkinkan menerima makna lebih dari satu macam, yang mungkin tidak berlaku sepanjang zaman. Bahasa simbolik ini perlu diinterpretasikan secara kreatif agar sesuai dengan konteks perkembangan zaman, termasuk didalamnya penafsiran ayat-ayat gender.

Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini dikemukakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjustifikasi dan menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam berkiprah dalam masyarakat.⁹⁵ Di samping itu, ayat-ayat berikut juga dikatakan sebagai variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an.⁹⁶ Lihat QS. Al-Hujurat: [49]: 13:

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: [49]: 13).

Kemudian dalam QS. An-Nahl [16]: 97:

⁹⁵Agustin Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam*, Gender Equality: *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

⁹⁶Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 247.

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl [16]: 97).

Selanjutnya dalam QS. At-Taubah [9] 71:

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9] 71).

Berdasarkan keterangan ketiga ayat di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Islam mengangkat derajat seorang perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk melebihkan seseorang atau satu kelompok dari yang lainnya, amalan atau nilai ibadah seseorang tidak akan dikurangi hanya karena ia seorang perempuan. Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara di mata Allah, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah SWT.

Dengan demikian, terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala secara

sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antara mereka. Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lainnya adalah kawan, dan keduanya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah.

2) Kesetaraan Gender

Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang.⁹⁷ Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.⁹⁸

Menurut Riant Nugroho, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (HANKAMNAS) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.⁹⁹

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki (APKM) akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Memiliki akses dan partisipasi berarti

⁹⁷Waryono Abdul G. dan Muh. Isnanto (*eds*), *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jogjakarta, PSW UIN SUKA dan IISEP, 2004), h. 8.

⁹⁸Narasudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, h.75.

⁹⁹Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 29.

memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.¹⁰⁰ Kebijakan pemerintah tentang gender harus disosialisasikan pada aspek pembangunan misalkan pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

Prinsip Al-Qur'an tentang kesetaraan gender terbukti berdasarkan pada dua kenyataan;¹⁰¹ *Pertama*, Al-Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menerapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya; artinya, Al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu. *Kedua*, Al-Qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mempunyai fungsi penjagaan yang sama dan dapat mencapai individualitas moral.

3) Indikator Kesetaraan Gender

Terciptanya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya sebuah diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki, sehingga mereka mempunyai kesamaan dalam akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Berikut merupakan indikator kesetaraan gender:

a) Akses

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2003), h. 250.

Akses merupakan kesempatan atau peluang untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya yang produktif di dalam lingkungan tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi guru adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk guru perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.

b) Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya serta dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini guru perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.

c) Kontrol

Kontrol merupakan sebuah wewenang atau penguasaan dan kekuatan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

d) Manfaat

Manfaat merupakan kegunaan yang bisa dinikmati secara optimal, dimana laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pembangunan atau

pemanfaatan sumber daya secara setara dan bersama. Contoh Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.¹⁰²

Senada dengan hal tersebut, menurut Gunawan Sumodiningrat yang dikutip oleh Riant Nugroho mengatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan gender perlu memperhatikan tiga langkah sebagai berikut:

- (1) Pemihakan, yaitu perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki;
- (2) Penyiapan, yaitu pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan mengambil manfaat;
- (3) Perlindungan, yaitu memberikan proteksi sampai dapat dilepas.¹⁰³

4) Program Pemberdayaan Perempuan

Program pemberdayaan perempuan harus segera dilakukan dengan serentak, berkesinambungan dan melibatkan semua elemen masyarakat. Upaya pemberdayaan perempuan juga harus dilakukan secara nyata, tidak hanya bersifat slogan dan berhenti pada tingkat wacana. Berikut merupakan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kemampuan perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipan aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini;

¹⁰²Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*,, h. xxi.

¹⁰³ *Ibid.*

- b) Meningkatkan kemampuan perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c) Meningkatkan perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil dan besar serta membuka peluang kerja;
- d) Meningkatkan fungsi dan peran organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif pada wilayah tempat tinggalnya dalam program pembangunan.¹⁰⁴

Untuk mewujudkan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, terdapat beberapa program yang ditawarkan. Berbagai paket kegiatan yang ditawarkan dalam program-program tersebut sebagai berikut:

- a) Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Misalnya kelompok PKK, kelompok sosial keagamaan, koperasi, dan yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga, agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol;
- b) Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan, dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting mengingat selama ini program pembangunan, kurang disosialisasikanya dan kurang melibatkan peran masyarakat:

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 164.

- c) Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d) Peningkatan kepemimpinan perempuan, agar dapat mempunyai posisi yang setara, memiliki akses dan peluang dalam pembangunan;
- e) Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti: kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.¹⁰⁵

Dari berbagai kegiatan maupun program-program tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring program pembangunan sangat diperlukan. Agar perempuan dapat berperan dalam pembangunan, maka perempuan membutuhkan ketrampilan, pengetahuan, maupun kekuasaan agar memiliki daya tawar sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Program pemberdayaan perempuan juga harus melibatkan organisasi, lembaga, maupun kelompok sosial di masyarakat sehingga program dapat berjalan lebih efektif.

f. Berbagai Hambatan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

¹⁰⁵*Ibid*, h. 165.

Hambatan pemberdayaan Perempuan di Indonesia secara garis besar dilatarbelakangi oleh dua sisi yaitu kerancuan memahami akar masalah dan dihadap oleh pemikiran-pemikiran keagamaan.¹⁰⁶

1) Kerancuan Memahami Akar Masalah

Kaum feminis memandang terdapat kerancuan bahkan kekeliruan pandangan atau pemahaman masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Pada umumnya orang menganggap perempuan emosional, sedangkan laki-laki rasional; perempuan sebagai makhluk yang lemah, sedangkan laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat; perempuan cenderung halus, sedangkan laki-laki kasar; dan seterusnya. Berbagai perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat, pemberian Tuhan atau sudah dari sananya. Oleh karena itu, ia tidak dapat diubah dan bersifat tetap. Perubahan atau mengubah hal itu dianggap menentang ketentuan Tuhan atau menyalahi kodrat. Berbagai gambaran tentang laki-laki dan perempuan ini berakar dalam kebudayaan masyarakat. Menurut pandangan kaum feminis, sifat-sifat tersebut merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara budaya dan sosial, dengan arti lain dibuat oleh manusia itu sendiri dan bukan oleh keputusan Tuhan.¹⁰⁷

Fakta-fakta sosial menunjukkan secara jelas bahwa sifat-sifat tersebut dapat berganti atau dipertukarkan atau berubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Inilah yang oleh mereka disebut sebagai perbedaan gender. Atas dasar ini, sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan dibuat oleh manusia, maka ada kemungkinan bagi

¹⁰⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 49.

¹⁰⁷*Ibid.*

manusia untuk mengubah atau mempertukarkannya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dengan pemahaman seperti itu, orang boleh jadi akan secara apriori menyimpulkan bahwa akan terjadi pembalikan peran antara laki-laki dan perempuan. Kalau demikian masalahnya, maka pastilah dunia akan kiamat, katanya. Akan tetapi, kaum feminis menolak anggapan seperti itu. Dengan menggugat ideologi patriarki, tidak lantas berarti harus menerapkan ideologi matriarki. Mereka sebenarnya justru ingin mewujudkan pola hubungan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi. Mansour Fakih, misalnya secara jelas menyatakan bahwa perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah, sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, faktanya perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan.¹⁰⁸

Ketidakadilan gender adalah struktur atau sistem sosial yang memosisikan kaum laki-laki atau perempuan sebagai korban. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam proses pemiskinan ekonomi, bentuk marginalisasi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pengambilan atau pembuatan keputusan politik, diskriminasi, stereotip, dan kekerasan. Dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul berbagai pandangan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Perempuan berhak mempunyai akses sepenuhnya untuk berpartisipasi di bidang sosial, ekonomi, politik, dan intelektual serta dapat dihargai sebagaimana kaum laki-laki. Sebaliknya, kaum

¹⁰⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 12-13.

laki-laki juga dapat ikut merawat anak-anak mereka dan berpartisipasi penuh di rumah.

2) Dihadang oleh Pikiran-pikiran Keagamaan

Penelitian terhadap sumber-sumber otoritas pemikiran keagamaan menyimpulkan bahwa pengertian tentang adanya perbedaan antara seks dan gender benar-benar belum dapat diterima sepenuhnya. Sejumlah besar ulama tetap memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi superioritas atas perempuan. Laki-laki lebih unggul daripada kaum perempuan.¹⁰⁹ Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Al-Qur'an berikut:



Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah manafkahkan sebagian dari harta mereka...”. (QS. An-Nisa [4]: 34).

Pemikir muslim paling liberal dengan sejumlah keahlian yaitu Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul daripada perempuan. Keunggulan tersebut meliputi akal, semangat, ketegasan, keperkasaan, dan ketangkasan atau keberanian. Oleh karena itu, kenabian,

¹⁰⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 52-53.

keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik, dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki.¹¹⁰

Fakhruddin Ar-Razi, pemikir besar Sunni, mempercayai superioritas laki-laki atas perempuan dengan sejumlah alasan yaitu kemampuan dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih luas daripada perempuan dan kemampuan laki-laki untuk melakukan kerja keras lebih prima daripada perempuan dan ini semua merupakan sifat-sifat yang hakiki.¹¹¹

Menurut Ibnu Katsir, pemikir Islam terkemuka, bahwa laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, hakimnya, pembesarnya, dan pendidiknya. Oleh karena itu secara inheren, laki-laki memang lebih baik dan lebih utama daripada perempuan. Jadi disinilah persoalannya mengapa kenabian dan kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepada laki-laki.¹¹²

Menurut Muhammad Abduh, seorang pemikir Islam kontemporer terkemuka, dan Muhammad Rasyid Ridha, yaitu muridnya juga mengikuti pikiran yang sama dengan para pendahulunya. Menurutnya, ini adalah fitrah yaitu Allah SWT telah memberikan kepada laki-laki kekuatan yang tidak diberikan kepada perempuan. Adapun kelebihan lainnya yaitu karena laki-laki diberi beban memberikan nafkah kepada perempuan. Hal ini bersifat kasbi atau usaha manusia, dan hal inipun bersifat gender.¹¹³

¹¹⁰Abdul Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshyari, *Al-Kasysyaf'an Haqa'id al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi, tt), Juz I, h. 532.

¹¹¹Fakhruddin ar-Razy, *Al-Tafsir Al-Kabir*, (Tehran: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), Juz X, h.88.

¹¹²Imaduddin Isma'il Bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Surabaya: Syirkat Al-Nur Asiya, Tt), Juz I, h. 491.

¹¹³Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Manar*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1973), Juz V, h. 67-68.

Menurut Muhammad Thahir Bin Asyur, pemikir dengan predikat Al-‘Allamah, Al-Imam-Asy-Syekh dan berpikiran modern juga menganut pandangan yang sama dengan para ulama sebelumnya. Laki-laki memimpin perempuan karena beberapa hal, yaitu laki-laki berfungsi memberikan pengamanan atau perlindungan, berusaha dan menghasilkan uang. Keunggulan atau kelebihan itu disebabkan oleh berbagai faktor atau berbagai keistimewaan yang bersifat istingtif, yang perempuan sendiri memang membutuhkan pengamanan dan perlindungan dari laki-laki agar tetap bisa eksis.

Menurut Ibnu Asyur, berbagai keistimewaan ini telah terbukti sepanjang sejarah kemanusiaan. Apabila kita menyatakan bahwa laki-laki diposisikan sebagai pemimpin kaum perempuan merupakan argumen demonstratif. Kebutuhan perempuan disini tetap berlangsung sepanjang masa, meskipun sekali waktu melemah, fluktuatif, dan pada saat yang lain menguat.

Muhammad Husain Ath-Thabathaba’i, seorang pemikir kontemporer Syi’ah moderat juga menyatakan dengan penuh keyakinan terhadap superioritas laki-laki atas perempuan, bahwa:

“Ini sesuatu yang alamiah, katanya. Keunggulan itu menyangkut potensi reflektif. Dari kelebihan ini selanjutnya memunculkan sifat-sifat keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan hidup. Sementara, perempuan lebih sensitif dan emosional, karena ia lembut dan halus”¹¹⁴.

Menurut Imam Malik Bin Anas, Imam Syafi’i, Imam Ahmad Bin Hambal, dan Al-Mawardi, yang merupakan tokoh-tokoh utama yang pemikirannya menjadi panutan kaum Muslimin di seluruh dunia, ketika membicarakan tentang persoalan

¹¹⁴Muhammad Husain Ath-Thabathaba’i, *Tafsir Al-Mizan*, (Beirut: Mu’assanah Al-A’lami li al-Mathbu’at, 1911), Juz IV, h. 351.

kekuasaan kehakiman dalam wilayah publik mereka mempersyaratkan jenis kelamin laki-laki untuk jabatan ini. Hal ini dikarenakan dalam kekuasaan kehakiman diperlukan kecerdasan pikiran yang prima dan kriteria tersebut hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara, tingkat intelektualitas dan kecerdasan perempuan menurut pandangan mereka berada dibawah kecerdasan laki-laki.¹¹⁵

Demikianlah kita melihat bahwa berbagai pikiran keagamaan yang diwakili oleh para pemikir besar kaum Muslimin memperlihatkan pandangan yang sama tentang persoalan gender. Berbagai pikiran ini jelas semakin memperkuat budaya patriarki. Perjuangan kaum perempuan untuk aktualisasi dan pemberdayaan dirinya masih menghadapi berbagai sergapan dari berbagai arah. Akan tetapi, mereka bisa berharap bahwa berbagai pikiran tersebut justru merupakan refleksi dari budaya masyarakatnya yang juga patriarki.

B. Pemberdayaan Masyarakat Islam

1. Pengertian, Landasan dan Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Islam

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam

Menurut M. Quraish Shihab, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam merupakan konsep pembangunan yang bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam kedalam diri manusia, dengan demikian ajaran tersebut dapat

¹¹⁵Al-Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, Tt), Juz IV, h. 375.

membangun manusia seutuhnya, baik dari segi spiritual, maupun material secara bersama.¹¹⁶ Pemberdayaan bersifat universal dalam membangun kehidupan manusia menciptakan situasi berkembang, berdaya dan mandiri yang mengarah kepada pembangunan yang dilakukan tidak dari satu sisi kehidupan, sehingga antara upaya pemberdayaan yang satu bersinergi dengan yang lain. Begitupun halnya antara dakwah dengan pemberdayaan masyarakat mempunyai keterkaitan yang sangat signifikan bahkan secara terperinci dapat dikatakan bahwa dakwah sebenarnya adalah proses pemberdayaan masyarakat.

Dakwah bermakna perubahan dan sebuah proses yang berkesinambungan sebagai prinsip dasar *equilibrium* dalam kehidupan sosial masyarakat yang secara alamiah terdiri dari klasifikasi kelas atas dan kelas bawah. Sebagai masyarakat yang mengalami kehidupan terasing, kelas bawah menjadi sasaran utama dakwah untuk memberdayakannya menjadi manusia yang seutuhnya dengan tidak menafikan masyarakat yang berada di kelas atas. Oleh karena itu, dakwah sebenarnya merupakan pemberdayaan masyarakat karena berhubungan dengan proses dimana seseorang bisa berpikir bebas dan bertindak atas dasar kematangan berpikir dan sanggup melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain yang dalam istilah *Kant* disebut sebagai proses mengangkat derajat, sebagai pencerahan, dan menyelamatkan masyarakat yang kehilangan jati dirinya.¹¹⁷

Penerjemahan arti dakwah sebagai sebuah pemberdayaan tidak terlepas dari tiga dimensi dakwah yaitu makro, mezo, dan mikro. Tingkatan makro berupa hidayah yang muatannya masih orisinal atau murni berupa Al-Qur'an dan Sunnah.

¹¹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2004), cet. Ke-18, h. 301.

¹¹⁷ *Ibid.*

Tingkatan mezo merupakan integral tingkatan makro seagai hasil penelaahan secara seksama dari apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah berupa metodologi yaitu teori, konsep, dan kebijakan-kebijakan. Sedangkan tingkatan mikro berupa aktivitas, tindakan, program kegiatan dan sebagainya yang berupa kerja nyata.¹¹⁸

Disamping itu, istilah pemberdayaan secara leksikal dapat diartikan sebagai penguatan sedangkan secara istilah pemberdayaan disamakan dengan istilah pengembangan.¹¹⁹ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i memberikan pengertian pemberdayaan sebagai berikut:

“Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan istilah asing *empowerment*. Secara leksikal pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan pengembangan, bahkan pengertian dua istilah ini dalam konteks tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.¹²⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, Nanih memberikan penjelasan bahwa terkadang kata “pemberdayaan” dengan “pengembangan” dapat disamakan pemakaiannya dalam suatu kondisi atau konteks dan dapat juga saling dipertukarkan dalam konteks waktu yang lain, sehingga pemberdayaan dan pengembangan bisa saja mempunyai makna yang sama.

Pengertian lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amrullah Ahmad yang dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i mengatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam menurut perspektif Islam, merupakan suatu tindakan nyata untuk memecahkan masalah *ummah* baik dalam bidang

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid*

ekonomi, sosial dan lingkungan yang dalam pengembangan masyarakat Islam disebut sebagai model empiris pengembangan perilaku secara individu maupun kolektif dalam dimensi karya terbaik atau amal shaleh.¹²¹ Lebih lanjut Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i mengatakan bahwa sasaran dari pemberdayaan masyarakat Islam meliputi tiga sasaran yaitu: 1) sasaran individual yaitu setiap individu Muslim dengan orientasinya sumber daya manusia (SDM), 2) sasaran komunal yaitu komunitas atau kelompok Muslim, dengan orientasinya pengembangan sistem masyarakat, dan 3) sasaran institusional yaitu pranata kehidupan sosial dan organisasi Islam, dengan orientasinya Islamitas sebuah kelembagaan dan pengembangan kualitas.

Dinamika dan proses dakwah itu sendiri dalam mencapai kebahagiaan dan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Keunggulan pemberdayaan masyarakat Islam dalam konteks dakwah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi intelektual, sosial, religius, ekonomi, budaya, dan lingkungan sehingga masyarakat diharapkan benar-benar memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan berdaya. Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia atau sumber daya manusia yang baik, mandiri, dapat membuat banyak pilihan dalam kehidupan dan memilih pilihan terbaik untuk kualitas hidupnya.

b. Landasan Pemberdayaan Masyarakat Islam

¹²¹ *Ibid.*

Menurut Yakob Napu, dkk., terdapat tiga sudut pandang yang menjadi landasan pemberdayaan masyarakat¹²² yaitu: **Pertama**, landasan normatif yaitu bagaimana agama memandang pengembangan masyarakat. **Kedua**, landasan filosofis yaitu bagaimana seharusnya pengembangan masyarakat. **Ketiga**, Landasan teoritis yaitu bagaimana teori itu dapat diaplikasikan dalam pengembangan masyarakat.¹²³

1) Landasan Normatif

Walaupun Al-Qur'an dan Hadits ditolak oleh sebagian orang dan tidak dapat dipakai sebagai landasan karya ilmiah karena kebenarannya yang normatif, artinya hanya sebagian orang saja yang memandang benar yakni orang Islam saja. Namun harus diingat bahwa pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada peningkatan kesejahteraan atau mengarah kepada perubahan dan perbaikan hidup telah ada sejak lama dengan tokoh pembaharunya adalah Rasulullah SAW. berikut merupakan pokok-pokok pengembangan masyarakat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW:

Pertama, perubahan dimulai dari diri sendiri. Hal ini sesuai dengan Q.S. Ar-ra'du [13] ayat 11:



Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.... (Q.S Ar-ra'du [13]: 11).

¹²²Yakob Napu, dkk., *Pengembangan Masyarakat: Manusia Satu Sama Lain Saling Mendidik dengan Perantara Dunia*, (Gorontalo: Andraggika Press, 2009), h. 15-16.

¹²³*Ibid.*

Ayat tersebut merupakan prinsip dasar pengembangan masyarakat atau setiap perubahan, yaitu dimulai dari diri sendiri dan merupakan dasar seluruh bangunan. Apabila batu batanya rusak, atau tidak kokoh, maka bangunan tersebut tidak mungkin akan kokoh dan aman.

Untuk membentuk manusia atau Muslim yang utuh, harus mengerahkan seluruh potensi dan pendidikan yang menyeluruh seperti tidak mengajarkan sikap pasrah terhadap takdir harus diutamakan daripada usaha yang lain. Oleh karena itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi pengembang masyarakat untuk membangun manusianya terlebih dahulu sebelum membangun infrastrukturnya. Selain itu juga, tugas pengembang masyarakat yaitu mendampingi masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapinya dan tidak merubah masyarakat karena masyarakat tidak dapat dirubah kecuali oleh dirinya sendiri.

Kedua, perubahan merupakan anugerah menuju perbaikan hidup.¹²⁴ Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah hadits berikut:

*Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia adalah orang yang beruntung, sedangkan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin atau lebih jelek dari hari kemarin maka dia termasuk orang yang rugi.*¹²⁵

Hadits ini menunjukkan pada arah perubahan yang jelas yakni perbaikan hidup yang lebih positif, dari masyarakat yang bergantung menjadi masyarakat yang mandiri, dari masyarakat yang pasif menjadi masyarakat yang aktif, dari masyarakat yang pasrah pada nasib menjadi masyarakat yang maju dan

¹²⁴*Ibid.*, h. 17.

¹²⁵Mahmud Ath-Thahan, *Tafsir Musthalah Al-Hadis*, (Bogor: Pustaka Thanqul Izzah, 2006), h. 19.

sebagainya. Selain itu, pengembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai perbaikan hidup yang lebih baik, meningkatkan harkat dan martabat serta kuantitas sumber daya masyarakat yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta berakhlak mulia.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, dalam memahami kata “beruntung” dapat diartikan masyarakat yang beruntung yaitu masyarakat yang maju, mandiri, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yaitu masyarakat yang terpenuhi pangan, sandang dan papan, terjamin keamanan dan kesehatan serta tenang dalam menjalankan kehidupan beragama.

Ketiga, perubahan itu membutuhkan waktu.¹²⁶ Untuk mencapai tujuan utama pengembangan masyarakat yaitu meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang serta berbagai tahapan menyadarkan masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki dan kebutuhannya.

Allah SWT telah mengajarkan perubahan secara bertahap, seperti merubah kebiasaan masyarakat Arab ketika itu yang selalu mengonsumsi minuman keras atau khamar pada setiap pesta besar. Mula-mula khamar tidak dilarang (Q.S. Al-Baqarah [2]: 21, setelah itu penggunaannya dibatasi (Q.S. An-Nisa [4]: 43 dan pada akhirnya secara total khamar dilarang (Q.S. Ali-Imran [3]: 90).

Keempat, “musyawarah” sebagai cara dalam mencapai arah perubahan. Sebagaimana pada QS. As-Sajadah [32]: 159 Allah SWT berfirman:

¹²⁶Yakob Napu, dkk, *Pengembangan Masyarakat*,, h. 18.

“*Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*”. Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, maka dapat dipahami bahwa prinsip musyawarah bisa memposisikan setiap orang sama atau sejajar baik dalam kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sehingga mampu merumuskan, mendiskusikan dan secara bersama menetapkan permasalahan.¹²⁷

Musyawarah merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan masyarakat. Bersama masyarakat, perubahan untuk mencapai kesejahteraan harus dilakukan, karena tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, tidak mungkin proses pembangunan akan berjalan. Selain itu, ayat di atas juga mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat begitu penting dalam proses pembangunan. Jadi, perubahan itu harus muncul dari inisiatif masyarakat serta harus dilakukan juga oleh masyarakat itu sendiri.

Kelima, kabar gembira, penyadaran, dan kesejahteraan hidup yang lebih baik merupakan materi pengembangan.¹²⁸ Inti pokok proses pemberdayaan masyarakat yaitu perubahan kehidupan menuju ke arah yang lebih baik dan kesadaran terhadap realitas yang ada. Oleh karena itu, memberi kabar gembira tentang perubahan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang dan penyadaran terhadap realitas kehidupan yang sebenarnya merupakan misi utama pengembang masyarakat. Hal inipun sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Saba’ [34]: 228:

Dan kami tidak mengutusmu (Muhammad SAW) kecuali kepada seluruh umat sebagai pengemban berita baik dan juru ingat.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 19.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 20.

Penyadaran terhadap realitas kehidupan mengandung dua pengertian yaitu realitas kehidupan yang dihadapi sekarang dan realitas kehidupan yang dihadapi di masa yang akan datang. Penyadaran terhadap realitas kehidupan sekarang artinya sadar atas belenggu yang menghalangi untuk maju, sadar terhadap kultur dan struktur yang menyebabkan dirinya terbelakang, dan sadar bahwa dirinya dapat maju seperti orang lain yang sudah maju. Sedangkan penyadaran terhadap realitas kehidupan yang akan datang artinya sadar apa tujuan hidup ini dan akan kemana akhir hidup ini.

2) Landasan Filosofis

Paradigma pengembangan masyarakat yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan model kesejahteraan rakyat telah membawa masyarakat ke dalam jurang kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang mendalam. Oleh karena itu, agar masyarakat keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut maka model pengembangan masyarakat harus diubah menjadi model pengembangan masyarakat yang mampu memberi peluang besar bagi masyarakat untuk berkreasi dalam membangun dan mengaktualisasikan dirinya sendiri.

Secara filosofis, model pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada hal-hal berikut:

Pertama, manusia dipandang sebagai fokus dan sumber utama.¹²⁹ Sebagai subjek dalam pengembangan masyarakat, manusia menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan manusia. Proses humanisasi ini pada gilirannya mampu

¹²⁹*Ibid.*, h. 22.

mendorong manusia untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang fokus dan sumber utamanya manusia akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai penerima pelayanan pasif menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan serta aktif.

Pertumbuhan kualitas yang akan dicapai dengan model ini menurut Theodore Thomas yang dikutip oleh Yakub Napu dkk, sebagai:

*... a sense of self worth and a personal capacity for actively participating in life's important decision... a sense of political efficacy which, when realized, converts passive, reactive recipients into active, contributing participant in the development process social development becomes the liberation of human beings and communities from passive recipients toward a developed, active citizenry of participating in choices about community issues.*¹³⁰

Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Dalam pembangunan diperlukan produksi berbagai barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Manusia memerlukan makanan yang cukup untuk pengembangan dirinya, membutuhkan penerangan, membutuhkan perumahan dan pakaian yang bersih dalam menjaga kesehatannya, transportasi dan juga alat komunikasi agar dapat memudahkan hidup mereka. Pembangunan juga harus dapat meningkatkan produksi berbagai barang yang menjadi kebutuhan hidup, tetapi pemenuhan berbagai barang tersebut tetap harus berpusat kepada pengembangan manusianya.

Tumbuhnya sikap pasif baik dalam proses, pelaksanaan dan menerima berbagai hasil pembangunan dari masyarakat merupakan pengembangan masyarakat yang melupakan aspek manusianya dan jelas sangat merugikan. Di

¹³⁰ *Ibid.*

samping itu, sikap acuh tak acuh, dan sikap merasa tidak memiliki membuat mereka malas dalam menerima berbagai hasil pembangunan sehingga akhirnya mampu menurunkan harkat serta martabat masyarakatnya.

Kedua, musyawarah dijadikan sebagai metode kerja.¹³¹ Dengan bermusyawarah, masyarakat dapat menemukan hakikat hidupnya dan membawa perubahan kepada pelakunya sehingga kemampuan bermusyawarah mengenai kehidupan merupakan potensi manusiawi yang sangat penting dalam pengembangan masyarakat.

Mewujudkan suatu kesadaran transformatif berupa kesetaraan dan kesetiakawanan untuk melakukan pembaharuan dalam menciptakan realitas yang bersifat manusiawi merupakan tujuan dari musyawarah sebagai metode kerja dalam pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam musyawarah harus diciptakan sikap keterbukaan yaitu saling menghormati, menghargai, egaliter dan kritis seperti berani bertanya terhadap hal-hal yang mengganjal diri, kreatif dan komunikatif dalam melakukan berbagai perubahan.

Ketiga, pembebasan dan penyadaran sebagai prosesnya.¹³² Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini meliputi kesadaran kritis, kesadaran empiris dan kesadaran rasional. Dalam keadaan sadar, masyarakat berani mengungkapkan penindasan yang dialaminya dan berusaha untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang menindasnya, sehingga masyarakat mengerti dan menyadari asal usul dari penderitaannya. Masyarakat tidak lagi menyatakan bahwa penderitaannya itu berupa takdir yang tidak dapat dirubah, ditentang dan dilawan.

¹³¹*Ibid.*, h. 23.

¹³²*Ibid.*

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dapat dimulai dari individu, kelompok, hingga masyarakat. Jadi, tugas pengembang masyarakat yaitu menganalisis masalah dengan cara melibatkan masyarakat secara aktif.

Keempat, kesejahteraan hidup merupakan tujuan akhirnya.¹³³ Tujuan pengembangan masyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang mandiri, maju, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu menjadi masyarakat yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin.¹³⁴

Indikator kesejahteraan secara lahir, jika:

- a) Terpuhinya pangan dan sandang;
- b) Sehat jasmani maupun rohani;
- c) Kondisi rumah layak tinggal;
- d) Mampu menyekolahkan putra-putrinya;
- e) Dapat berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat;
- f) Mandiri dalam mengambil keputusan;
- g) dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri.¹³⁵

Adapun indikator secara batin, jika:

- a) Terwujudnya rasa aman di masyarakat;
- b) Terciptanya ketenangan;
- c) dan terpuhinya kepuasan dalam menjalankan perintah agama.¹³⁶

3) Landasan Teoritis

Landasan teori adalah bagaimana teori dapat diaplikasikan dalam pemberdayaan masyarakat.

¹³³ *Ibid.*, h. 25.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

a) Teori-teori Pemberdayaan Masyarakat

(1) Teori Perubahan Sosial

Dalam pengembangan masyarakat terdapat tiga kelompok teori perubahan sosial yang dapat digunakan, diantaranya:

- (a) Teori-teori yang memandang pengembangan masyarakat dan perubahan sosial sebagai suatu proses diferensiasi dan integrasi.
- (b) Teori-teori perubahan sosial yang memandang pengembangan masyarakat dan perubahan sosial sebagai suatu proses perubahan dan pembentukan nilai-nilai modern.
- (c) dan teori perubahan sosial yang memandang pengembangan masyarakat dan perubahan sosial terjadi secara radikal.¹³⁷

Ibnu Khaldun, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan August Comte merupakan pengembang teori-teori evolusi dan masuk ke dalam kategori yang pertama. Teori ini memandang bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tidak dapat berjalan mundur sehingga pengembangan masyarakat berlangsung secara terus menerus dengan diikuti oleh berbagai tahapan seperti pertumbuhan dan perkembangan biologis.

Kita kutip pemikiran *Comte* tentang tingkat perubahan dan kemajuan masyarakat. Menurut *Comte*, terdapat tiga faktor yang memengaruhi kemajuan dan tingkat perubahan masyarakat. Pertama, rasa bosan. Seperti binatang, manusia juga tanpa menggunakan kecakapan yang cukup tidak dapat berbahagia dan memantapkan proporsi aktifitas hakiki setiap kecakapannya. Seperti *teoritis modern*, *Comte* juga melihat hierarki kebutuhan manusia, yaitu semakin besar

¹³⁷*Ibid.*, h. 25-26.

penggunaan kemampuan yang lebih tinggi, semakin tinggi pula tingkat perubahan dan kemajuannya.¹³⁸

Kedua, faktor lamanya umur manusia. *Comte* berpendapat bahwa umur dapat meningkatkan konservatisme, dan kemudaan yang ditandai oleh naluri mencipta. Apabila meningkatnya umur manusia, maka kekuatan konservatisme akan semakin berpengaruh terhadap perubahan. Sebaliknya, jika umur pendek sama menyusahkannya dengan umur terlalu panjang karena dapat memberikan terlalu banyak kekuatan pada naluri mencipta. Jadi, terdapat kepanjangan umur optimum untuk kemajuan optimum dan setiap penurunan atau peningkatan umur dapat mempengaruhi tingkatan perubahan dan kemajuan.¹³⁹

Ketiga, faktor demografi pertambahan penduduk secara alamiah. Menurut *Comte* semakin tinggi tingkat konsentrasi penduduk di suatu tempat, akan menimbulkan keinginan atau masalah baru untuk mencapai kemajuan dan menghasilkan pertumbuhan kekuatan intelektual serta moral di kalangan penduduk yang tertindas.¹⁴⁰

Mc Clelland, Inkeles, Everette Hagen, dan Max Weber merupakan tokoh pengembang teori pada kelompok kedua yang terkenal. Teori-teori ini menekankan kepada pentingnya makna individu. Adapun berbagai faktor penyebab pertumbuhan dan perubahan masyarakat terdapat pada diri individu yaitu berupa nilai-nilai, keyakinan dan ideologi yang dimiliki oleh individu dari masyarakat. Menurut *Mc Clelland* dan *Hagen*, faktor utama pendukung terhadap perubahan merupakan nilai-nilai, keyakinan dan ideologi yang tergambar dalam

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, h. 27

¹⁴⁰ *Ibid.*

kepribadian seseorang. Lebih lanjut *Mc Clelland*, menegaskan bahwa perkembangan ekonomi melalui semangat kewiraswastaan dapat mendorong kepribadian yang mengarah kepada prestasi.

Pernyataan tersebut tercermin dalam Thesis dasar *Mc Clelland* yang dikutip oleh Yakob Napu dkk, mengatakan bahwa: “Masyarakat yang tinggi tingkat kebutuhan untuk berprestasinya, umumnya akan menghasilkan wiraswastawan yang lebih bersemangat yang selanjutnya menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat”.¹⁴¹ Salah satunya kebutuhan dasar manusia berupa kebutuhan untuk berprestasi. Jika kebutuhan untuk berprestasi dapat berkembang, maka individu akan bertindak untuk memajukan perkembangan ekonomi dan akan menunjukkan perilaku yang tepat semangat kewiraswastaan yang hasilnya berupa sebuah perubahan.

Kelompok teori yang ketiga disebut teori konflik yaitu teori yang memandang bahwa perubahan masyarakat terjadi secara radikal. Konflik merupakan perselisihan mengenai tuntutan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan kekuasaan, status, dan berbagai sumber kekayaan yang persediaannya tidak terpenuhi dan didalamnya terdapat berbagai pihak yang saling memojokan, sedang berselisih, dan merugikan. Sebuah perubahan dapat menimbulkan konflik karena terdapat berbagai pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Di samping itu juga, konflik dapat terjadi akibat dari ketidakpuasan suatu pihak terhadap pihak yang lain.

b) Aplikasi Teori Perubahan Sosial

¹⁴¹*Ibid.*

Pandangan-pandangan teoritis yang melihat pentingnya aplikasi teoritis dalam pengembangan masyarakat memandang bahwa diperlukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yaitu perubahan sosial sebagai proses yang disengaja. Dalam pemberdayaan masyarakat, istilah ini sering disebut sebagai rekayasa sosial. Teori evolusi memandang bahwa perubahan sosial terjadi secara terus-menerus, linier, dan tidak berjalan mundur, maka rekayasa sosial dapat ditempuh melalui peningkatan dan perluasan peran seperti peran perempuan, dan peningkatan peran anggota dalam masyarakat atau organisasi. Jadi, menurut perspektif teori ini, rekayasa sosial dapat ditempuh melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.

Rekayasa sosial dapat ditempuh melalui berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan prestasi, karena dengan meningkatnya prestasi maka kemampuan kerja seseorang dapat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan produktifitas kerja. Disamping itu, rekayasa sosial juga menurut teori konflik dapat ditempuh melalui propaganda, penghasutan, membungkam kelompok radikal, mengontrol media massa, dan sebagainya.¹⁴²

Managemen konflik merupakan usaha untuk menangani konflik sosial yang timbul akibat pembenturan kepentingan. Terdapat distribusi kekuasaan, pembagian kerja, dan wewenang serta peran secara proporsional dalam managemen konflik. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan kondisi politik dan sosial yang kondusif.

¹⁴²*Ibid.*

Rekayasa sosial menurut teori kapitalis, dapat ditempuh melalui memutus hubungan kerjasama atau pembebasan diri dari Negara-negara kapitalis. Hal ini terbukti dari aturan globalisasi ekonomi dan berbagai ideologi termasuk privatisasi, deregulasi, perdagangan bebas, dan penyesuaian struktural yang telah menghancurkan kehidupan banyak orang. Selain itu, banyak yang kelaparan dan menjadi gelandangan, bahkan tidak mempunyai akses terhadap pelayanan publik yang paling pokok seperti kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, air bersih, dan lain-lain.¹⁴³ Disamping itu, rekayasa sosial dapat ditempuh melalui pemberdayaan sumberdaya lokal yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di setiap daerah. Adapun berbagai prinsip pokok yang perlu dikembangkan dalam pemberdayaan sumberdaya lokal sebagai berikut:

- 1) Warga masyarakat berinisiatif dan membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat ditingkat lokal dalam proses pengembangan masyarakat dan berperan sebagai partisipan.
- 2) Aset-aset yang terdapat pada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemampuan rakyat miskin merupakan fokus utama pemberdayaan sumberdaya lokal.
- 3) Untuk menggapai sebuah tujuan, diperlukan teknik sosial learning yaitu individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris dengan mengacu kepada kesadaran kritis masing-masing.¹⁴⁴

Mengingat bahwa inti pemberdayaan adalah kemandirian manusia, maka berpijak pada empat pilar utama pendekatan pembangunan manusia (*human development approach*), yaitu pemberdayaan, pemerataan, produktivitas, dan kesinambungan, dengan sedikit modifikasi dalam lingkup pengertiannya, ditambah dengan wawasan interkoneksi dan kesadaran kosmologis.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 32-33.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Dalam dimensi kemandirian lokal, terdapat tiga aspek penting yang perlu diterapkan yaitu:

- 1) *Community Oriented*, yaitu pengembangan masyarakat didasarkan pada kebutuhan nyata yang disadari masyarakat setempat.
- 2) *Community Based*, yaitu pengembangan masyarakat didasarkan pada sumber daya yang terdapat dalam masyarakat setempat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kelembagaan ekonomi, sosial, politik dan nilai-nilai yang mendukungnya.
- 3) *Community managed*, yaitu pengembangan masyarakat harus mengikutsertakan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pemetikan hasil kegiatan.¹⁴⁵

c. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Islam

Filosofi pemberdayaan masyarakat menurut Kelsey dan Hearne yang dikutip oleh Aziz Muslim adalah membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri.¹⁴⁶ Filosofi ini harus dipahami secara demokratis yang menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang setara, bukan kedudukan hirarki yang menempatkan pihak yang membantu pada posisi yang lebih tinggi dibanding pihak yang dibantu. Oleh karena itu, menurut Nyerere yang dikutip oleh Aziz Muslim bahwa filosofi membantu masyarakat agar dapat membantunya.

Hal ini mengandung makna:

- 1) Fasilitator bukan bekerja untuk masyarakat, tetapi harus bekerja sama dengan masyarakat. Kehadiran fasilitator bukan sebagai pemaksa atau penentu, melainkan harus dapat menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menggerakkan, menumbuhkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
- 2) Pengembangan harus dapat mendorong semakin terciptanya kemandirian dan terciptanya kreativitas masyarakat dan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memiliki kemampuan untuk berswakarya, swadana, swadaya, dan

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*,, h. 20.

swakeloka bagi terselenggaranya berbagai kegiatan agar terciptanya tujuan, harapan, dan keinginan masyarakat sasaran.

- 3) Pengembangan yang dilakukan harus selalu mengacu kepada peningkatan harkatnya sebagai manusia dan terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹⁴⁷

Pemahaman ini sejalan dengan Muslim yang dikutip oleh Aziz Muslim, beliau memberikan empat makna dari filosofi pengembangan masyarakat sebagai berikut:

- a) Masyarakat dipandang sebagai sumber fokus utama pengembangan. Masyarakat juga dipandang bukan sebagai objek tetapi subjek dalam pengembangan masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan manusia. Proses humanisasi ini pada gilirannya mampu mendorong manusia untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang fokus dan sumber utamanya masyarakat akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang pasif menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan.
- b) Musyawarah dijadikan sebagai metode kerjanya. Kemampuan bermusyawarah mengenai kehidupan merupakan potensi manusia yang paling penting dalam pengembangan masyarakat karena dengan bermusyawarah, masyarakat akan menemukan hakikat persoalan hidupnya.
- c) Penyadaran dijadikan prosesnya. Kesadaran disini meliputi kesadaran kritis, kesadaran empiris dan kesadaran rasional. Masyarakat tidak lagi menganggap bahwa penderitaan itu semacam takdir, yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dilawan.
- d) Kesejahteraan hidup merupakan tujuan akhir dari pengembangan masyarakat, yaitu terwujudnya masyarakat maju, mandiri, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sejahtera lahir maupun batin.¹⁴⁸

Dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat sebagai proses pembelajaran, di Indonesia dikenal adanya falsafah pembelajaran yang dijadikan dasar filosofi pengembangan masyarakat yaitu falsafah Ki Hajar Dewantoro:

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 21.

¹⁴⁸*Ibid.*, h. 22.

- a) Ing ngarso sung tuludo, artinya fasilitator harus dapat memberi tauladan atau contoh yang baik bagi masyarakat sasarnya.
- b) Ing madyo mangun karso, artinya fasilitator harus dapat mendorong kreativitas dan menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk selalu mencoba dan belajar.
- c) Tut wuri handayani, artinya fasilitator bisa mengikuti berbagai keinginan dan menghargai serta upaya yang dilakukan masyarakat, sepanjang tidak menyimpang acuan, demi terwujudnya tujuan kesejahteraan hidupnya.¹⁴⁹

Seorang fasilitator atau pengembang masyarakat juga mempunyai berbagai peranan dalam memberdayakan masyarakat diantaranya sebagai fasilitator, motivator dan inovator.¹⁵⁰

a) Fasilitator

Fasilitator dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab dalam membantu kelompok sasaran agar mampu menghadapi dan menangani tekanan keadaan atau transisional.¹⁵¹ Peran fasilitator diharapkan dapat membantu suatu kelompok masyarakat memperbaiki penyelesaian masalah sosial yang sedang dihadapi dan membuat keputusan secara tepat dalam rangka mewujudkan cita-cita hidup mereka yang lebih bermutu. Tanggung jawab sebagai fasilitator direalisasikan oleh pekerja masyarakat melalui berbagai upaya yang memberi harapan, mengurangi sikap penolakan dan ambivalensi, menghormati dan mengarahkan perasaan, mengidentifikasi dan mendorong berbagai kekuatan personal dan aset-aset sosial, memilah masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan serta mengarahkan kelompok sasaran agar terfokus pada tujuan dan cara-cara penyampaianya.

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 145.

¹⁵¹*Ibid.*

Menurut Edi Soeharto, tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh seorang fasilitator pengembang masyarakat dapat dikerangkakan sebagai berikut:

- 1) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mendefinisikan tujuan keterlibatan;
- 3) Mendorong komunikasi, relasi, menghargai pengalaman dan berbagai perbedaan;
- 4) Memfasilitasi pendidikan dalam rangka membangun pengetahuan dan keterampilan;
- 5) Memfasilitasi keterikatan, sinergi sebuah sistem dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan;
- 6) Memberi model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama untuk mendorong kegiatan kolektif;
- 7) Mengidentifikasi berbagai masalah yang akan dipecahkan;
- 8) Memfasilitasi penetapan tujuan;
- 9) Merancang berbagai solusi alternatif;
- 10) Mendorong pelaksanaan tugas;
- 11) Memelihara relasi secara sistemik;
- 12) Dan memecahkan konflik.¹⁵²

b) Motivator

Istilah motivator berkembang dari istilah motif dan motivasi sehingga sebelum menjelaskan konsep motivator ada sebaiknya memahami tentang motif dan motivasi. Menurut Soewarno Handyaningrat yang dikutip oleh Efendi, motif adalah suatu pernyataan batin yang berwujud daya kekuatan untuk bertindak atau bergerak secara langsung atau melalui saluran perilaku yang mengarah kepada sasaran sedangkan motivasi merupakan suatu kekuatan atau pengaruh yang timbul dalam diri seseorang untuk bertindak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara, seseorang yang disebut sebagai motivator apabila ia mampu mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kekuatan

¹⁵²Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2005), h. 45

pada orang lain yang dipengaruhinya dan selanjutnya akan menimbulkan suatu tindakan atau perilaku yang lebih baik demi tercapainya tujuan yang diinginkan.¹⁵³

Jika dikaitkan dengan pemimpin, dengan memberikan batasan mengenai motivasi dalam pemerintahan bahwa motivasi menurut Wijaya adalah kekuatan seorang pemimpin baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan perkataan lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental yang datangnya dari pemimpin suatu pemerintahan terhadap perorangan atau orang-orang sebagian anggota kelompok dalam menggapai suatu tujuan dalam masyarakat.¹⁵⁴

Motivasi sebagai suatu hal yang penting sehingga sangat perlu untuk dilakukan oleh setiap pimpinan, tentunya dalam melaksanakan suatu kebijakan atau kegiatan yang memerlukan adanya dukungan dari bawahan maupun masyarakatnya secara aktif. Hal tersebut memerlukan kemampuan yang matang dari seorang pemimpin terutama dengan mengetahui prinsip-prinsip motivasi.

Prinsip motivasi merupakan suatu pedoman pokok yang hendaknya diketahui oleh seseorang pemimpin sebelum melakukan pemberian motivasi agar tujuan pemberian motivasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut Hasibuan, prinsip-prinsip motivasi sebagai berikut:

- 1) Prinsip mengikutsertakan, artinya para bawahan diberikan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam berbagai keputusan sehingga mereka ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan.
- 2) Prinsip komunikasi, artinya motivasi akan cenderung meningkat jika bawahan diberi tahu mengenai apa saja hal-hal yang berpengaruh terhadap sebuah tujuan. Pada dasarnya, semakin banyak seorang

¹⁵³Efendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1990), h. 109

¹⁵⁴Wijaya, *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2005), h. 87

bawahan mengetahui hal-hal tersebut, semakin banyak pula minat dan perhatiannya terhadap pencapaian tujuan.

- 3) Prinsip pengakuan, artinya motivasi akan cenderung meningkat jika bawahan diberi pengakuan atas peran sertanya terhadap hasil-hasil yang dicapai.
- 4) Prinsip wewenang yang didelegasikan, artinya motivasi akan cenderung meningkat jika bawahan diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri.
- 5) Prinsip perhatian timbal balik, artinya motivasi akan cenderung meningkat jika seorang pemimpin mengetahui kebutuhan dan keinginan bawahan.¹⁵⁵

Di dalam suatu organisasi masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan, seorang pemimpin sebagai motivator harus dapat memegang teguh pelaksanaan motivasi bagi masyarakatnya sesuai dengan proses dan tujuan motivasi. Pelaksanaan proses motivasi meliputi:

- 1) Perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan dari pembangunan tersebut;
- 2) Penting mengetahui keinginan masyarakat yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang pimpinan dan pembangunan saja;
- 3) Harus dilakukan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan masyarakat;
- 4) Sebagai pemimpin penting memberikan bantuan kepada masyarakatnya dalam pembangunan;
- 5) Pemimpin harus membentuk *team work* yang sanggup mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵⁶

Sementara, tujuan motivasi dalam pembangunan adalah: a) untuk meningkatkan gairah kerja masyarakat; b) untuk meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap kewajibannya dalam pembangunan; dan c) untuk memperbesar partisipasi masyarakat dalam pembangunan.¹⁵⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dalam pelaksanaan proses dan tujuan motivasi harus dijalankan secara harmonis baik bagi pemimpin atau bawahan untuk mencapai tujuan.

¹⁵⁵Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), h. 45

¹⁵⁶*Ibid.*, h.46

¹⁵⁷Efendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*,, h.110

c) Inovator

Inovator jika ditinjau dari administrasi pembangunan yaitu orang yang mampu menemukan hal-hal yang baru, ide yang baru dan sistem yang baru dalam proses pembangunan.¹⁵⁸ Sebagai inovator bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru, dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan. Sebagaimana diketahui inovasi berarti penemuan baru dalam cara kerja, metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru artinya perlu ada kreativitas. Dimana inovator itu sendiri artinya adalah kemampuan sebagai agen pembaharuan memberikan implikasi bahwa harus dapat berpikir strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus menjawabnya yaitu dapat memberi pemerksa dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi perubahan dan pengembangan antusiasme terhadap perubahan.¹⁵⁹

2. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Islam

a. Sebuah Cara Pandang

Terdapat empat cara orang dalam memandang konsep pemberdayaan masyarakat, secara teoritis. Menurut Sanders dalam Christenson dan Robinson yang dikutip oleh Yakob Napu dkk, bahwa proses, metodologi, program dan satuan gerakan merupakan cara pandang dalam konsep pemberdayaan masyarakat.¹⁶⁰ Pemberdayaan masyarakat jika dilihat sebagai sebuah proses karena dalam konsep ini ada unsur-unsur pergerakan dari suatu tingkatan kondisi

¹⁵⁸Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat,,* h. 147

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰Yakob Napu dkk, *Pengembangan Masyarakat,,* h. 35.

ketingkatan kondisi lain yang lebih baik. Titik berat pengembangan masyarakat sebagai proses adalah adanya perubahan yang terjadi pada manusia baik secara psikologikal maupun sosial.

Pengembangan masyarakat jika ditinjau sebagai sebuah program, yaitu pengembangan masyarakat harus difokuskan kepada suatu kegiatan atau aktivitas yang diterapkan. Pengembangan masyarakat merupakan suatu gerakan yang dinamis dan terprogram, konsep ini memandang pengembangan masyarakat sebagai suatu “peperangan” dimana orang mempunyai suatu tekad untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Penyadaran Merupakan Inti Proses

Tema pokok penyadaran sebagai inti dari sebuah proses berangkat dari suatu analisis bahwa sistem yang pincang, baik kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya membuat masyarakat mengalami proses “*dehumanisasi*”. Masyarakat sebagai bagian dari sistem yang pincang itu telah menjadi pelangsup proses dehumanisasi tersebut. Lebih jauh analisis ini dapat terlihat melalui kesadaran berupa sebuah pandangan hidup (*way of life*) masyarakat terhadap diri mereka sendiri.

Menurut Mansour Fakih yang dikutip oleh Yakub Napu dkk, kesadaran manusia digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naif (*naival consciousness*) dan kesadaran kritis (*critical consciousness*).¹⁶¹

¹⁶¹*Ibid.*, h. 37.

1) Kesadaran Magis (*magical consciousness*)

Suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lain misalnya masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat faktor diluar manusia sebagai penyebab ketidakberdayaan. Dalam dunia pengembangan masyarakat, jika proses pengembangan masyarakat tidak mampu melakukan analisis terhadap satu permasalahan maka pengembangan masyarakat tersebut dalam perspektif Frerian disebut sebagai model pengembangan masyarakat fatalistik. Proses pengembangan masyarakat ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Masyarakat secara dogmatik menerima kebenaran dari proses pengembangan masyarakat tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

2) Kesadaran Naif (*naival consciousness*)

Sebuah kesadaran yang dikategorikan dengan lebih melihat “aspek manusia” menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini masalah etika, kreatifitas, *nid for ahcevment* dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Dengan demikian setiap menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena “salah” masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki kewiraswastaan atau tidak memiliki budaya “membangun” dan seterusnya. Oleh karena itu “*man power development*” adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pengembangan

masyarakat dalam konteks ini tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur adalah sudah baik dan benar merupakan faktor “*given*” dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas pengembangan masyarakat adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa masuk beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut.

3) Kesadaran Kritis (*critical consciousness*)

Kesadaran kritis merupakan sebuah kesadaran yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah mereka. Kesadaran kritis dalam pengembangan masyarakat dapat melatih masyarakat untuk mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur atau sistem yang ada, selanjutnya dapat menganalisis bagaimana struktur atau sistem tersebut bekerja, serta bagaimana cara mentransformasikannya. Menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik merupakan tugas pengembangan masyarakat dalam paradigma kritis.

c. Musyawarah Sebagai Metode

Musyawarah dalam pengembangan masyarakat menjadi perantara (*linkage*) yang menghubungkan proses pengembangan masyarakat dengan komunitas atau masyarakat. Patut dicermati batasannya sehingga tidak mematikan kebijaksanaan dan pengetahuan lokal, sekaligus tidak melupakan basis historisnya bahwa musyawarah adalah milik masyarakat.

Menurut Muhammad Al-Ghazali (Sarjana Mesir) sebagaimana dikutip oleh Fajrur Rahman dalam Yakob Napu dkk, bahwa musyawarah bukanlah sesuatu yang berasal dari Islam untuk pertamakali, karena ia merupakan suatu

tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial, bahkan masyarakat Muslim sudah mengenal musyararah ketika sebelum hijrah, dan lebih jauh lagi masyarakat Arab sudah mengenal institusi musyawarah sebelum Islam.¹⁶² Oleh karena itu, dalam mencapai hal tersebut perlu memperhatikan:

- 1) Perlu ada suatu bahan pemahaman umum tentang apa yang dimaksud dengan istilah musyawarah, pada tingkat media pengembangan masyarakat bagi komunitas (masyarakat). Dengan adanya bahan ini, akan terbuka komunikasi dengan berbagai pihak akan materi umum tersebut dalam memberikan masukan-masukan dari berbagai pihak guna memperkaya konsep yang ada.
- 2) Hasil pengembangan materi tahap pertama yang sudah dikombinasikan dengan hasil kajian dan pengalaman, selanjutnya dikaji dan direfleksikan. Pada tingkat refleksi diupayakan memperoleh rangkuman atau esensi dasar dari musyawarah dalam hal azas manfaat pokoknya sebagai metode pengembangan masyarakat. Inilah yang diharapkan menjadi materi dasar yang secara luwes dapat diadaptasi sesuai kebutuhan lokal.
- 3) Bahan dasar itu dalam tingkat praktik akan diperkaya oleh nilai-nilai lokal. Dengan begitu, watak musyawarah ditingkat lokal tidak harus seragam. Komunitas bisa menambahkan dan mengurangi materi dasar sesuai tingkat permasalahan yang dihadapi. Pada tahap selanjutnya, berdasarkan kebutuhan komunitas, musyawarah dapat dijadikan sebagai suatu cara strategis menyampaikan isu-isu pokok demokratisasi masyarakat Islam.¹⁶³

d. Partisipasi Berbasis Program

Menurut Yakob Napu dkk, apabila ingin mengelola partisipasi masyarakat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Pembentukan kelompok. Yang perlu dipahami dalam pembentukan kelompok ini adalah apakah seseorang bila menjadi suatu anggota kelompok, segera memperoleh keuntungan atau sebenarnya harus memberi pengorbanan terlebih dahulu. Pemahaman ini penting agar bisa dipergunakan sebagai pintu masuk untuk mengajak orang bersedia berkelompok.
- 2) Mengenali partisipasi masyarakat. Setiap orang adalah pelaku, berpartisipasi dalam kelompok meskipun demikian belum tentu bahwa

¹⁶²*Ibid.*, h. 42.

¹⁶³*Ibid.*, h. 42-43.

sebagai pelaku setiap orang mampu berkontribusi dalam arti memberikan suatu hal untuk kelompok. Maka yang terpenting perlu ada upaya menciptakan situasi yang dapat menggiring setiap orang dalam mengambil tanggung jawab dan bersedia berprakarsa.

- 3) Mengembangkan musyawarah. Agar musyawarah memperoleh tingkat efektifitas, efisiensi, dan berkelanjutan perlu diusahakan:
 - (a) Dilaksanakan secara teratur dalam arti berkala dengan jadwal yang tertentu.
 - (b) Setiap musyawarah membahas tema tertentu yang disepakati bersama dan berkaitan langsung dengan kebutuhan atau hajat para anggota.
 - (c) Ada pembagian tugas untuk memfasilitasi dan memberi klarifikasi sesuai dengan tema.
 - (d) Bermusyawarah tidak perlu harus sampai pada kesepakatan, tetapi ada kalanya untuk mengenali berbagai alternatif, memperluas wawasan dan mencerna lebih dalam suatu persoalan.
- 4) Membangun jaringan. Melalui musyawarah kan melalui banyak hal bisa dikenali, sebagai kendala, peluang, maupun ancaman. Tetapi banyak juga masalah yang akan mampun dipecahkan dan diselesaikan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa kemudian tidak akan lagi masalah. Justru sebaliknya, akan dapat muncul masalah yang lebih besar dan lebih sulit, sebab keberhasilan akan membawa timbulnya keinginan dan kebutuhan baru yang biasanya lebih tinggi dari keinginan dan kebutuhan lalu.¹⁶⁴

e. Gerakan Menjadi Hakikat Tujuan

Gerakan pengembangan masyarakat Islam bertujuan menggarap realitas manusia yang secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk merubah kenyataan yang menindas tersebut. Inilah makna dan hakikat dari gerakan pengembangan masyarakat.

Sasaran atau gerakan (sifat aksi) pada pokoknya ada tiga macam, yaitu gerakan politik, gerakan sosial-ekonomi, dan gerakan moral.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 44-45.

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 48.

Pertama gerakan politik. Gerakan politik adalah gerakan yang paling tinggi dan berat. Tinggi dalam arti kualitasnya, dan berat dalam arti konsekuensinya. Demikian penting gerakan politik, karena gerakan politik langsung menyangkut soal kekuasaan. Gerakan politik memerlukan keberanian yang luar biasa besar, kekuatan yang lebih tangguh dan kesadaran politik yang lebih tinggi. Jika tanpa perhitungan yang akurat dan jeli, tanpa didukung oleh analisa sosial-politik yang luas, gerakan ini dapat menjadi boomerang bagi semangat masa dan menghabiskan dana saja.

Kedua, gerakan sosial-ekonomi. Gerakan sosial-ekonomi adalah gerakan langsung dan konkret menyangkut kepentingan sosial-ekonomi bagi mereka yang melakukannya artinya, pribadi-pribadi yang melakukan gerakan bisa nyata menerima dan langsung merasakan hasil kemenangan aksi sosial-ekonominya.

Ketiga, gerakan moral. Tujuan sentral gerakan pengembangan masyarakat adalah untuk menciptakan sebuah tata sosial yang mantap dan hidup dimuka bumi, yang adil dan berasaskan pada etika. Dalam perspektif pengembangan masyarakat apakah individu yang lebih penting ataukah masyarakat. Tidak menjadi soal besar, artinya antara individu dan masyarakat harus saling bergantung dan berkaitan. Hal yang ditekankan dalam pengembangan masyarakat Islam adalah perlunya pengamanaan ontologisme bagi pembinaan masyarakat dan peradaban dimana prinsip moral-transendental menjadi asanya yang utama. Tanpa asas moral yang kukuh ini jangan diharapkan bahwa keadilan yang menjadi cita-cita abadi umat manusia dapat terwujud.

Menurut Yakob Napu dkk, dalam setiap pergerakan diperlukan syarat-syarat yang benar-benar harus diperhatikan antara lain:

- 1) Motifnya jelas. Artinya ada dasar atau alasan konkret mengapa aksi itu dilakukan.
- 2) Tuntutannya obyektif. Artinya tuntutannya wajar sehingga bukan tidak mungkin bisa dipenuhi oleh yang menuntut.
- 3) Sasarannya tepat. Artinya gerakan ditujukan langsung kepada persoalannya yang obyektif dan kepada pemegang kendalinya.
- 4) Dipahami dan didukung oleh massa yang berkepentingan. Artinya massa yang berkepentingan merasa berkepentingan dan mengetahui persoalannya, mengerti perlunya dilakukan gerakan dan mendukungnya.¹⁶⁶

3. Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam

a. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip-prinsip ekologis, meliputi: a) Holistik yaitu memakai perspektif sistematis dalam memahami problem, isu, dan proses pengembangan masyarakat. b) Berkelanjutan yaitu mengurangi, menghilangkan ketergantungan dan menjamin keberlanjutan program. c) Keanekaragaman, meliputi: (1) Keanekaragaman diantara masyarakat yaitu tidak memaksakan suatu cara untuk melakukan segala sesuatu karena masyarakat yang berbeda akan memiliki berbagai cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, dan pengembangan masyarakat dilaksanakan dari bawah atau *bottom up*. (2) Keanekaragaman dalam masyarakat yaitu proses dan struktur yang inklusif dalam masyarakat mampu menguatkan adanya perbedaan di dalam masyarakat. d) Perkembangan organik yaitu pengembangan masyarakat adalah proses yang dinamis dengan menghargai dan menghormati berbagai sifat khusus suatu masyarakat dan mendorongnya untuk maju. e) Perkembangan yang seimbang yaitu menjamin adanya keseimbangan dalam enam dimensi meliputi ekonomi, politik, sosial, lingkungan, budaya, dan pengembangan personal (spiritual).
- 2) Prinsip-prinsip HAM dan sosial, meliputi: a) Mengatasi struktur yang merugikan, yaitu menjamin tidak memperkuat bentuk penindasan struktural, melawan penindasan dan menghadapi serta mengatasi

¹⁶⁶*Ibid.*, h. 50.

kelemahan struktural. b) Mengatasi berbagai wacana yang merugikan, yaitu mengungkapkan wacana penindasan, dan kekuasaan, berupaya melawan wacana yang dominan, peningkatan kesadaran, dan menjadi bagian dari rekonstruksi wacana. c) Pengembangan yaitu menyediakan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan berpartisipasi dalam program. d) Hak asasi manusia (HAM) yaitu program dan struktur yang tidak bertentangan dengan HAM. e) Definisi kebutuhan ialah adanya kesepakatan antara berbagai pendefinisi kebutuhan dengan mengutamakan definisi kebutuhan dari masyarakat melalui dialog efektif.

- 3) Prinsip-prinsip menghargai yang lokal, meliputi: a) Menghargai pengetahuan lokal yaitu bukan ditempatkan lebih rendah dari pengetahuan dari luar, tetapi pengetahuan dan keahlian lokal harus diidentifikasi dan diterima. b) Menghargai budaya lokal, yaitu budaya lokal didukung dan diakui sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat. c) Menghargai sumberdaya lokal, adalah memanfaatkan sumberdaya, keterlibatan dan minat masyarakat serta memperluas kepemilikan masyarakat. d) Menghargai keterampilan masyarakat lokal, adalah bukan meremehkan dan memarjinalkan keterampilan masyarakat melainkan menghargai dan mengoptimalkan berbagai keterampilan lokal. e) Menghargai proses lokal adalah pengembangan masyarakat tidak dipaksakan melainkan dikembangkan dari masyarakat melalui cara yang sesuai dengan konteks lokal spesifik dan peka terhadap tradisi lokal, budaya masyarakat lokal, dan lingkungan lokal. f) Partisipasi merupakan cita-cita pengembangan masyarakat yaitu demokrasi partisipasi semua orang dalam aktifitas masyarakat.
- 4) Prinsip-prinsip proses, meliputi: a) Proses, hasil dan visi harus yang terintegrasi. Proses mencerminkan dan menentukan hasil serta hasil mencerminkan proses. Jadi, proses dan hasil harus sejalan dengan visi seperti keadilan sosial, keberlanjutan dan HAM. b) Integritas proses, ialah proses lebih penting daripada hasil. c) Menumbuhkan kesadaran, ialah menumbuhkan kesadaran hubungan politik, dan personal, berbagi pengalaman penindasan, mengembangkan hubungan biologis, dan membuka peluang untuk bertindak. d) Konsensus dan kerjasama ialah kerjasama yang menghasilkan mufakat dan saling menguntungkan. e) Tahapan pembangunan, adalah masyarakat itu sendiri yang menentukan tahapan pembangunan. f) Perdamaian dan anti kekerasan, adalah menghilangkan sebab-sebab kekerasan, mengupayakan perubahan struktur kekerasan, melakukan alternatif tanpa kekerasan, mencegah dan menghilangkan kekerasan. g) Keterbukaan, adalah mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat, menghargai dan merangkul masyarakat dan bukan mengucilkannya. h) Membangun pandangan masyarakat, adalah memperkuat dan menyadarkan hubungan diantara masyarakat.

- 5) Prinsip lokal dan global, meliputi: a) Menghubungkan yang lokal dan global, adalah fasilitator dalam pengembangan masyarakat, harus dapat mempertimbangkan isu lokal dan global yang saling mempengaruhi, berinteraksi dan menyelidiki berbagai cara yang dapat menghubungkan masyarakat dengan gerakan global. b) Praktek anti kolonialis, adalah harus waspada dengan praktek kolonialis.¹⁶⁷

b. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam

Terdapat tiga tahapan atau proses dalam pemberdayaan masyarakat yang harus ditempuh yaitu takwin, tanzim, dan taudi.¹⁶⁸ Hal ini merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat.

1) Takwin

Takwin merupakan tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok dalam tahap ini melalui dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhwah, dan ta'awun.¹⁶⁹ Semua aspek ditata menjadi instrumen sosiologis dan proses sosialisasi yang dimulai dari unit terkecil dan terdekat sampai kepada perwujudan-perwujudan kesepakatan. Sasaran dalam tahap ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat, kemudian diekspresikannya dalam ghirah dan sikap membela keimanan dari tekanan struktural (para penindas). Pada tahap ini Rasulullah SAW melaksanakan dakwah untuk pembebasan akidah masyarakat dari sistem akidah yang menjadikan keinginan subjektif manusia yang dipersonifikasikan dalam bentuk berhala.

Senada dengan hal di atas, menurut Amrullah Ahmad yang dikutip oleh Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Safei, pada tahap takwin, fundamen

¹⁶⁷Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 167-168.

¹⁶⁸Nani Machendrawati, Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi sampai Tradisi*,, h. 30.

¹⁶⁹*Ibid.*

sosial Islam dalam bentuk *shalat, akidah, ukhwah Islamiyah*, dan *ta'awwun* sudah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Begitupun dengan tauhid menjadi instrumen sosiologis dalam mempersatukan masyarakat Muslim dan para sahabat Rasul dengan ghirah Islam yang sangat mendalam. Proses dakwah ini berlangsung terus walaupun melalui tekanan struktural yang semakin keras, sehingga sasaran dakwah mulai bergeser kepada kabilah yang datang pada musim haji.

Ba'iat Aqabah I dan *Ba'iat Aqabah II* merupakan hasil dari akibat susulan dakwah terhadap kabilah tersebut. Oleh para Sejarahwan hal inilah yang disebut sebagai sebuah jembatan yang akan membuka pandangan maupun strategi baru dakwah Nabi Muhammad SAW. *Ba'iat Aqabah* dalam kerangka *community development*, merupakan sejenis kesepakatan bersama untuk melaksanakan program bersama (*memorandum of agreement*). Dengan demikian, pada tahap takwin telah terwujud jama'ah Islam swadaya yang akan menjadi *community base* kegiatan dakwah Nabi di Yatsrib. Tanpa terwujudnya *Ba'iat aqabah*, secara sosiologis, dakwah Nabi SAW di Yatsrib tidak akan berjalan semulus yang terjadi. Oleh karena itu, kesepakatan (*ba'iat*) antara *da'i* dan *mad'u* merupakan *sunatullah* dalam sejarah yang menentukan keberhasilan dakwah Islam. Karena *ba'iat* merupakan prinsip pengorganisasian Islam, maka adanya organisasi dakwah merupakan sunatullah untuk keberhasilan dakwah.

2) Tanzim

Tanzim merupakan pembinaan dan penataan masyarakat.¹⁷⁰ Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusionalisasi Islam

¹⁷⁰*Ibid.*, h. 33.

secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini dimulai dengan hijrah Nabi ke Madinah. Fase hijrah dimulai dengan pemahaman karakteristik sosial masyarakat Madinah, baik melalui informasi dari Mus'ab bin Umair maupun interaksi Nabi dengan jamaah haji peserta *Ba'iat Aqabah*. Dalam perspektif strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural, dan militer sudah demikian mencekam sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kehingmbagaan dan menjadi lumpuh.

Nabi Muhammad SAW memulai gerakan penataan dakwah tanzim melalui hijrah. Dalam proses ini, merupakan upaya pembebasan manusia untuk menemukan jati dirinya yang telah terendam lingkungan sosio-kultural yang tidak Islami. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk memutushubungan dari tata nilai dan lingkungan yang zalim. Setelah sampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa langkah mendasar yaitu: pertama, membangun masjid Quba dan masjid Nabawi di Madinah. Kedua, membentuk lembaga Ukhwah Islamiyah antara Muhajirin dan Anshar. Ketiga, membuat "Piagam Madinah" yang disepakati oleh berbagai suku dan kaum Yahudi.

Terdapat tiga peristiwa dakwah yang strategis dalam memberikan kerangka kerja dakwah Islami menurut pandangan Amrullah Ahmad yang dikutip oleh Nani Machendrawaty dan Ahmad Safe'i, yaitu:

Pertama, dakwah Islam Nabi berpijak dari Masjid yaitu untuk menata dan mengembangkan masyarakat Islam. Kedua, untuk memperkuat basis komunitas Muslim awal, dakwah Islam sangat memerlukan organisasi atau lembaga yang mempresentasikan *Ukhwah Islamiyah* baru di Madinah. Hal ini dapat dilihat sebagai penataan kelembagaan yang akan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan bangunan inti umat Islam yang berfungsi untuk mempertahankan, membina, dan mengembangkan masyarakat Islam Madinah. Ketiga, Nabi Muhammad SAW telah

menandatangani perjanjian terhadap semua kekuatan politik dan sosial yang ada. Untuk menciptakan landasan kehidupan politik Madinah dengan tindakan Nabi tersebut dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam disebut *Memorandum of Agreement* antara da'i dengan mad'u yang dijadikan sebagai landasan kerja membangun dan mengembangkan masyarakat Madinah.¹⁷¹

3) Taudi

Taudi merupakan tahap keterlepasan dan kemandirian.¹⁷² Umat Islam pada tahap ini, telah siap menjadi masyarakat yang mandiri secara manajerial. Jika ketiga tahap ini dapat dilewati dengan baik, maka terciptalah suatu masyarakat Islam yang siap dan mempunyai kualitas untuk dipertandingkan dengan berbagai kelompok masyarakat yang lainnya.

Pada tahap masyarakat mandiri atau madani, problem agama seharusnya tidak lagi berkuat pada pemanjaan Tuhan. Pada fase ini menurut Abdul Munir Mul Khan yang dikutip oleh Nani Machendrawati dan Ahmad Syafei, problem agama adalah pembebasan manusia dan dunia dari kemiskinan, konflik etnis, dan keagamaan juga penindasan atas nama Negara, ideologi politik, bahkan agama. Oleh karena itu, agama harus dipahami sebagai sebuah wacana kebudayaan. Begitu disentuh oleh manusia, maka wahyu Tuhan dapat berubah menjadi masalah kebudayaan. Praktek dakwah dan keagamaan yang berlebihan dalam mengurus Tuhan akan membuat dakwah dan agama cenderung tidak peduli dan tidak manusiawi terhadap berbagai persoalan konkret yang dihadapi manusia.¹⁷³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa upaya dakwah merupakan sebuah proses transformasi sosial, bukan semata-mata sebuah proses untuk mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Menurut sosiolog Lyman, gerakan

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

modernitas zaman yang begitu cepat telah menyeret apa yang dinamakan sebagai *the seven deadly sins* yaitu tujuh dosa maut yang meliputi: ketidakpedulian, kesombongan, nafsu, irihati, angkara murka, lahap, dan kerakusan.

Tujuh hal tersebut merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat dan bergerak menuju ke arah modern. Hal ini juga yang harus diwaspadai oleh para da'i atau siapa saja yang *concern* terhadap berbagai masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Ketujuh persoalan tersebut berkisar pada berbagai masalah yang bersifat *kultural-psikologis* dan memerlukan penanganan yang sangat khusus. Jadi, agama harus diturunkan sebagai wacana kontemporer dan sebagai wacana budaya yang diyakini bisa menjawab berbagai tantangan budaya.

Di samping itu, menurut Abdul Munir Mul Khan yang dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, sebuah konsep dan strategi dakwah harus diarahkan pada pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.¹⁷⁴ Dakwah pemecahan masalah diharapkan akan menghasilkan tiga kondisi berikut:

- 1) Tumbuhnya kepercayaan dan kemandirian umat serta masyarakat sehingga berkembang sikap optimis;
- 2) Tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan dakwah guna mencapai tujuan kehidupan yang lebih ideal;
- 3) Berkembangnya sebuah kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan iptek sebagai landasan dalam peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹⁷⁵

Dengan demikian, dakwah pemecahan masalah merupakan upaya yang demokratis bagi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian

¹⁷⁴*Ibid.*

¹⁷⁵*Ibid.*

pemberdayaan manusia dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang objektif. Dengan sebuah dakwah pemecahan masalah dan pengembangan masyarakat, komunitas masyarakat Muslim terkecil dapat dikembangkan menjadi komunitas sosial yang memiliki kemandirian dan kemampuan internal yang berkembang dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi, pengembangan kualitas dan kemampuan sumberdaya umat dalam ruang lingkup kecil, seperti jamaah pengajian atau keluarga harus menjadi persoalan yang mendapat perhatian seluruh lembaga formal dakwah Islam secara sistematis dan terencana.¹⁷⁶

Senada dengan penjelasan di atas, menurut Wrihatnolo dalam Aziz Muslim, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan masyarakat, yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.¹⁷⁷

Tahap pertama yaitu penyadaran, dalam tahap ini target yang akan diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai sesuatu. Mereka diberi pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, hal itu bisa dilakukan jika memiliki kemauan untuk keluar dari kemiskinan. Jadi, prinsip dasar dalam tahap ini adalah membuat kelompok sasaran itu paham dan mengerti akan permasalahan yang dihadapinya, sehingga mereka dapat merubah cara hidupnya.¹⁷⁸

Tahap kedua yaitu pengkapasitasan (*enabling*). Agar memiliki kecakapan (*skillfull*) dalam pekerjaan, kelompok sasaran harus diberikan daya atau kuasa, seperti kelompok sasaran harus dilatih terlebih dahulu sebelum memberikan pekerjaan.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses pengkapasitasan yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia adalah memampukan manusia dalam konteks individu maupun kelompok untuk dapat menerima kekuasaan atau daya yang akan diberikan. Misalnya melalui seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya.

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*,, h. 31.

¹⁷⁸*Ibid.*

Pengkapasitasan organisasi yaitu dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang akan menerima kapasitas atau daya tersebut. Seperti, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat, sebelum diberikan peluang usaha. Tujuan dari pengkapasitasan ini yaitu menyediakan medium sebelum meletakkan sediaan. Sedangkan pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dalam bentuk membantu membuat aturan main. Dalam cakupan sistem nilai, organisasi, bisa berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur, peraturan dan sejenisnya. Hal ini penting karena tanpa sistem nilai dikhawatirkan jika kelas usaha yang dirintis bersama menjadi besar terjadi perebutan atau ajang sengketa diantara mereka sendiri yang akhirnya menimbulkan kerugian.

Tahap terakhir adalah pemberian daya. Dalam tahapan ini, sasaran diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Prinsip utamanya adalah dalam proses pemberian daya atau kekuasaan harus diberikan sesuai dengan kecakapan si penerima.¹⁷⁹

Selain tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat Islam yang telah dipaparkan oleh Wrihatnolo dalam Azis Muslim di atas, Freire yang dikutip oleh Azis Muslim pun menawarkan dua hal proses pemberdayaan yang dalam hal ini diumpamakan seperti sebuah pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembebasan

Menurut Freire pendidikan harus berorientasi kepada diri sendiri dan pengenalan realitas diri manusia, yaitu pendidikan yang membuat manusia berani membicarakan berbagai masalah lingkungannya dan terlibat langsung dalam lingkungan tersebut. Jadi, pendidikan bukanlah yang menjadikan akal manusia patuh terhadap berbagai keputusan orang lain.

Bagi Freire, sistem pendidikan harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia. Pendidikan mapan selama ini telah menjadikan siswa sebagai manusia yang terasing dan tercerabut dari realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya, karena telah mendidik mereka menjadi ada dalam arti

¹⁷⁹*Ibid.*

seperti orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Pendidikan semacam ini hanya mampu merubah penafsiran seseorang terhadap situasi yang dihadapainya, tetapi tidak akan mampu merubah realitas. Produk pendidikan seperti ini menciptakan manusia menjadi penonton dan peniru, bukan pencipta. Sehingga mudah dipahami mengapa suatu revolusi yang digerakan oleh sisitem pendidikan pada akhirnya hanyalah menggantikan simbol-simbol lama dengan symbol-simbol baru yang sebenarnya sama saja, bahkan terkadang jauh lebih buruk.

Oleh karena itulah maka Freire sampai pada suatu formulasi model pendidikannya sendiri yang diberi nama pendidikan kaum tertindas, sebuah pendidikan yang ditimpa dan dibangun kembali bersama dengan, dan bukan diperuntukan bagi kaum tertindas. Pendidikan ini, merupakan pembebasan, bukan untuk penguasaan. Oleh karena itu, secara metodologis pendidikan ini menggarap realitas manusia yang bertumpu kepada refleksi dan prinsip-prinsip aksi yang disebut sebagai peraxis. Prinsip peraxis ini setiap waktu dalam prosesnya selalu merangsang diambilnya suatu tindakan, kemudian tindakan itu direflesikan kembali, dan dari refleksi itu diambil tindakan baru yang lebih baik demikian seterusnya, sehingga proses pendidikan itu merupakan suatu daur bertindak dan berpikir yang berlangsung terus menerus.

Berdasarkan model pembebasan Freire di atas, maka implikasinya terhadap pengembangan masyarakat yaitu pengembangan masyarakat tidak dapat membuat suatu program begitu saja tanpa berkomunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengembang masyarakat harus dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri.

2. Penyadaran

Kemanusiaan dan pembebasan manusia hanya dapat dilakukan apabila seseorang dapat menyadari realitas dirinya dan dunia sekitarnya. Seseorang yang tidak menyadari realitas dirinya dan dunia sekitarnya, tidak akan pernah dapat memahami apa yang ingin ia capai dan tidak akan pernah mengenali apa yang ia ingin lakukan. Jadi, mustahil memahami pada seseorang bahwa ia harus mampu memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya, sebelum ia sendiri benar-benar sadar bahwa kemampuan itu adalah fitrah kemanusiaannya dan sangat penting baginya pemahaman tersebut.

Dalam kata lain, penyadaran seseorang pada realitas dirinya dan dunia sekitarnya merupakan proses asal yang dianggap paling penting. Oleh karena itu, menurut Freire pendidikan juga dikenal sebagai metode konsientisasi atau pendidikan penyadaran. Selain itu, Pendidikan merupakan sebuah proses yang terus menerus, maka proses penyadaran merupakan proses yang inheren dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Jika seseorang telah mencapai tingkat kesadaran kritis terhadap realitas, maka orang itu pun mulai masuk kedalam proses mengerti dan bukan proses menghafal semata. Orang yang mengerti bukanlah orang yang menghafal, karena ia menyatakan diri berdasarkan suatu sistem kesadaran, sedangkan orang yang menghafal hanya menyatakan diri atau sesuatu secara mekanis tanpa perlu sadar apa yang dikatakannya. Dengan demikian, dunia kesadaran seseorang harus terus berproses, berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat kesadaran naif sampai ke tingkat kesadaran kritis.¹⁸⁰

¹⁸⁰Dalam teorinya Freire menyebut macam-macam tingkat kesadaran, yaitu:

Disinilah letak pentingnya kata-kata, karena kata-kata yang dinyatakan seseorang adalah mewakili dunia kesadarannya, serta fungsi, interaksi antara tindakan dan fikirannya.

Atas dasar ini, Freire menyatakan bahwa proses belajar aksara dan baca pada tingkat yang paling awal sekali dari semua proses pendidikan haruslah benar-benar merupakan suatu proses yang fungsional, bukan sekedar kegiatan teknis mengajarkan huruf dan angka secara mekanis. Demikian juga proses musyawarah dalam masyarakat, proses musyawarah yang paling awal sekali harus dimulai adalah menyadarkan masyarakat akan program yang dimusyawarahkan. Dengan menyadari program yang dimusyawarahkan, maka masyarakat akan tergerak untuk ikut memikirkan, merasa memiliki, dan bertanggungjawab dengan baik dalam menjalankan program tersebut. Jadi, pengembangan masyarakat diperlukan dalam rangka membebaskan dan menyadarkan masyarakat dalam

-
- a. Tingkat kesadaran terendah ia sebut *interansitive consciousness*. Orang dalam tahap ini perhatiannya terikat pada kebutuhan pokok, terikat pada kebutuhan jasmani dan tidak sadar akan sejarah, tenggelam pada masa kini yang menindas.
 - b. Tingkat kesadaran kedua disebut *semi intransitivity* atau *magical consciousness*. Kesadaran yang dimiliki masyarakat tertutup dan berbudaya bisu. Kesadaran ini berciri *fatalistic*. Dalam level ini orang menginternalisasikan nilai-nilai negatif dan sangat dipengaruhi oleh emosi. Hidup dalam ketergantungan merupakan hidup di bawah orang lain. Bentuk kesadaran ini seringkali mengungkapkan diri dalam magik yang *defensive* dan *terapeutik*.
 - c. Tingkat yang ketiga adalah *naiveconsciousness* atau *semi transitive consciousness*. Dalam tingkat ini orang mulai mempertanyakan tentang situasi hidup tetapi naif dan primitif. Kebisuan bukan lagi menjadi ciri kesadaran tingkat ini. Tetapi orang dalam tahap perkembangan ini mudah dikuasai pemimpin rakyat. Orang mulai merasa mempunyai kontrol atas hidup mereka sendiri, tetapi bahaya manipulasi dari pemimpin rakyat masih besar. Tingkat ini dinamakan juga *popular consciousness*.
 - d. Tingkat yang keempat adalah *criticalconsciousness*. Tingkat ini dicapai melalui proses penyadaran. Tahap ini ditandai dengan kedalaman dalam menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam diskusi-diskusi kemampuan menerima dan menolak untuk mengelak dari tanggung jawab. Mutu pembicaraan bersifat dialog. Dalam level ini orang dapat merefleksi dan mampu melihat hubungan sebab akibat yang langsung. Belajar dari Freire adalah proses dimana orang bergerak maju dari tingkat kesadaran yang lebih rendah menuju kepada tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

menemukan kebutuhannya sendiri. Struktur masyarakat yang membelenggu perlu dibongkar, demikian juga sistem yang tidak menguntungkan perlu dihancurkan. Masyarakat yang tidak sadar akan struktur dan sistem yang tidak menguntungkan perlu didampingi sehingga mampu mengenali dirinya sendiri dan masalahnya sendiri serta mampu memecahkan masalahnya sendiri.

4. Matra dan Bentuk Usaha Pemberdayaan Masyarakat Islam

a. Matra Pemberdayaan Masyarakat Islam

Menurut Agus Efendi dalam Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i terdapat tiga matra pemberdayaan dalam konteks keumatan masa kini, yaitu pemberdayaan dalam matra ruhaniah, matra intelektual, dan matra ekonomi.¹⁸¹

1) Pemberdayaan dalam Matra Ruhaniah

Menurut Agus Efendi yang dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i mengatakan bahwa degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran Islam. Kepribadian kaum Muslim terutama mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooptasi oleh budaya negatif Barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama di hampir semua lini pendidikan. Untuk keluar dari belitan persoalan ini, masyarakat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan, yang berorientasi kepada pemberdayaan total ruhaniah Islamiah dan tidak bertentangan dengan kemodernan maupun perjuangan kebenaran ilmiah.

¹⁸¹Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*,, h. 44.

Ife menyatakan bahwa pengembangan dan perkembangan personal sangatlah penting dalam memberikan arti bagi masyarakat dan kebutuhan ini dipahami sebagai kebutuhan pengembangan spiritual.¹⁸² Menurut Ife juga pengembangan spiritual dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam menunjang arti kehidupan manusia, karena spiritual dapat memberikan makna dalam jati diri manusia dan mengisi kekosongan batin manusia. Selain itu, dimensi spiritual sangat penting dalam pengembangan masyarakat. Penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan rasa akan kesakralan merupakan bagian penting dari pembentukan kembali masyarakat yang memberikan tujuan dan arti kehidupan manusia. Bangunan manusia secara garis besar terdiri dari jasmani dan rohani, sehingga manusia disebut sebagai makhluk Allah SWT yang sangat sempurna diantara makhluk yang lain. Moral dalam pandangan Islam menjadi pengendali bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah atau pemimpin dan tolak ukur seseorang dimata Tuhan. Pada saat Islam pertama kali dibawa oleh Rasulullah SAW dalam menyempurnakan akhlak manusia di zaman Jahiliyah, moral menjadi hal utama yang menjadi perhatian karena terjadi degradasi moral besar-besaran dan mengakar dalam jiwa manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa “akhlak dapat memberikan makna baru terhadap sebuah konsep nilai, dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat era industrialisasi dan ancaman degradasi moral”.¹⁸³ Sebagai antitesa ajaran Islam, masuknya budaya Barat tidak dapat dibendung baik melalui para pemuda-pemudi Islam yang

¹⁸²Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development*,, h. 480.

¹⁸³Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 232.

sudah terkontaminasi dengan budaya negatif Barat maupun teknologi informasi. Maka solusi yang tepat untuk membentengi umat Islam dari pengaruh budaya negatif Barat tersebut yaitu melalui pemberdayaan total ruhaniah islamiyah. Selain itu, pola dakwah Islam dan pendidikan harus memberikan porsi yang cukup terhadap masalah ruhani Islamiyah, karena kepincangan ruhaniah dan intelektual juga bisa terjadi apabila intelektual yang dimiliki oleh manusia yang bobrok akhlaknya. Jadi, Islam dan ajarannya selalu berusaha membawa manusia sejahtera lahir dan batin sehingga pemberdayaan manusia perlu bimbingan moralitas dan agama.

Berikut merupakan proses pemberdayaan masyarakat dalam matra agama di zaman kekinian yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan melalui:

- a) Tauhid merupakan kekuatan paradigmatis dalam teologi dakwah yang memperkuat strategi dakwah. Oleh karena itu, harus meletakkan paradigma tauhid dalam setiap aktivitas dakwah.
- b) Diperlukan pemikiran inovatif yang dapat merubah kemampuan pemahaman agama dari pemahaman yang tertutup menuju pemahaman yang terbuka. Oleh karena itu, perubahan masyarakat harus berimplikasi pada perubahan paradigmatis pemahaman agama.¹⁸⁴
- c) Dakwah Islam yang berorientasi pada upaya *amar ma'ruf nahi munkar*¹⁸⁵ yaitu strategi yang imperatif dalam dakwah.¹⁸⁶

¹⁸⁴Tentang kebenaran agama, Sayyid Ahmad Khan mengatakan bahwa satu-satunya ukuran untuk menilai kebenaran agama yang ada dihadapan kita, apakah agama yang dipersoalkan itu sesuai dengan fitrah manusia (*natural disposition of man*) atau sesuai dengan alam (*nature*). Jika sesuai maka agama itu benar, dan adanya persesuaian seperti itu merupakan tanda bahwa agama itu memang benar-benar diturunkan oleh Allah yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan seisinya. Dalam Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1996), h. 68.

¹⁸⁵Rafi'udin dan Manan Abdul Jaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 75.

¹⁸⁶Bahwa untuk mendatangkan masyarakat yang universal yang akan merubah dunia menjadi realitas yang hidup, maka tidak cukup dengan kepercayaan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang perlu dilakukan adalah pembuktian kepercayaan itu, dengan berjalan diatas bumi ini "dalam jalan Allah" dan dalam setiap tingkatan: dari ekonomi sampai moral dan politik, dari sains sampai kesenian. Dalam R. Garaudy, *Mencari Agama pada Abad 21*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), h. 203.

2) Pemberdayaan dalam Matra Intelektual

Umat Islam yang ada di Indonesia bahkan dimanapun sudah tertinggal sangat jauh dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha pemberdayaan intelektual sebagai sebuah jihad atau perjuangan besar. Dengan demikian, Agus Efendi dalam Nanih Machendrawaty dan Agus Safe'i mengatakan bahwa dalam konteks jurisprudensi tanggung jawab sosial Islam, masyarakat Islam harus berani mengedepankan jargon teologi sosial berikut:

- a) Bahwa malas belajar adalah dosa besar sosial Islam.
- b) Bahwa pemberdayaan intelektual harus merupakan gerakan semua lini keumatan.
- c) Bahwa setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus diakselerasikan.
- d) Bahwa pada tataran manajemen operasional, masyarakat Islam terutama mereka yang berkecimpung dalam wilayah manajemen korporasi keumatan, harus siap menghadapi gelombang *reengineering* yang berorientasi pada sistem manajemen keunggulan, yang boleh jadi harus meninggalkan pola-pola manajemen dan kepemimpinan yang tidak efektif, efisien dan produktif untuk diganti dengan pola-pola manajemen kepemimpinan professional dan strategis. Penolakan terhadap gerakan ini harus dinilai sebagai hambatan-hambatan yang paling nyata terhadap gerakan pemberdayaan intelektual masyarakat Islam.
- e) Bahwa untuk menjalankan ide-ide di atas, diperlukan gerakan aksional penggalan dan penghimpunan kekuatan-kekuatan ekonomis secara *by design*, yang diupayakan oleh setiap komponen umat bersama masyarakat Islam yang profesional dan transparan.¹⁸⁷

Konsep pendidikan dalam Islam menurut hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan “*sejak dari buaian sampai ke liang lahat*”, atau merupakan suatu proses “*long life education*”. Akan tetapi dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat memaknai konsep pendidikan dalam Islam sebagai petunjuk yang sangat dibutuhkan untuk seluruh umat Islam di dunia.

¹⁸⁷*Ibid*, h. 44-45.

Marzuki mengartikan pendidikan sebagai “suatu usaha yang dilakukan individu-individu dan masyarakat untuk mentransmisikan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan bentuk-bentuk ideal kehidupan mereka kepada generasi muda untuk membantu mereka dalam meneruskan aktifitas kehidupan secara efektif dan berhasil.”¹⁸⁸

Senada dengan hal di atas, Azra memberikan definisi tentang maksud dan tujuan pendidikan Islam yaitu:

- a) Memberikan pengajaran Al-Qur’an sebagai langkah pertama dalam pendidikan. Maksudnya adalah menanamkan pengertian-pengertian berdasarkan pada ajaran fundamental Islam yang terwujud dalam Al-Qur’an dan hadits.
- b) Memberikan pengertian dalam bentuk skil dan pengetahuan tentang pemahaman yang jelas bahwa hal-hal tersebut dapat berubah sesuai dengan berbagai perubahan dalam masyarakat.
- c) Menanamkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tanpa dilandasi iman dan Islam merupakan pendidikan yang pincang dan tidak utuh.
- d) Menciptakan generasi muda yang memiliki kekuatan baik dalam ilmu pengetahuan maupun keimanan.¹⁸⁹

Pendekatan pendidikan Islam di atas tersimpul dalam *First Word Conference On Muslim Education* pada tahun 1977 yang diadakan di Mekah. Berkesimpulan bahwa “tujuan dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan bertakwa, menyembah Allah dalam arti yang sebenarnya, membangun struktur pribadinya sesuai dengan syariah Islam serta melaksanakan setiap aktivitasnya sebagai wujud ketundukan kepada Tuhan”. Dalam perhimpunan tersebut terlahir juga satu gagasan yaitu untuk mencapai manfaat yang lebih tinggi, harus mengislamisasikan ilmu pengetahuan, yaitu:

¹⁸⁸Marzuki, *Membangun Masyarakat Madani melalui Pendidikan Islam Sebuah Refleksi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Cakrawala Pendidikan, 2009), h. 210.

¹⁸⁹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 80.

“Islamization does not mean subordination of any body of knowledge to dogmatic principles or arbitrary objectives, but liberation from such shackles. Islam regards all knowledge as critical; i.e., as universal, necessary and rational. It wants to see every claims pass through the tests of internal coherence correspondence with reality, and enhancement of human life and morality. Consequently, the Islamized discipline which we hope to reach in the future will turn a new page in the history of the human spirit, and bring it clear to the truth.”¹⁹⁰

Pendidikan Islam di sini bukan hanya dalam arti pendidikan ilmu-ilmu agama Islam saja, melainkan menanamkan nilai-nilai fundamental Islam kepada setiap Muslim terlepas dari disiplin ilmu apapun. Tujuan pendidikan Islam yaitu mewujudkan perkembangan yang seimbang dalam diri dengan nilai-nilai keIslaman. Keseimbangan ini dapat menghasilkan seorang individu yang beriman, berakhlak mulia, beramal soleh, saling menghormati, bekerjasama, sampai menghasilkan satu masyarakat yang harmonis. Selain itu, aspek pendidikan Islam menyeluruh dan sangat luas tidak hanya menekankan pada aspek lingkungan atau terhadap pembinaan otak saja tetapi berusaha membina individu yang beriman, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan beramal shaleh. Hal ini mampu melahirkan seorang individu Muslim yang menyeluruh dan seimbang untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat.¹⁹¹

Disamping itu, pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan (*taklif*), baik secara moral, akal, dan mental dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hamba dihadapan Tuhan dan sebagai khalifah pada alam semesta. Jadi, pendidikan mempunyai fungsi utama yaitu untuk mempersiapkan generasi muda dengan kemampuan

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 78.

¹⁹¹ *Ibid.*, h. 80.

(*ability*) dan keahlian (*skill*) yang diperlukan untuk memiliki kesiapan dan kemampuan dalam terjun langsung kemasyarakat (*society*).

3) Pemberdayaan dalam Matra Ekonomi

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah kemiskinan menjadi identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecahannya merupakan tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan. Bahkan dalam konteks ekonomis, seorang putra Islam terbaik, Sayyidina Ali mengatakan bahwa: “*Sekiranya kefakiran itu berwujud seorang manusia, sungguh aku akan membunuhnya*”.¹⁹²

Untuk keluar dari himpitan ekonomi, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi Muslim ditantang untuk lebih bekerja keras, berwirausaha, berkreasi, komunikatif dalam berinteraksi, lebih *skillfull* dalam memfasilitasi jaringan kerja dan lebih professional dalam mengelola kekuatan dan berbagai potensi ril ekonomi umat. Tidak hanya dibutuhkan penguasaan terhadap keahlian hidup atau *life skill* dan keterampilan berwirausaha saja, melainkan dibutuhkan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pada matra ekonomi, kegiatan pemberdayaan masyarakat masuk kedalam kategori dakwah didasarkan pada filosofi dakwah yaitu membawa individu dan komunitas dari kekhufuran kepada keimanan. Oleh karena itu, kemiskinan finansial atau ekonomi harus dihilangkan untuk menghindari kekhufuran. Dalam konteks ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah cara untuk

¹⁹²Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat,,* h. 50.

menghilangkan kemiskinan, setidaknya-tidaknya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka pemberdayaan kegiatan masyarakat mengandung unsur-unsur atau aspek dakwah. Disamping itu, dalam ajaran Islam, keshalehan dan kedermawanan yang didedikasikan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai ibadah. Jadi, terdapat motif keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat pada matra ekonomi, sehingga penerapannya dapat melahirkan pembangunan alternatif.

b. Bentuk Usaha Pemberdayaan Masyarakat Islam

Banyak usaha yang dapat diterapkan dalam rangka pengembangan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan dalam bidang pendidikan, pemberdayaan dalam bidang kesehatan, pemberdayaan dalam bidang ekonomi, pemberdayaan dalam bidang agama dan sebagainya. Berikut merupakan bentuk usaha yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat Islam:

1) Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Pendidikan

Pendidikan Islam, menurut Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan, dan perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islami.¹⁹³

Proses kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan

¹⁹³Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 399.

pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Proses tersebut senantiasa dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-norma *syariah* dan *akhlak al-karimah*.¹⁹⁴

Tujuan Pendidikan Islam tidak lain adalah merealisasikan idealitas Islami. Sedangkan idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuatan mutlak yang harus ditaati. Berikut merupakan tiga macam dimensi kehidupan yang mengandung nilai ideal Islam¹⁹⁵:

- a) Dimensi yang mengandung nilai peningkatan kesejahteraan hidup manusia di dunia yaitu mendorong kegiatan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia agar menjadi kekal sebagai sarana bagi kehidupan di akhirat.
- b) Dimensi yang mengandung nilai mendorong manusia untuk berusaha keras dalam meraih kehidupan bahagia di akhirat yaitu menuntut manusia untuk tidak terbelenggu oleh kekayaan duniawi, akan tetapi kemiskinan dunia harus diberantas karena kemiskinan dunia dapat menjadi ancaman kepada kekufuran.
- c) Dimensi yang mengandung nilai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi yaitu dapat dijadikan sebagai daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai gejala kehidupan.

Dimensi-dimensi nilai di atas merupakan sasaran idealitas Islami yang seharusnya dijadikan dasar fundamental dari proses pendidikan Islam. Dimensi

¹⁹⁴Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15.

¹⁹⁵ *Ibid.*, h. 109.

dimensi nilai tersebut seharusnya ditanamkan dalam pribadi Muslim secara seutuhnya melalui proses pembudayaan yang bercorak pedagogis, dengan sistem atau struktur pendidikan. Dari sinilah kita akan dapat melihat bahwa dimensi nilai-nilai Islami yang menekankan keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi-ukhrawi menjadi landasan ideal yang hendak dikembangkan atau dibudayakan dalam pribadi manusia melalui pendidikan sebagai alat pembudayaan.

Secara garis besar, lembaga-lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu, keluarga, sekolah dan masyarakat. Secara sosiologis merupakan tiga unsur dalam satu ikatan, tiga komponen dalam satu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pasal 9, bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional. Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Adapun masalah mutu pendidikan, bukan hanya masyarakat yang bertanggung jawab, tetapi keluarga dan sekolah juga ikut bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hadari Nawawi bahwa yang bertanggung jawab atas maju dan mundurnya kualitas pendidikan terdapat pada pundak keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹⁹⁶

a) Keluarga

Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat anak didik pertama menerima pendidikan dan bimbingan dari

¹⁹⁶Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 7.

orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda, karena pada usia-usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidikan orang tuanya dan anggota lainnya.

Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang artinya, “*Setiap anak dilahirkan ke dasar fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani.*” Berdasarkan *hadits* tersebut, jelaslah bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Anak dilahirkan dalam keadaan suci adalah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya.¹⁹⁷ Keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang bersifat universal multifungsional yaitu fungsi pengawasan, pendidikan, sosial, keagamaan, perlindungan dan rekreasi. Di samping itu, fungsi keluarga adalah sebagai tempat kasih sayang, ekonomi, pendidikan, perlindungan, dan agama.

Keluarga merupakan institusi sosial yang bersifat universal multifungsional, yaitu fungsi pengawasan, sosial, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi. Selain itu, fungsi keluarga adalah kasih sayang, ekonomi, pendidikan, perlindungan, rekreasi, status keluarga, dan agama. Fungsi-fungsi keluarga ini membuat interaksi antaranggota keluarga eksis sepanjang waktu. Waktu terus berjalan dengan membawa konsekuensi perkembangan dan kemajuan. Keluarga dan masyarakat tidak lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga perubahan yang terjadi di masyarakat, berpengaruh juga di keluarga.

¹⁹⁷Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*,, h. 177.

Berikut merupakan fungsi-fungsi keluarga:

- (1) Fungsi Pendidikan. Proses pendidikan di sekolah menjadi sangat penting, bukan hanya terbatas pada pendidikan intelektual, tetapi sudah mengarah kepada pendidikan pribadi anak.
- (2) Fungsi rekreasi. Dulu keluarga sebagai tempat rekreasi paling menarik tetapi sekarang sudah dialihkan ke tempat lain di luar lingkungan keluarga. Gedung bioskop, lapangan olah raga, tempat alam indah, kebun binatang, pusat pembelanjaan, dan sebagainya merupakan tempat rekreasi keluarga. Keluarga hanya sebagai tempat berkumpul untuk istirahat selepas aktivitas sehari-hari.
- (3) Fungsi keagamaan. Agama dan segala kegiatannya berpusat dalam keluarga. Sebagai pengendali nilai-nilai religius, keluarga harus dapat menangkal tentang pendangkalan ideologi agama.
- (4) Fungsi perlindungan. Dulu keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk berlindung. Akan tetapi, sekarang institusi sosial telah mengambil alih fungsi perlindungan seperti panti jompo, yatim piatu, tempat penitipan anak, asuransi jiwa, dan sebagainya.

b) Sekolah.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting sesudah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian pada lembaga sekolah ini. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada

kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga.

Tugas Guru dan pemimpin sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, juga mendidik anak beragama. Di sinilah sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Pendidikan budi pekerti dan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah haruslah merupakan kelanjutan, yang tidak bertentangan dengan apa yang diberikan dalam keluarga. Bagi setiap Muslim yang benar-benar beriman dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam, mereka berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang diberikan pendidikan agama, atau ke sekolah umum yang memberikan pendidikan agama secara terpisah pada jam-jam tertentu. Dalam hal ini mereka mengharapkan agar anak didiknya kelak memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam atau dengan kata lain, kepribadian yang seluruh aspeknya baik tingkah lakunya, kegiatan jiwanya maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan-Nya.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sebagai tempat belajar siswa. Di samping itu, Sekolah mempunyai dua aspek penting, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Di satu pihak, pendidikan sekolah bertugas mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal. Di pihak lain, pendidikan sekolah bertugas mendidik anak agar mengabdikan dirinya kepada masyarakat.

Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan Sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak untuk beberapa jam sehari lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.

Pendidikan masyarakat boleh dikatakan pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat. Anak didik sendiri secara sadar atau tidak, mendidik dirinya sendiri mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan sendiri akan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat beberapa lembaga atau organisasi, seperti organisasi pemuda, organisasi kesenian, pramuka, olahraga, keagamaan, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut membantu pendidikan dalam usaha pembentukan sikap, kesusilaan dan menambah ilmu pengetahuan di luar sekolah dan keluarga. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi tantangan kehidupan yang berubah-ubah dan semakin berat. Pendidikan berbasis masyarakat secara konseptual, merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang berpusat pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat berarti pendidikan dapat memberikan

jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat berarti masyarakat dijadikan sebagai subjek pendidikan bukan objek pendidikan. Jadi dalam konteks ini masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan.¹⁹⁸ Adapun pendidikan untuk masyarakat berarti masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dibuat untuk menjawab kebutuhan mereka. Oleh karena itu, masyarakat itu perlu diberdayakan, diberi kebebasan dan peluang untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai apa yang diperlukan untuk dan oleh masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

a) Konsep Masyarakat

Kesehatan merupakan bagian hal yang sangat penting bagi setiap manusia karena setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa memiliki kesehatan yang baik. Orang yang mempunyai harta berlimpah, dan kekuasaan menjadi tidak berarti jika tidak memiliki kesehatan yang prima.

Menurut Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara mental, fisik, sosial, maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif baik secara ekonomis maupun sosial.¹⁹⁹ Senada dengan pendapat tersebut, Menurut organisasi PBB yang menangani tentang kesehatan WHO (*World Health Organization*) kesehatan yaitu keadaan baik secara menyeluruh termasuk mental,

¹⁹⁸Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 131.

¹⁹⁹ Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1.

sosial, dan kondisi fisik serta tidak sekedar kecacatan atau ketiadaan suatu penyakit.²⁰⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan sehat secara menyeluruh dalam sisi fisik, mental, spiritual, sosial dan ekonomi.

b) Konsep Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan

Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan produktif agar memperoleh kualitas kesehatan di lingkungannya yang lebih baik merupakan serangkaian program untuk meningkatkan kualitas kesehatan.²⁰¹

c) Upaya Kesehatan

Menurut Undang-undang No. 36 tentang kesehatan dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan atau setiap kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk berbagai macam cara seperti peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh masyarakat atau pemerintah.²⁰²

d) Pendekatan Pelayanan Kesehatan

Pendekatan pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui pemeliharaan peningkatan kesehatan (*promotif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), pemulihan

²⁰⁰ Rahma Daulima "Sehat Menurut WHO" <http://www.Scribd.com/doc/9469543/sehat-menurut-WHO-diakses> 20 Desember 2019.

²⁰¹ J. Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Edisi Kedua, (Surabaya: Airlangga University Pres, 2006), h. 76.

²⁰² Undang-undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1).

kesehatan (*rehabilitatif*) dan pelayanan kesehatan tradisional.²⁰³ Pelayanan-pelayanan tersebut dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

- (1) Pelayanan kesehatan *promotif* merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang memprioritaskan kepada kegiatan promosi kesehatan;
- (2) Pelayanan kesehatan *preventif* yaitu kegiatan dalam pencegahan terhadap masalah kesehatan atau penyakit;
- (3) Pelayanan kesehatan *kuratif* yaitu kegiatan pengobatan yang difokuskan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan pengendalian penyakit yang bertujuan agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal;
- (4) Pelayanan kesehatan *rehabilitatif* adalah kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya;
- (5) Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dengan cara dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

e) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan

Agar masyarakat menjadi berdaya untuk berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas kesehatannya serta masyarakat dapat secara mandiri untuk hidup sehat agar terbebas dari masalah kesehatan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dan penyakit.

²⁰³ Undang-undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (11-16).

f) Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan

Menurut Endang Sutisna Sulaeman, pembangunan masyarakat dengan pemberdayaan dalam meningkatkan kesehatan dipandang sangat penting.²⁰⁴

Berikut merupakan hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangannya:

- (1) Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang produktif;
- (2) Proses perencanaan yang diinginkan dan berasal dari masyarakat lebih dari perencanaan yang berasal dari penguasa;
- (3) Pencegahan berbagai sikap masa bodoh merupakan proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat;
- (4) Dasar kekuatan yang mandiri dan demokrasi bagi masyarakat merupakan berbagai upaya yang kuat dalam proses pemberdayaan.²⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat bahwa pemberdayaan memiliki peran penting dalam memberikan andil kepada masyarakat menuju kesejahteraan. Selain pemberdayaan dapat membantu masyarakat untuk berupaya atau memberikan edukasi tentang langkah-langkah perubahan sosial yang dirasa dapat merubah masyarakat menjadi mandiri dan berdaya masyarakatpun dapat memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik, ekonomi, maupun sosial serta kualitas kesehatannya.

²⁰⁴ Endang Sutisna Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 54-55.

²⁰⁵ *Ibid.*

Sementara itu, pentingnya peningkatan kesehatan di masyarakat dapat dijelaskan agar terciptanya peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.²⁰⁶

g) Indikator Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Menurut Adiyoso dalam Endang Sutisna Sulaeman, menyebutkan berbagai terdapat indikator keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan diantaranya:

- (1) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan;
- (2) Mutu lingkungan hidup yang lebih baik dapat menjamin kesehatan;
- (3) Meningkatkan status gizi masyarakat;
- (4) Berkurangnya kesakitan atau *morbiditas* dan kematian atau *mortalitas*.²⁰⁷

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

Ekonomi merupakan sebuah faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup sebuah masyarakat atau komunitas. Perkembangan yang pesat telah membuat persaingan semakin ketat di zaman yang serba canggih ini. Jika persaingan tidak diimbangi dengan perbaikan ekonomi dalam umat Islam secara struktural, maka akan menjadi permasalahan ekonomi yang kompleks dan

²⁰⁶Adisasmoto Wiku, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 10.

²⁰⁷Endang Sutisna Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, h. 54-55.

dapat menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan merupakan akar dari kesenjangan dan kesusahan dalam masyarakat, sehingga agama Islam selalu mengingatkan umatnya untuk memperhatikan ekonomi, karena ekonomi yang sehat dapat membuat masyarakat Islam kuat dan bermartabat.

Kemiskinan dan distribusi pendapatan merupakan hal yang menjadi masalah dalam berbagai permasalahan ekonomi. Ketimpangan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan yang semakin luas merupakan pusat dari semua masalah pemberdayaan. Oleh karena itu, harus dibangun strategi pengembangan ekonomi. Adapun strategi pengembangan ekonomi tersebut sebagai berikut:

- a) Dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta peralatan sederhana yang dipandang penting oleh masyarakat dari berbagai kebutuhan;
- b) Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk mendapat berbagai jasa publik seperti kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan pemukiman yang dilengkapi oleh infrastruktur yang layak;
- c) Adanya balas jasa yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- d) Terciptanya prasarana yang memungkinkan produksi jasa dan barang memperoleh keuntungan;
- e) Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan strategi pengembangan ekonomi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam politik merupakan inti

pokok sasaran pemberdayaan ekonomi. Lebih jauh, M Dawam Rahardjo yang dikutip oleh Desi Syafriani mengatakan bahwa pengembangan ekonomi umat itu mengandung tiga misi.²⁰⁸ Adapun ketiga misi tersebut yaitu: 1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman kepada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. 2) Pelaksanaan ketentuan hukum syari'ah maupun etika harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. 3) Membangun berbagai kekuatan ekonomi umat Islam agar menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam seperti melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf.

Pemberdayaan dalam konteks kajian ekonomi merupakan sebuah pembelajaran agar masyarakat dapat secara mandiri melaksanakan berbagai upaya perbaikan kualitas hidupnya, khususnya berhubungan tentang kesejahteraan. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi juga merupakan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhannya secara material.

Konsepsi pemberdayaan ekonomi pada konteks pengembangan masyarakat mempunyai asumsi yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yaitu sebagai berikut:²⁰⁹

Pertama, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usaha sebagai perwujudan atas potensi yang dimilikinya, sehingga kebutuhan material maupun spiritual dapat dipenuhi.

²⁰⁸ Desi Syafriani, *Pengembangan Masyarakat Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) At Taqwa Muhammadiyah di Kota Padang*, (Padang: Tesis, 2014), h. 30-31.

²⁰⁹ M Djauzi Mudzakir, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 12-15.

Kedua, pemberdayaan masyarakat tidak dipandang sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang mempunyai sesuatu kepada yang tidak memiliki. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat atau timbulnya mental meminta.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas hidupnya.

Keempat, pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh masyarakat itu sendiri, partisipasi bukan sekedar sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama pada tahapan perumusan kebutuhan. Oleh karena itu, masyarakat yang paham akan kebutuhannya.

Kelima, pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat dalam sebuah program pembangunan ketika masyarakat tidak mempunyai daya dan bekal yang cukup. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem dan mekanisme dalam memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat harus diberi kepercayaan bahwa tanpa adanya keterlibatan mereka, maka perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membuahkan hasil yang baik.

Menurut Nani Machendrawaty, ekonomi syariah merupakan jalan keluar ekonomi yang berbasis nilai-nilai ajaran Islam.²¹⁰ Berikut merupakan ciri-ciri ekonomi Islam:

²¹⁰Nani Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*,, h. 19.

- a) Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam;
- b) Kegiatan ekonomi Islam bersifat pengabdian;
- c) Kegiatan ekonomi Islam bercita-cita luhur;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya mendapatkan kedudukan utama;
- e) Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.²¹¹

Selanjutnya, Nanih Machendrawaty mengatakan bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan ekonomi Islam dapat dilihat secara garis besar, sebagai berikut:

- a) Ekonomi Islam didasarkan kepada kepemilikan Allah SWT terhadap alam semesta;
- b) Aktifitas ekonomi Islam didasarkan kepada prinsip persaudaraan, persamaan, dan perwalian ekonomi yang universal;
- c) Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran saling membantu. Allah telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, keberanian, dan usaha-usaha manusia juga dalam kondisi-kondisi lainnya. Perbedaan-perbedaan ini merupakan dasar kehidupan ekonomi sehingga seorang manusia bergantung pada yang lainnya untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonominya.²¹²

Senada dengan hal tersebut, Ali Aziz mengatakan ekonomi Islam berlandaskan kepada beberapa nilai dasar sebagai berikut:

- a) Asas kemanfaatan yaitu kepemilikan dalam ekonomi Islam. Tidak ada kepemilikan mutlak dalam Islam dan semuanya adalah milik Allah SWT, akan tetapi manusia mengambil manfaat dan berhak menggunakannya.
- b) Prinsip keseimbangan, yaitu harus ada keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum yang dalam prinsip fiqih disebut *maslahah mursalah*.
- c) Harus mengandung keadilan (*justice*), yaitu keadilan merupakan dasar dalam Islam yang harus direalisasikan dalam masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan politik.²¹³

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Agama

²¹¹*Ibid.*

²¹²*Ibid.*

²¹³Moh Ali Azis, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya: LKIS Pelangi Aksara, 2009), h. 28-30.

Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis agama dapat dijelaskan bahwa dakwah pengembangan berupaya melaksanakan misinya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara lahir maupun batin. Upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ini dilakukan dengan membawa mereka pada kehidupan yang Islami, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kemampuan dalam menguasai teknologi. Dengan keunggulan jasmani dan rohani, maka cita-cita menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin dapat tercapai serta membawa rahmat bagi alam semesta .

Belajar dari proses penyebaran agama Islam, sebaiknya proses dakwah pemberdayaan dimulai melalui basis agama selanjutnya dikaitkan dengan pemahaman terhadap berbagai masalah sosial dan fenomena alam. Dalam kerangka misi keagamaan ini pengembangan masyarakat dilakukan untuk menjadikan masyarakat sejahtera baik lahir maupun batin.

Dakwah pemberdayaan berbasis agama juga mempunyai peran dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Dakwah ini juga sesuai dengan fungsi dakwah pemberdayaan masyarakat yang dengan sendirinya akan mengembangkan potensi masyarakat. Dengan kata lain, dakwah pemberdayaan berbasis agama diharapkan dapat melahirkan manusia yang memiliki keunggulan dalam iman, takwa yang tinggi, tangguh, dan menguasai teknologi.

Berikut merupakan beberapa prinsip dasar dalam dakwah pemberdayaan berbasis agama yaitu:

Pertama, berorientasi kepada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat secara luas. Dakwah Islam tidak hanya dilaksanakan untuk merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja, melainkan direncanakan sebagai upaya memperbaiki kehidupan sosial masyarakat bersama agar penindasan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan tidak terjadi lagi ditengah-tengah masyarakat.²¹⁴

Kedua, pada dasarnya dakwah pemberdayaan berbasis agama merupakan upaya melakukan *social engineering* atau rekayasa sosial untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan kehidupan sosial yang lebih tinggi.²¹⁵

Esensi dakwah tidak hanya terletak pada upaya merubah masyarakat, tetapi berorientasi pada upaya menciptakan kesempatan pada masyarakat untuk merubah diri melalui pemahamannya dan dengan kesadaran terhadap masalah yang mereka hadapi. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du [13]: 11 yang berbunyi:

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (QS. Ar-Ra'du [13]: 11).

Di samping itu, esensi dakwah yang lain yaitu ajakan untuk membangun kualitas kehidupan manusia secara utuh untruk memperoleh kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian dunia sampai akhirat. Jadi, kualitas disini tidak hanya berhubungan dengan persoalan ekonomi, sosial, budaya dan politik melainkan persoalan agama juga.

²¹⁴*Ibid*, h. 27.

²¹⁵*Ibid*,

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup yang seimbang (*tawazun*), yang tidak bersifat material saja tetapi spiritual juga yang sudah dikenal secara kodrati oleh manusia merupakan standar kualitas yang akan dicapai melalui dakwah Islam. Jadi, dakwah Islam merupakan kegiatan yang berhubungan dengan seluruh dimensi kehidupan manusia.

5. Tujuan dan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Islam

a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan peningkatan harkat dan martabat manusia atau peningkatan kualitas hidup manusia merupakan tujuan dari pengembangan masyarakat.²¹⁶ Pemberdayaan artinya mengembangkan sumberdaya manusia, potensi, kekuatan atau kemampuan (*daya*) agar dapat membela dirinya sendiri. Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan masalah yang paling utama dalam pemberdayaan. Masyarakat yang sadar yaitu masyarakat yang memahami berbagai hak dan tanggungjawabnya sendiri sehingga mampu menentang ketidakadilan yang terjadi kepadanya dan sanggup membela diri.

Melalui proses pendampingan, masyarakat mampu belajar mengembangkan kemampuan dan mengenali kelemahannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Memahami realitas struktural yang menindas dan sadar akan posisinya dalam realitas tersebut. Apabila kesadaran masyarakat berkembang, maka berkembang juga keinginan yang kuat untuk melakukan

²¹⁶Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam*,, h. 5.

perubahan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui berbagai tindakan bersama antarmasyarakat tersebut.

Masyarakat yang sadar dan berdaya pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Masyarakat tidak dapat dibangun oleh orang lain karena kualitas hidup masyarakat harus diupayakan oleh mereka sendiri. Sebagaimana manusia tidak dapat dibebaskan oleh manusia lain, karena kesadaran yang akan menolong dan memperbaiki hidupnya sendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa: *Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya* (Q.S Ar-Radu [13]:11). Ayat ini mengandung arti bahwa perbaikan hidup harus muncul dari inisiatif masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Kualitas hidup masyarakat dapat dikatakan terpenuhi apabila pangan dan sandang tercukupi, sehat, kondisi rumah layak tinggal, mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang dimana dapat meningkatkan taraf hidupnya, mampu berpartisipasi penuh dalam aktivitas masyarakat, mandiri dalam mengambil keputusan, dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri.

Dalam ajaran Islam, tujuan pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan saja, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang normatif baik. Artinya kemajuan material dengan perilaku berbuat baik dan kesadaran agar kesejahteraan dan kemajuan itu membawa pada keselamatan dan dapat memberi barokah.²¹⁷

²¹⁷*Ibid.*

Membangun kesejahteraan masyarakat tanpa meningkatkan pengabdian kepada Allah SWT, atau tanpa kemauan untuk berbuat baik terhadap orang lain berarti akan membangun kemajuan material yang dapat menjerumuskan kepada malapetaka kemanusiaan yaitu ketidakadilan, penindasan, pemerkosaan dan sebagainya. Sebaliknya membangun penghambaan atau pengabdian kepada Allah dengan melupakan tugas membangun kesejahteraan untuk hidup akan dapat menjadikan kehidupan yang hampa, dan kurang bermanfaat kurang bermanfaat. Sebagaimana Allah SWT berfirman: “Carilah kebahagiaan akhirat dan jangan melupakan kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain”. (QS. Al-Qashash [28] :77).

Senada dengan pendapat di atas, Menurut Kamaludin, tujuan pengembangan masyarakat Islam yaitu memiliki akidah yang kuat, akhlak mulia dan *istiqamah* serta memiliki keahlian (*skill*) yang memadai sehingga muncul *khoiru al-bariyyah, usroh sakinah dan khoiru al-ummah*.²¹⁸ Berikut merupakan arah tujuan pengembangan masyarakat Islam:

- (1) Menganalisis problem keagamaan secara khusus dan problem sosial secara umum dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perubahan sosial;
- (2) Merancang kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan skala prioritas dan problem yang ada;
- (3) Mengelola dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan kepada rencana yang telah disepakati;
- (4) Menilai seluruh proses pengembangan masyarakat;
- (5) Melatih masyarakat dalam menganalisis problem, merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan masyarakat;
- (6) Menjadi Da'i yang memiliki keteladanan karakter yaitu berusaha mengembangkan potensi masyarakat dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan ilmu pengetahuan.²¹⁹

²¹⁸Kamaluddin, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Konsep Dasar dan Arah Pengembangan)*, dalam Jurnal HIKMAH, Vol. VIII, No. 02 Juli 2014, 41-52.

²¹⁹*Ibid.*

b. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Islam

Suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut. Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan yang merujuk kepada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²²⁰

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.

²²⁰Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), h. 59-60.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Al Haddad, *Al-Da'wah Al Tammah wa Tazhkirah 'Ammah (Kelengkapan Dakwah Islam)*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Abdul Manan, *Aswaja Akidah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Lembaga NU, 2013.
- Abu Bakar Atjeh, *Problematika Dakwah di Indonesia*, Jakarta: Pusat Dakwah Islam Indonesia, 1982.
- Abu Muhammad Rasyid Ridha, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, Solo: Pustaka Al-Alaq.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abdul Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf'an Haqa'id al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi, TT.
- Adisasmoto Wiku, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- A. Fauzie Nurdin, *Islam dan Perubahan Sosial*, Semarang: Reality Press, 2005.
- _____, *Optimalisasi Kepemimpinan dan Penyuluhan Agama*, Yogyakarta: Panta Rhei Books Offset, 2016.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 4, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Al-Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, TT.
- Amin Al-Khuli, "Al-Mar'at Bayna Al-Bayt Wa Muiatama" dalam *Al-Mar'at Al-Muslimah fi al-'Ashr al-Mu'ashir*, Baghdad: T.P., T.T.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat Nahdlatul Ulama, Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Periode 2015-2020.
- Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- _____, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Charis Zubair & Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Choiril Anam, *Ansor dalam Dinamika*, Jakarta: Lajnah Ta'rif wan –Nasyr, 1995.
- Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodes Approches*, Sage: Los Angeles, 2009.
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta: Prenada media, 2004.
- Deklarasi Beijing, *Platform For Action*, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumanatul 'Ali, 2005.
- Desi Syafriani, *Pengembangan Masyarakat Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) At Taqwa Muhammadiyah di Kota Padang*, Padang: Tesis, 2014.
- Dewantara Hajar, Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: PSIUII-Ababil, 1996.
- Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.

- Endang Sutisna Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Engineer Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha A., Yogyakarta: Bentang, 1994.
- Fakhruddin Ar-Razy, *Al-Tafsir Al-Kabir*, Tehran: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, TT.
- Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radiawati, Bandung: Pustaka, 1986.
- Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Haryati Soebadio, Saparinah Sadli, *Kartini Pribadi Mandiri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Hasil Konferensi Kependudukan Sedunia di Kairo 1994.
- Hasil Rakerwil Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung 2017.
- Hellen Tierney (ed), *Women's Studies Inclopedia*, Vol I, New York: Green Word Press), h. 232.
- Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Hossein Nasr, *Ideal and Realities of Islam*, London: George Allen & Unwin, 2006.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ida Ayu Yaman, *Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Buletin Studi Ekonomi Indonesia, 2007.
- Imaduddin Isma'il Bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Surabaya: Syirkat Al-Nur Asiya, Tt.
- Imam Khomeini, *Manifestasi Tuhan dalam Wanita*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Indariati, *Metode Dakwah Islam pada Kaum Dhuafa*, Wonosobo: IIQ Press, 2008.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.

- Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, *tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI dan PPIM IAIN Jakarta, 2004.
- Jane C. Ollenburger, Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta: PT. Rajawali, 1996.
- John Scott, *Sosiologi: The Key Konsep*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- J. Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Edisi Kedua, Surabaya: Airlangga University Pres, 2006.
- John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet XII, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Joseph S. Roucek, *Sociology An Introduction*. Terjemahan Sahat Simamora dengan Judul “*Pengantar Sosiologi*“, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Kal-Nah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Khofifah Indar Parawansa, *ASWAJA (Ahlusunnah Wal Jama'ah) Panduan Internal Muslimat NU*, Jakarta: Himpunan Da'iyah dan Majelis Ta'lim Muslimat Nahdlatul Ulama (HIDMAT) Pusat, 2009.
- Komariah Emong Sapardjaja, Guru Besar Hukum Pidana UNPAD, dan Pengamat Hak Asasi Perempuan.
- Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1993.
- Kuntjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Penerbit Universitas, 1964.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.

Lofland. *Analizing social setting :A Guide to qualitative observation nad analysis*, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984.

Mahmud Ath-Thahan, *Tafsir Musthalah Al-Hadis*, Bogor: Pustaka Thanqul Izzah, 2006.

Maimunah Haji Arshad, *Di Balik Kelembutan Isteri dan Kegagahan Suami*, Johor Bharu: Jahabarsa, 1997.

Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Pendidikan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

_____, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Marzuki, *Membangun Masyarakat Madani melalui Pendidikan Islam Sebuah Refleksi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Cakrawala Pendidikan, 2009.

M Djauzi Mudzakir, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Milles Mattew, *Analisa Data Kualitatif*, terjemah, Tjetjeh Rohindi, Jakarta: UI Press, 1992.

Miles, MB dan Huberman, AM, *Qualitative data analysis*. Beverly Hills, 1984.

Modul Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Sektor Pendidikan. Direktorat Kependudukan dan Pemerdayaan Bappenas Bekerja Sama dengan CIDA.

Moh Ali Azis, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Surabaya: LKIS Pelangi Aksara, 2009.

Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW.*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1991.

- Muhammad Husain Ath-Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan*, Beirut: Mu'assanah Al-A'lami li al-Mathbu'at, 1911.
- Muhammad 'Izzah Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadits Tartib Al-Suwar Hasbu Al-Nuzul*, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1961.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV, Kairo: *Dar Al-Manar*, 1367 H.
- _____, *Al-Manar*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1973.
- Muhd Al-Tahir Ibn 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyyah, 1984.
- Muhdirahayu (*terj*), *Dictionary of Feminist Theories*, Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Musda, Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yokyakarta: Kibar Press, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995.
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia: Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Narwoko, Dwi J, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ranke Sarasin, 1996.
- _____, *Pemikiran Kalam Imam Abu Mansur Al-Maturidi (Perbandingan dengan kalam Mu'tazilah dan Al-Asy'ari)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.

- _____, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU (POAM NU), PW Muslimat NU 2015-2020.
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1996.
- Phillip Eldridge, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?*, Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 2013.
- PP. Muslimat NU, AD/ART Muslimat NU Lampung, 2016-2020.
- Qasim, Amin, *Takrir Al-Mar'ah*, Mesir : Al-Hay'ah Al-Misriyah Al-Ammah li al-Kitab, 1993.
- Rachmat, Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rafi'udin dan Manan Abdul Jaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rakernas Pimpinan Wilayah Muslimat NU Lampung, 2020.
- Random House, *Webster College Dictionary*, New York: Toronto London Sydney Auckland, 2001.
- R. Garaudy, *Mencari Agama pada Abad 21*, Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis: Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, PSW UIN, 2002.
- Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Bogor: LP3ES, 2012.
- Sa'idah, Najmah, Khusnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2015.

- _____, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Stephen, P. Robbins, *Prinsip-prinsip Organisasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____, *Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
- Supriyatno, *Sosiologi Pendidikan*, Malang: UIN – Malang Press, 2007.
- Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2003.
- Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Ummu Press. 2006.
- Undang-undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1.
- Undang-undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (11-16).
- Waryono Abdul G. dan Muh. Isnanto (eds), *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jogjakarta: PSW UIN SUKA dan IISEP, 2004.
- Yakob Napu, dkk., *Pengembangan Masyarakat: Manusia Satu Sama Lain Saling Mendidik dengan Perantara Dunia*, Gorontalo: Andraggika Press, 2009.
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

JURNAL

Agustin Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam, Gender Equality: Internasional Journal Of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Ahmad Zaini, *Peranan Dakwah dalam Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

Aprijon Efendi, *Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muwazah, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.

Atik Wartini, *Tafsir Feminis M. Quraisy Shihab (Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah)*, PALASTREN: Jurnal Studi Gender, Vol. 6, No. 2, Desember 2013.

Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol : Xx, No : 1, Maret 2013.

Bauer, Jeffrey C, *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati-Clermont, 2003.

Desi Syafriani, *Pengembangan Masyarakat Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) At Taqwa Muhammadiyah di Kota Padang*, Padang: Disertasi, 2014.

Erni Isnaeniyah, *Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU*, Jurnal Agama dan Lintas Budaya 2, 1 (Maret 2017): 154-168.

Hassan, Riffat, *Feminisme dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an. Vol. II, 1990.

Hikmah Nur Hidayah, *Perkembangan Muslimat NU Cabang Lamongan Bidang Ekonomi dan Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 1994-2015*, Jurnal AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 3, Oktober 2017.

Kamaluddin, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Konsep Dasar dan Arah Pengembangan)*, HIKMAH, Vol. VIII, No. 02 Juli 2014.

Kanfer, R., *Task-Specific Motivation: An Integrative Approach To Issues Of Measurement, Mechanisms, Processes, And Determinants*. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237-264, 1987.

Lailatus Syukriyah, *Muslimat Nahdlatul Ulama Di Indonesia (1946-1955)*, *AVATARA, e- Journal Pendidikan Sejarah Volume 4, No. 3, Oktober 2016*.

Masturin, *Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik, Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015.

Maya Nur Agustin, *Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan*, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 03 Nomor 04 Tahun 2016*, 1073-1088.

O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologis: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, *Jurnal Komunikasi*, Volume 9, No 1, Juni 2008.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No.9, Januari-Juni 2009:1-8.

Sri Endah Nurhidayati, *"Profil Kedudukan dan Peranan Wanita di Bidang Ekonomi, Kesehatan dan KB di Kabupaten Gresik," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 3, Juli 1999, h. 31-42.

Sri Roviana, *Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik*, *Jurnal Pendidikan Islam Volume III Nomor 2 Desember 2014/1436*.

WAWANCARA

Sri Dwi Ningsih, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 5 April 2018.

_____, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 10 Juni 2018.

Catur Asmawati, Sekretaris Umum PW Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 20 Mei 2018.

_____, Sekretaris Umum PW Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 11 Juni 2018.

Anis Handayani, Sekretaris I PW Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 15 Juni 2018.

Sri Wahyu Lestari, Ketua Kordinator Bidang Pendidikan dan Kaderisasi PW Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 17 Juli 2018.

Sri Mulyani, Ketua Kordinator Kesehatan dan Kependudukan PW Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 20 Agustus 2018.

Yulia, Ketua Kordinator Bidang Ekonomi Koperasi dan Agrobisnis PW Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 25 September 2018.

Mislamah, Ketua Kordinator Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat PW Muslimat NU Propinsi Lampung, Wawancara, 30 September 2018.

INTERNET

Ahmad Fauzan, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, <http://www.Menulis-proposal.blogspot.com/2012/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html?m=1>, (diakses tanggal 23 Januari 2019).

Apip Sohibul Faroji, Budaya dan Institusi Sosial, diakses dari internet <http://faroji83.wordpress.com/2008/06/10etnometodologi/>, (diakses 28 Oktober 2020).

Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi, *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap, Worl Economic Forum*, 2005, Diakses dari situs: www.weforum.org, (diakses 29 Agustus 2019).

<https://www.harjasaputra.com/riset/biografi-dan-ide-ide-pembaharuan-rasyid-ridha.html> (diakses 23 Mei 2019).

<http://www.kowani.or.id> (diakses 27 Juli 2019).

<http://lmndjakarta.blogspot.com/2018/08/tentang-bagaimana-membangun-organisasi.html>, (diakses 22 Mei 2018).

<http://Muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/> (diakses, 10 Januari 2018).

<http://novrianti,07.alumni.ip.ac.ad>. tgl 13 januari 2016. *Peranan perempuan dalam berbagai sendi kehidupan*. (diakses 14 Nopember 2017).

<http://www.mdn.biz.id/n/317942/> (diakses, 10 Januari 2018).

<http://repository.uin-suska.ac.id/6273/3/BAB%20%28II%29.pdf>.(diakses 27 Agustus 2019).

Mayoux, Linda, *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*. Aga Khan Foundation, (2001), Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>. (diakses 23 Juni 2018).

Nasaruddin Umar, "*Perspektif Gender dalam Islam. Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*", dalam <http://media.isnet.org/Islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html> (diakses 15 Desember 2017).

Rahmadaulima "Sehat Menurut WHO" <http://www.Scribd.com/doc/9469543/sehat-menurut-WHO-diakses> (diakses 20 Desember 2019).